

2021

LAPORAN KEBERLANJUTAN
SUSTAINABILITY REPORT



DRIVING RECOVERY TOWARDS RESILIENT SOCIETY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT



DAFTAR ISI

Table of Content

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN About the Sustainability Report	2		
 STRATEGI KEBERLANJUTAN Sustainability Strategy	7		KINERJA KEBERLANJUTAN Sustainability Performance 62
IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN 2021 2021 Sustainability Performance Highlights	19		MENGHASILKAN KINERJA OPERASIONAL YANG POSITIF Delivering Positive Operational Performance 63
 PROFIL PERUSAHAAN Company Profile	22		MELESTARIKAN LINGKUNGAN Preserving the Environment 72
LAPORAN DIREKSI Board of Directors Report	30		MENGEMBANGKAN SDM BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS Developing Quality Human Resources with Integrity 82
 TATA KELOLA KEBERLANJUTAN Sustainability Governance	34		TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Social Responsibility and Community Empowerment 92
			INDEKS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 51/POJK.03/2017 POJK Index No. 51/POJK.03/2017 101
			INDEKS GRI STANDARDS - CORE OPTION GRI Standards - Core Option Index 103
			LEMBAR UMPAN BALIK Feedback Form 109

➤ Mendorong Pemulihan menuju Masyarakat yang Tangguh dan Pembangunan yang Berkelanjutan

Driving Recovery towards Resilient Society and Sustainable Development

Pandemi COVID-19 yang mulai berangsur pulih tetap menjadikan tahun 2021 penuh dengan tantangan dan hambatan. Meski menghadapi situasi yang sulit, IIF tetap memberikan kinerja yang optimal dan positif untuk menjalankan mandat sebagai katalisator pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pencapaian positif yang diraih yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2021, IIF berhasil meningkatkan diversifikasi investasi dengan membiayai proyek-proyek pada sektor baru, seperti proyek pembangunan jalur kereta api, rumah sakit, dan *data center*. Hal ini menunjukkan komitmen IIF dalam mendukung pemulihan menuju masyarakat yang tangguh dengan menyediakan pembiayaan terhadap infrastruktur yang mampu meningkatkan akses kesehatan, komunikasi, dan transportasi yang memadai.

IIF secara terus-menerus memastikan penerapan prinsip sosial dan lingkungan pada setiap proyek yang dibiayai. Sistem pengelolaan sosial dan lingkungan merupakan hal penting yang perlu untuk dimiliki oleh proyek, termasuk di dalamnya proses identifikasi potensi risiko dan dampak terhadap sosial dan lingkungan yang dapat membantu proyek untuk mempersiapkan tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh proyek. IIF berharap agar setiap proyek infrastruktur yang dibiayai dapat memperoleh manfaat dari praktik-praktik terbaik serta menciptakan *multiplier effect* yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga keseimbangan pembangunan terhadap sosial dan lingkungan dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi masa depan.

While the COVID-19 pandemic has gradually improved, it still presented 2021 with challenges and limitations. Despite facing a difficult situation, IIF continues to deliver optimal and positive performance in its mandated task as a catalyst for infrastructure development in Indonesia. This is proven by various positive achievements that are expected to bring benefits to the society, the environment, and sustainable development.

In 2021, IIF succeeded in diversifying its investments with financing to a number of projects in new sectors, e.g. railway, hospital, and data center construction. This reflects IIF's commitment to supporting the recovery towards a resilient society by providing financing for infrastructures that are able to improve access to adequate health, communication, and transportation.

IIF consistently ensures the application of social and environmental principles to each of the infrastructure projects in its portfolio. The social and environmental management system is a key aspect in a project, including the process of identifying potential risk and impact on social and environmental aspects that can help the project to prepare the necessary mitigation measures. IIF hopes that each of the infrastructure projects in its portfolio can benefit from best practices and create a multiplier effect towards better welfare for communities, so that the benefits of balanced development with social and environmental considerations can be preserved for future generations.

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

About the Sustainability Report

Laporan Keberlanjutan ini diterbitkan sebagai salah satu upaya IIF untuk menjelaskan tentang komitmen keberlanjutan, kinerja, aktivitas operasional, serta dukungan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan pembiayaan infrastruktur. Laporan ini juga menjelaskan berbagai program, inisiatif, ataupun kebijakan dalam membangun bisnis Perseroan yang berkelanjutan yang selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan global, yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs).

STANDAR PELAPORAN

IIF menerbitkan Laporan Keberlanjutan setiap tahunnya berdampingan dengan Laporan Tahunan. Laporan tahun ini menyajikan informasi selama periode 1 Januari-31 Desember 2021. Laporan ini merupakan laporan ketiga yang dipublikasikan IIF, sementara Laporan sebelumnya di tahun 2019 dan 2020 dapat diakses di laman *web* IIF (<https://iif.co.id/en/investor/financial-informations/sustainability-report/>).

Pada laporan ini terdapat penyesuaian terkait dengan data emisi yang dihasilkan dari proyek-proyek Energi Terbarukan, dimana pendekatan yang digunakan saat ini dihitung berdasarkan *grid emission factor* yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perhitungan yang lebih spesifik sesuai dengan lokasi proyek. **[102-48]**

This Sustainability Report is published as one of IIF's efforts to elaborate on IIF's commitment to sustainability, performance, and business operations, while also a support to the acceleration of national economic growth through infrastructure financings. This report further elaborates on our various programs, initiatives, or policies to build the Company's sustainable business in a way that is consistent with Sustainable Development Goals (SDGs).

REPORTING STANDARD

IIF publishes its Sustainability Report annually together with its Annual Report. This year's report presents information for the January 1-December 31, 2021 period. This report is the third report published by the Company while the previous reports in 2019 and 2020 can be accessed on the Company's website (<https://iif.co.id/en/investor/financial-informations/sustainability-report/>).

In this report, there are adjustments related to the emission data generated from Renewable Energy projects, where the current approach is calculated based on the grid emission factor issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM). This approach is expected to provide more specific calculations according to the project location. **[102-48]**

Periode Pelaporan Reporting Period [102-50]	Siklus Pelaporan Reporting Cycle [102-52]	Laporan Sebelumnya Previous Report [102-51]	Indeks GRI GRI Index [102-55]
1 Januari-31 Desember 2021 January 1- December 31, 2021	Tahunan Annually	1 Januari-31 Desember 2020 Diterbitkan pada April 2021 January 1- December 31, 2020 Issued on April 2021	Di halaman 103 On page 103

Laporan Keberlanjutan ini disusun sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan IIF terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 yang mencakup kewajiban perseroan untuk menyampaikan pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan setiap tahun. Selain itu, laporan ini juga merupakan pemenuhan kewajiban IIF terhadap Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan

This Sustainability Report is prepared to manifest the IIF's commitment and compliance with the applicable regulatory provisions, including Law No. 40 of 2007 regarding the corporate obligation to submit a yearly report on the implementation of Social and Environmental Responsibility activities. Moreover, this report also fulfills IIF's obligation to OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers,

Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik serta Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, di mana Perusahaan baru diwajibkan untuk menerbitkan Laporan Keberlanjutan, baik sebagai bagian dari Laporan Tahunan maupun secara terpisah untuk periode 2021.

Laporan ini juga disusun berdasarkan panduan Global Reporting Initiative (GRI) opsi Inti (GRI Standards: *Core Option*). Indeks isi laporan dengan klausul-klausul dari Surat Edaran OJK No. 16 tahun 2021 dan indikator GRI Standard yang relevan dapat ditemukan pada bagian akhir buku Laporan Keberlanjutan ini. [102-54][102-55]

CAKUPAN DAN BATASAN LAPORAN

Laporan Keberlanjutan IIF memiliki cakupan dan batasan yang difokuskan pada tiga aspek utama yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berhubung IIF tidak memiliki entitas anak perusahaan, maka laporan keuangan, cakupan, dan batasan topik material hanya mencakup entitas PT Indonesia Infrastructure Finance, dan tidak termasuk induk perusahaan maupun proyek-proyek yang dibiayai. Meski demikian, IIF tetap mengungkapkan beberapa pencapaian dan dampak tertentu yang berasal dari proyek-proyek yang dibiayai. IIF telah mempertimbangkan secara menyeluruh asumsi-asumsi tertentu dan telah memutuskan untuk memasukkan beberapa data keberlanjutan dari proyek-proyeknya dalam laporan ini, dengan tujuan untuk menyoroti apa, bagaimana, dan di mana dampak terhadap keberlanjutannya paling menonjol. Pada laporan ini terdapat penyesuaian terkait dengan data emisi yang dihasilkan dari proyek-proyek Energi Terbarukan, dimana pendekatan yang digunakan saat ini dihitung berdasarkan *grid emission factor* yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Oleh karena itu, data dari tahun-tahun sebelumnya dihitung ulang dan disajikan kembali dalam laporan ini. [C.6][102-45][102-48][102-49]

and Public Companies as well as OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 regarding the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies, which states that new companies are required to issue a Sustainability Report as part of the Annual Report or separately for the 2021 period.

This report is also prepared with reference to the Global Reporting Initiative (GRI) Core Option (GRI Standards: Core Option) guidelines. The report's content index with clauses from OJK Circular Letter No. 16 year 2021 and relevant GRI Standard indicators can be found at the end of this Sustainability Report. [102-54][102-55]

SCOPE AND BOUNDARIES OF THE REPORT

The IIF Sustainability Report has a scope and boundaries which is focused on three main aspects, namely environmental, economic, and social aspects. Since IIF does not have any subsidiaries, the financial statements, scope, and material topic boundaries only cover PT Indonesia Infrastructure Finance, and exclude the parent company as well as financed projects. However, IIF does disclose certain accomplishments and impacts caused by the financed projects. IIF has thoroughly considered certain assumptions and has decided to include in this report all available sustainability data from the projects, highlighting what, how, and where the impacts on sustainability are considered to be most profound. This report has no significant changes in the scope and boundaries of topics or restatement of information. In this report, there are adjustments related to the emission data generated from Renewable Energy projects, where the current approach is calculated based on the grid emission factor issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM). Therefore, the data from previous years was recalculated and restated in this report. [C.6][102-45][102-48][102-49]

PENENTUAN MATERIALITAS

Dalam mendefinisikan Materialitas, GRI menawarkan 4 prinsip yang dapat digunakan untuk menentukan konten pelaporan yaitu Inklusivitas Pemangku Kepentingan, Konteks Keberlanjutan, Materialitas, dan Kelengkapan. Perseroan juga menggunakan Prinsip Sosial dan Lingkungan IIF serta melibatkan berbagai unit dan departemen untuk membantu mempertimbangkan dampak serta topik yang relevan terhadap keputusan pemangku kepentingannya, dalam hal ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Materialitas laporan ini ditentukan melalui tahapan sebagai berikut: [102-46]

1. Identifikasi

Sejumlah isu dan topik yang relevan diidentifikasi melalui diskusi dengan berbagai unit dan departemen untuk mengetahui dampak serta topik yang sesuai dengan ketersediaan informasi, kapasitas IIF, dan preferensi dari berbagai pemangku kepentingan.

2. Prioritas

Tinjauan internal diadakan untuk memprioritaskan topik sesuai dengan dampak dan pengaruhnya.

3. Validasi

Validasi atas isu dan topik tersebut dilakukan melalui diskusi dengan manajemen puncak Perseroan, para pemimpin senior, hingga tingkat pelaksana kerja. Beberapa isu yang termasuk dalam daftar topik material untuk laporan ini adalah etika bisnis, tata kelola perusahaan, dan masalah lingkungan dan sosial.

TOPIK MATERIAL [102-47] [103-1]

Topik material Laporan Keberlanjutan IIF dipilih sesuai dengan panduan Standar GRI, yang kemudian masing-masing topik dikategorikan ke dalam jenis kategori *Most Important*, *More Important*, dan *Important*. Dalam memprioritaskan materialitas topik berdasarkan prinsip-prinsip Standar GRI, IIF menggunakan Prinsip Sosial & Lingkungan (SEP), yang dijelaskan lebih lanjut dalam bagian terpisah di laporan ini, sebagai upaya untuk mempertimbangkan dampak setiap topik terhadap keputusan pemangku kepentingannya, dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Pada tahun 2021, matriks materialitas serta konten dan batasan topik untuk laporan keberlanjutan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. [102-47] [102-49]

DETERMINING MATERIALITY

To define materiality, GRI offers 4 principles that can be used to determine the reporting content, which include Stakeholder Inclusiveness, Sustainability Context, Materiality, and Completeness. The Company also uses the IIF Social and Environmental Principles and involves various units and departments to help consider the impacts and topics relevant to the decisions of its stakeholders, in terms of economy, environment, and society. The materiality of this report is determined through the following stages: [102-46]

1. Identification

Several relevant issues and topics were identified through discussions with various units and departments to find out the impacts and topics in accordance with the availability of information, IIF's capacity, and preferences of various stakeholders.

2. Priority

Internal reviews were held to put priority on certain topics depending on their impacts and influences.

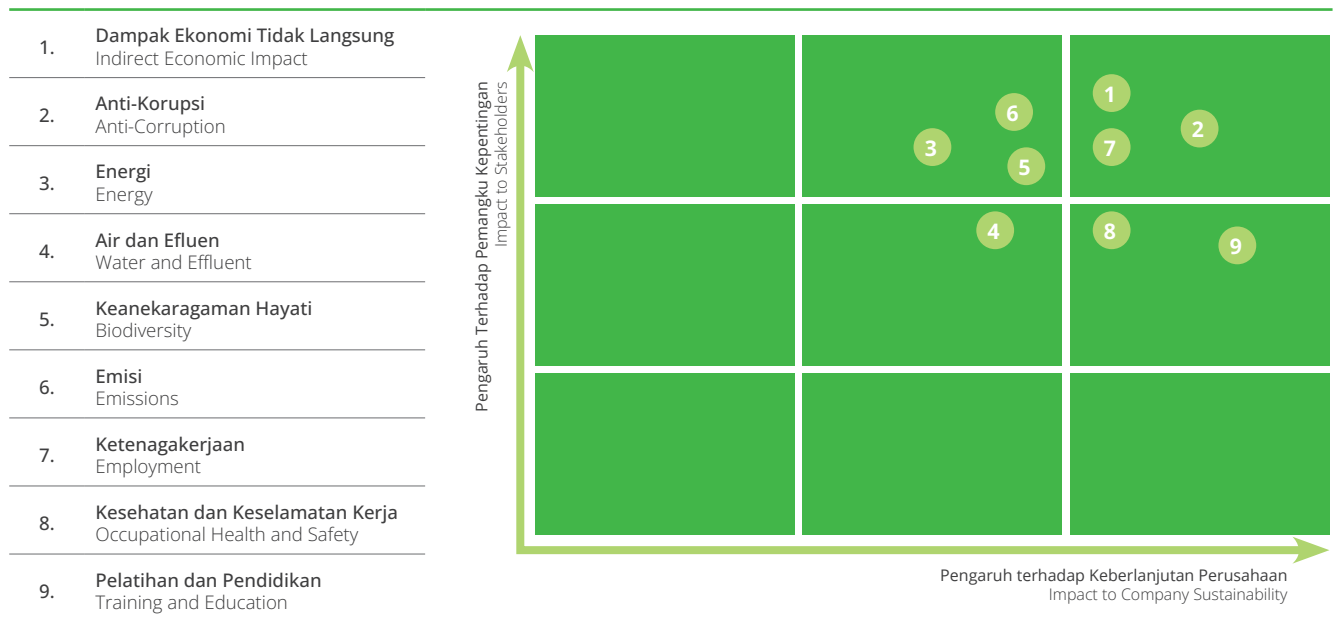
3. Validation

Issues and topics were validated through discussions with the Company's top management, senior team leaders, and down to the working level. Some of the issues included in the list of material topics of this report are business ethics, corporate governance, and environmental and social issues.

MATERIAL TOPIC [102-47] [103-1]

The material topics of IIF Sustainability Report were selected using GRI Standards Guidelines, which are then categorized as Most Important, More Important, and Important. In prioritizing topic materiality based on GRI Standards Principles, IIF applies the Social & Environmental Principles (SEP), which are elaborated further in a separate section of this report, as an effort to consider the impact of each topic on stakeholders' decisions in the economic, environmental and social aspects.

In 2021, the materiality matrix as well as the content and topic boundaries for the sustainability report have not changed from the previous year. [102-47] [102-49]



No.	Topik Material	Penjelasan Topik Material	Elaboration on Material Topic
1	Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impact	Proyek-proyek yang dibiayai IIF akan memiliki dampak ekonomi tidak langsung terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Topik ini menjadi salah satu topik utama bagi Perseroan dan para pemangku kepentingan.	The projects that IIF finances will have indirect economic impacts on the development and improvement of the welfare of the communities residing around the projects. This topic has become one of the main topics for the Company and its stakeholders.
2	Anti-korupsi Anti-Corruption	IIF memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan proyek-proyek infrastruktur telah dilakukan secara transparan tanpa adanya konflik kepentingan yang dapat berujung pada tindak korupsi dan tindakan-tindakan tidak berintegritas lainnya. Oleh karena itu, IIF memasukkan topik anti-korupsi sebagai salah satu topik material dalam laporan ini.	IIF ensures that the entire financing process in each of our infrastructure projects has been carried out in a transparent manner without any conflicts of interest that could have otherwise led to corruption and other fraudulent acts. Therefore, IIF includes the topic of anti-corruption as one of the material topics in this report.
3	Energi Energy	Pengelolaan dan penggunaan energi dalam kegiatan operasional Perseroan serta proyek-proyek yang dibiayai menjadi perhatian penting bagi para pemangku kepentingan. Penggunaan energi tentunya berkontribusi secara langsung terhadap emisi karbon yang dihasilkan sehingga IIF melakukan pemantauan terhadap penggunaan dan pengelolaan energi dalam kegiatan operasional IIF dan di setiap proyek-proyek yang dibiayai.	Energy consumption and management in the Company's operational activities as well as in the financed infrastructure projects are a subject of great concern for the stakeholders. Energy consumption has a direct contribution to the carbon emissions produced, so IIF conducts monitoring on the use and management of energy in the Company's operational activities and each of the financed projects.
4	Air dan Efluen Water and Effluent	Pengelolaan dan pemakaian air secara bijak menjadi tanggung jawab bagi IIF untuk memastikan bahwa seluruh proyek-proyek yang dibiayai telah mengikuti standar dan aturan yang berlaku dalam upaya menjaga kualitas air yang digunakan atau berada di sekitar lokasi proyek.	IIF bears the responsibility to manage and use water wisely in order to ensure that all of the financed projects abide by applicable standards and comply with regulations in an effort to maintain the quality of the water used or in the vicinity of the project site.
5	Keanekaragaman Hayati Biodiversity	IIF menyadari pentingnya perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, serta pengelolaan terhadap jasa ekosistem dan sumberdaya alam secara berkelanjutan dari lokasi proyek-proyek yang dibiayai. Untuk menghindari dan meminimalkan dampak terhadap keanekaragaman hayati, IIF memastikan klien untuk dapat melakukan kajian dampak proyek pada semua tingkatan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari proses penilaian sosial dan lingkungan.	IIF recognizes the importance of biodiversity protection and conservation, as well as the sustainable management of ecosystem services and natural resources of the projects' locations that IIF finances. In order to avoid and minimize adverse impact to biodiversity, IIF encourages its clients to conduct an impact assessment on all levels of biodiversity as an integral part of the social and environmental assessment process.
6	Emisi Emission	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berdampak pada perubahan iklim menjadi tantangan bagi IIF sebagai perusahaan penyedia jasa pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. IIF berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK melalui standar kinerja bernama Sistem Pengelolaan dan Penilaian Sosial dan Lingkungan (SEMS) yang membantu semua pihak untuk dapat mengikuti prinsip-prinsip S&E dan berkomitmen untuk mewujudkan pengurangan emisi.	GHG emissions reduction that has an impact on climate change is a challenge for IIF as a provider of financing services for infrastructure development. IIF is committed to reducing GHG emissions through a performance standard called the Social and Environmental Management and Assessment System (SEMS) which helps all engaged parties to follow S&E principles and commit themselves to realize the emission reductions.

No.	Topik Material	Penjelasan Topik Material	Elaboration on Material Topic
7	Ketenagakerjaan Employment	IIF berkomitmen untuk membuka kesempatan kepada setiap orang untuk bergabung dengan Perseroan tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, dan agama. IIF melakukan rekrutmen secara transparan dan adil tanpa membedakan latar belakang tertentu.	IIF is committed to providing opportunities for everyone to join the Company regardless of gender, ethnicity, race, and religion. IIF conducts recruitment in a transparent and fair manner without prejudice against certain backgrounds.
8	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Occupational Health and Safety	IIF menyadari bahwa kegiatan pembangunan proyek harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan bagi pekerja. IIF juga memastikan bahwa seluruh proyek yang dibiayai telah menerapkan aspek-aspek K3 sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku.	IIF realizes that project development activities must pay attention to the health and safety of workers. IIF also ensures that all the financed projects have implemented OHS aspects in accordance with applicable rules and guidelines.
9	Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Pengembangan karyawan melalui pelatihan dan pendidikan menjadi aspek penting dalam kegiatan Perseroan terutama dalam menyamakan persepsi dan semangat untuk menjalankan prinsip S&E.	Employee development through training and education is an important aspect of the Company's activities, especially in sharing the same perceptions and enthusiasm for implementing S&E principles.

Untuk korespondensi lebih lanjut, IIF telah menyediakan form umpan balik pada Laporan Keberlanjutan ini yang dapat dikirimkan melalui beberapa jalur komunikasi berikut: **[102-53]**

For further correspondence, IIF has provided a feedback form in this Sustainability Report that can be sent through the following communication lines: **[102-53]**

Sustainable Finance Working Group (SFWG)

PT Indonesia Infrastructure Finance

Prosperity Tower 53rd – 55th Floor, District 8
Sudirman Central Business District, Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Tel. : (+62) 21 5082 6600
Fax. : (+62) 21 5082 6601
E-mail : SFWG.Coord-Secr@iif.co.id

STRATEGI KEBERLANJUTAN [A.1]

Sustainability Strategy



- Peran Perseroan dalam upaya peningkatan kualitas sosial dan lingkungan dari pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah dengan menjadi agen utama perubahan untuk memperkenalkan, menjelaskan, memantau, dan memastikan kepatuhan terhadap Prinsip Sosial dan Lingkungan IIF yang telah mengadopsi standar dan praktik terbaik bertaraf internasional.

The Company's role in improving the social and environmental quality of infrastructure development in Indonesia is to become the main agent of change where IIF introduces, explains, monitors, and ensures compliance with its Social and Environmental Principles which have adopted international standards and best practices.

Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas nasional di Indonesia yang mampu memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat serta memiliki peran penting untuk membantu mengatasi perubahan iklim. Ketersediaan infrastruktur yang baik dan merata menjadi tolok ukur kemajuan suatu negara, karena dengan tersedianya infrastruktur tersebut maka akan tercipta *multiplier effect* yang dapat meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.

Sebagai perusahaan yang menyediakan pembiayaan dan jasa konsultasi bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia, IIF memiliki tanggung jawab dalam menyediakan produk dan jasa yang berkelanjutan. Seperti kita ketahui, pembangunan

Infrastructure development is one of the top nation-building priorities in Indonesia, which can contribute to a stronger economic recovery and plays an important role in helping to tackle the issue of climate change. The availability of good and equitable infrastructure is a globally common standard to measure how a country has progressed since infrastructure has a multiplier effect that can grow the country's coast-to-coast economy.

As a company that provides financing and consulting services for infrastructure development in Indonesia, IIF bears the responsibility to provide sustainable products and services. As we all know, infrastructure development also has the potential

infrastruktur juga memiliki potensi untuk menimbulkan dampak negatif terhadap aspek sosial dan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Dampak ini dapat muncul pada setiap tahapan pembangunan proyek infrastruktur, sehingga diperlukan adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak yang terlibat untuk memenuhi standar pembangunan yang berkelanjutan.

Hal inilah yang menjadi tanggung jawab IIF untuk memberikan pembiayaan berkelanjutan dengan menyeimbangkan manfaat ekonomi proyek dengan pengelolaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. IIF menganut prinsip pembangunan yang mengedepankan konsep *triple bottom line* yang terdiri dari 3P (*People, Planet, dan Profit*). Prinsip tersebut dituangkan melalui mekanisme pembiayaan yang terintegrasi dengan penerapan Prinsip Sosial dan Lingkungan (*Social and Environmental (S&E) Principles*). IIF berkomitmen untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip S&E pada setiap proyek infrastruktur yang dibiayai.

PRINSIP SOSIAL DAN LINGKUNGAN IIF

Prinsip S&E merupakan standar yang digunakan oleh IIF untuk memastikan klien mengelola dan mengurangi dampak serta risiko dari masalah sosial dan lingkungan dari proyek infrastruktur. Dengan menerapkan prinsip S&E sesuai standar internasional, diharapkan proyek infrastruktur dapat turut memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan dan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dari infrastruktur tersebut, sehingga proyek tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar lokasi proyek.

to create some negative impacts on social and environmental aspects if not managed properly. These impacts can appear at any stage of an infrastructure development project, and that is why it is necessary for all parties involved to embrace a strong commitment in order for them to meet sustainable development standards.

It is the responsibility of IIF to provide sustainable financing with a balanced approach towards the economic benefits of the project and its social and environmental management. IIF adheres to the development principle that gives precedence to the triple bottom line concept consisting of the 3Ps (People, Planet, and Profit). These principles are outlined through a financing mechanism that is integrated with the application of the Social and Environmental (S&E) Principles. IIF is committed to ensuring that S&E principles are met in each of the infrastructure projects it is financing.

IIF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL PRINCIPLES

The S&E principle is the standard that IIF applies to ensure that the client manages and reduces the impact and risk of social and environmental issues that may arise from their infrastructure projects. By applying S&E principles according to international standards, the hope is that all infrastructure projects will pay heed to social and environmental aspects, instead of just laying the focus on physical development alone, thus the projects can improve the quality of life of the community and preserve the environment around the project site.



Sebagai panduan operasional, IIF telah menyusun Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan (SEMS), yang berfungsi untuk memastikan agar semua pihak mengikuti kaidah-kaidah dalam penerapan 8 Prinsip S&E. SEMS tersebut dikelola di bawah tanggung jawab Divisi Sosial dan Lingkungan (*Social and Environmental Division* – SED) yang terdiri dari para ahli dan praktisi yang kompeten dalam pengelolaan sosial dan lingkungan. Tim SED akan memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh IIF dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Operasi dan SEMS Perseroan.

Prinsip S&E tersebut juga menegaskan peran IIF dalam menjaga dan meningkatkan kualitas sosial dan lingkungan sesuai dengan prinsip keberlanjutan IIF. Prinsip keberlanjutan IIF merupakan gabungan dari praktik-praktik dan standar internasional yang dapat membuat para investor asing yang akan bekerjasama atau berinvestasi pada Perseroan merasa aman karena semua proyek IIF telah memenuhi standar sosial dan lingkungan bertaraf internasional.

Bersama dengan klien, IIF berusaha mencari solusi yang realistis untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam rangka memastikan peningkatan kinerja sosial dan lingkungan proyek. IIF menawarkan asistensi dan rekomendasi mitigasi atas risiko S&E yang diidentifikasi serta membangun komunikasi yang baik dengan klien untuk memastikan bahwa Prinsip S&E untuk mencapai pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan dengan baik.

As an operational manual, IIF has developed the Social and Environmental Management System (SEMS), which functions to ensure that all parties adhere to the standards of implementing the 8 S&E Principles. The SEMS is managed under the responsibility of the Social and Environmental Division (SED), which is a team of experts and practitioners with proven competency in social and environmental management. The SED team will ensure that all infrastructure projects financed by IIF are carried out in accordance with the Company's Operations Manual and SEMS.

The S&E principles also reaffirm IIF's role in maintaining and improving social and environmental quality in accordance with IIF's sustainability principles. IIF's sustainability principle is a combination of international standards and practices that will make foreign investors who will work with the Company feel more secure since all of IIF's projects comply with international social and environmental standards.

Working closely with the clients, IIF seeks to find realistic solutions to overcome potential obstacles and ensure that the social and environmental performance of the project is improved. IIF offers assistance and recommendations for mitigating the identified S&E risks while establishing effective communication with the clients to ensure that the S&E Principle to achieve sustainable development has been implemented properly.

Manfaat Penerapan Prinsip Sosial dan Lingkungan bagi Klien

Benefits of Applying Social and Environmental Principles for Clients

Dengan adanya SEMS yang diwajibkan IIF untuk diterapkan oleh klien dalam pembangunan proyek infrastruktur, hal ini diharapkan dapat membantu klien dalam:

- Mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko terkait aspek sosial dan lingkungan sepanjang siklus bisnisnya
- Membangun hubungan yang baik dengan masyarakat terdampak maupun masyarakat sekitar proyek (*Project footprint*)
- Meminimalkan potensi dampak negatif pada lingkungan
- Meningkatkan reputasi klien dan membantu memperkuat dukungan dan penerimaan dari publik

IIF hopes that with SEMS in place and made mandatory for all of its clients to implement in infrastructure development, the Company can assist the clients in:

- Identifying and mitigating risks related to social and environmental aspects throughout the business cycle
- Building healthy relationships with affected people and other communities who reside near the project (*Project footprint*)
- Minimizing the potential negative impacts on the environment
- Improving the client's reputation and helping to strengthen public support and acceptance

PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN (RAKB)

Dalam menyusun RAKB, Perseroan merujuk pada dasar hukum terkait dengan keuangan berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut:

- Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
- Perjanjian Pemegang Saham Perseroan sebagaimana telah terakhir kali dinyatakan pada *Fourth Amendment and Restatement of Shareholders Agreement* tanggal 10 April 2018;
- Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terakhir kali diubah melalui Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali No. 43 tanggal 24 Juli 2018
- Dalam proses penyusunan RAKB, Perseroan juga merujuk kepada Dokumen Lampiran I terkait dengan Pedoman Petunjuk Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Seperti yang tercantum dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, IIF berada dalam kategori Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang memiliki kewajiban untuk menerapkan Aksi Keuangan Berkelanjutan (AKB) mulai tanggal 1 Januari 2020.

Pada tahun 2021, IIF membentuk *Sustainable Finance Working Group* (SFWG) yang terdiri atas koordinator, sekretaris, dan anggota dari beberapa divisi terkait yang terlibat dalam keuangan berkelanjutan. Pembentukan SFWG tersebut diharapkan dapat membantu proses penyusunan RAKB, penerapan aksi keuangan berkelanjutan, serta tersedianya pelaporan yang memadai setiap tahunnya. Proses penyusunan RAKB IIF untuk tahun 2022 dilakukan oleh SFWG dengan memastikan adanya peran serta dari berbagai pihak yang terkait, yaitu Direksi, *Legal & Corporate Secretary*, *Social and Environmental Division* (SED), *Corporate Planning Division*, *Finance and Treasury Division*, Direktorat Manajemen Risiko, Divisi Operasional, Departemen Sumber Daya Manusia, dan Direktorat Investasi. Seluruh proses penyusunan RAKB IIF dilakukan secara internal.

DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE FINANCE ACTION PLAN (RAKB)

In preparing the sustainable finance action plan, the Company refers to the legal basis related to sustainable finance, with the following details:

- Presidential Regulation No. 59 of 2017 concerning the Implementation of the Achievement of the Sustainable Development Goals;
- OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies;
- The Company's Shareholders Agreement as last stated in the Fourth Amendment and Restatement of Shareholders Agreement dated April 10, 2018;
- The Company's Articles of Association as last amended through the Deed of Amendment and Restatement No. 43 dated July 24, 2018
- In the process of preparing the RAKB, the Company also refers to Attachment I Documents related to the POJK Technical Guidelines No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies.

As stated in POJK No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies, IIF shall from January 1, 2020 run operations under the category of Infrastructure Financing Companies that have the obligation to implement Sustainable Finance Actions (AKB).

In 2021, IIF formed a Sustainable Finance Working Group (SFWG) consisting of coordinators, secretaries, and members from several related divisions involved in sustainable finance. The SFWG has been established to assist the Company in preparing the RAKB, implementing sustainable financial actions, and providing adequate reporting every year. The SFWG has prepared the 2022 IIF RAKB by ensuring the participation of various related parties, namely the Board of Directors, Legal & Corporate Secretary, Social and Environmental Division (SED), Corporate Planning Division, Finance and Treasury Division, Risk Management Directorate, Operational Division, Human Resources Department, and Investment Directorate. The entire process of preparing IIF's RAKB took place internally.

ROADMAP RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Perseroan melakukan klasifikasi RAKB dalam empat tahapan untuk periode 2019-2024, di mana tahun 2021 merupakan tahapan ketiga dari *Roadmap* program AKB. Adapun *Roadmap* dari program AKB adalah sebagai berikut:

SUSTAINABLE FINANCE ACTION PLAN ROADMAP

The Company classifies the RAKB into four stages for the 2019-2024 period, with 2021 being the third stage of the Roadmap for the AKB program. The following chart describes the Roadmap for the sustainable finance action program:



TARGET DAN REALISASI AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Target Jangka Pendek 1 Tahun di 2021

One-year Target for fiscal 2021

Target Target	Realisasi di Tahun 2021 Realization in 2021
- Meningkatkan portofolio investasi pada proyek infrastruktur - Secara berkelanjutan melakukan diversifikasi portofolio pada sektor-sektor baru (di antaranya infrastruktur sosial). - Broadening investment portfolio in infrastructure projects - Sustainably diversifying the portfolio into new sectors (including social infrastructure).	- IIF telah meningkatkan portofolio investasi dengan total 17 proyek baru. - IIF telah mengembangkan pembiayaan pada dua sektor baru yaitu <i>Railway & Mass Transport</i> di Sulawesi Selatan dan Fasilitas Kesehatan di Banten dan Jawa Barat. - IIF has broadened its investment portfolio with the acquisitions of 17 new projects. - IIF has developed financing for two new sectors, namely Railway & Mass Transport in South Sulawesi and Health Facilities in Banten and West Java.
Fokus pada pemberian pembiayaan yang bernilai tambah tinggi serta mempromosikan peran Perseroan sebagai katalis dan <i>enabler</i> (<i>junior financing</i>, PPP, dan <i>project finance</i>). Focusing on providing high value-added financing while promoting the Company's role as a catalyst and enabler (junior financing, PPP, and project finance).	- Bertindak sebagai <i>Mandated Lead Arranger</i> dalam pemberian fasilitas pinjaman sindikasi <i>senior term loan</i> untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum Pekanbaru yang diberikan melalui skema KPBU. - Memberikan fasilitas pinjaman sindikasi untuk pembangunan dan pengembangan jalur Kereta Api Makassar – Parepare yang diberikan melalui skema KPBU. - Acted as the Mandated Lead Arranger for the syndicated senior term loan facility for the Pekanbaru Drinking Water Supply System project which is delivered under the PPP scheme. - Provided syndicated loan facilities for the construction and development of Makassar – Parepare railway line which is delivered under the PPP scheme.
Mengembangkan dan meningkatkan produk dan jasa <i>fee-based</i> (<i>non-funded</i>) Develop and improve fee-based (non-funded) products and services	- Menyediakan fasilitas <i>Non-Cash Loan</i> untuk pembangunan dan pengoperasian proyek kilang kondensat skala mini. - Menyediakan fasilitas <i>Non-Cash Loan</i> untuk kontraktor EPC proyek minyak dan gas - Menyediakan fasilitas <i>Non-Cash Loan</i> untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta untuk proyek energi terbarukan (PLTS). - Provided Non-Cash Loan facility for construction and operation of the mini-scale condensate refinery project. - Provided Non-Cash Loan facility for EPC contractor of oil and gas projects - Provided Non-Cash Loan facility for developing telecommunication infrastructure in the foremost, outermost, and disadvantaged locations and for the renewable energy (i.e. Solar Power Plant) project.
Meningkatkan peran Perseroan sebagai <i>Advisor</i>, dengan menghasilkan komposisi yang seimbang antara kontribusi terhadap klien sektor publik dan sektor swasta dan dengan berperan aktif dalam seminar-seminar. Playing a bigger role as an Advisor, by producing a balanced composition between the contributions to clients from the public and private sectors and by actively participating in relevant seminars.	- IIF telah memperoleh mandat-mandat baru yang lebih seimbang dari klien sektor swasta (4 proyek) dan klien sektor publik (3 proyek). - Penyelenggaraan rangkaian webinar bertajuk Partisipasi IIF dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia. - Penyelenggaraan rangkaian webinar bertajuk Instrumen Keuangan Inovatif untuk Pembiayaan Infrastruktur. - Advisory Group has obtained a more balanced mandates from both private sector clients (4 projects) and public sector clients (3 projects). - Held a webinar series on IIF's Participation in Sustainable Infrastructure Development in Indonesia. - Held a webinar series on Innovative Financial Instrument for Infrastructure Financing.
Peningkatan kinerja keuangan melalui optimalisasi manajemen portofolio <i>Treasury</i>, optimalisasi struktur permodalan, secara aktif mencari sumber pendanaan yang atraktif, dan mempertahankan efisiensi operasional melalui manajemen biaya aktif. Delivering stronger financial results by optimizing Treasury portfolio management, optimizing capital structure, actively seeking attractive funding sources, and maintaining operational efficiency through active cost management.	Penerbitan Obligasi Berkelanjutan senior tanpa jaminan dengan tenor 5 tahun senilai US\$150 juta (<i>the "Notes"</i>) yang terdaftar di Bursa Efek Singapura (SGX). Obligasi tersebut memiliki peringkat BBB (stabil) oleh Fitch Rating, atau setara dengan peringkat yang diberikan kepada negara Republik Indonesia. The issuance of US\$150 million 5-year senior unsecured Sustainability Bond (the "Notes") listed on the Singapore Stock Exchange (SGX). The notes are rated BBB (stable) by Fitch Rating, on par with the Republic of Indonesia sovereign rating.
Peningkatan manajemen risiko dengan meningkatkan sistem peringatan dini, memperkuat <i>credit due diligence</i>, dan <i>post approval monitoring</i>. Improving risk management by enhancing the early warning system, strengthening credit due diligence, and post-approval monitoring.	- IIF telah menyiapkan kerangka kerja untuk <i>Risk Control Self-Assessment</i> (RCSA) dan mulai melakukan RCSA untuk unit bisnis dan fungsional utama. - IIF telah mengembangkan sistem <i>compliance checklist</i> dengan menyertakan akuntabilitas pembagian tugas antara <i>maker</i> dan <i>checker</i> yang lebih jelas. - IIF has prepared a framework for Risk Control Self-Assessment (RCSA) and has started conducting RCSAs for key business and functional units. - IIF has developed a compliance checklist system that includes clearer lines of accountability and tasks between makers and checkers.

Target Target	Realisasi di Tahun 2021 Realization in 2021
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan kompetensi atas produk investasi ekuitas dan produk investasi ekuitas sejenis (<i>equity-like investment</i>), sosialisasi budaya perusahaan, dan pengembangan sistem informasi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Improving human resource capabilities by giving more knowledge and increasing competence on equity investment products and equity-like investment products, socializing corporate culture, and developing information systems to support work efficiency and effectiveness.	IIF telah berhasil memindahkan seluruh perangkat keras lingkungan produksi beserta dengan Pusat Pemulihan Bencana (<i>Disaster Recovery Center</i> - DRC) ke fasilitas Pusat Data yang dikelola secara profesional oleh Pihak Ketiga untuk mendukung pengembangan dan efisiensi sistem informasi. IIF has successfully relocated all production environment hardware along with a Disaster Recovery Center (DRC) to a Data Center facility which is professionally managed by a Third Party to develop a more efficient information system.
Memperkuat sinergi lintas direktorat untuk mendukung strategi Perseroan. Strengthening inter-directorate synergies to support the Company's strategy.	• Kerja sama antara Advisory dengan Direktorat Investasi dalam memperoleh dan melaksanakan mandat-mandat baru di proyek pengolahan sampah, jalan tol, dan pelabuhan laut. • Kerja sama Advisory dan Divisi S&E dalam memberikan konsultasi kepada Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan <i>Project Development Facility</i> (PDF) untuk proyek-proyek KPBU. • Collaboration between Advisory and Investment Directorate in obtaining and executing new mandates in waste management, toll roads, and sea port projects. • Collaboration between Advisory and S&E Division in providing consultation related to the implementation of Project Development Facility (PDF) for PPP projects.

Target Jangka Panjang 5 Tahun 5-year Long Term Target

Target	Target
• Memanfaatkan penerapan 8 Prinsip S&E sebagai <i>Social & Environmental (S&E) Standards</i> dalam setiap proyek yang dibiayai oleh Perseroan (misalnya melalui penawaran diskon bunga bagi proyek yang berhasil menurunkan risikonya melalui penerapan <i>S&E Corrective Action Plan (CAP)</i>), serta mendorong penerapan <i>S&E Standards</i> secara nasional melalui komunikasi dengan regulator. • Peningkatan kinerja Perseroan secara menyeluruh (<i>end-to-end improvement</i>), dengan menerapkan optimalisasi sistem teknologi informasi, proses pengadaan, dan <i>deal closing process</i> dengan melibatkan seluruh unit bisnis terkait. • Penawaran jenis pembiayaan yang lebih beragam melalui inovasi pada sektor dan produk baru, dengan tujuan untuk memberikan variasi dan fleksibilitas kepada klien dan mengoptimalkan margin. • Efisiensi <i>cost of fund</i>, dengan cara berkolaborasi dengan Pemegang Saham untuk mendapatkan struktur skema pendanaan yang lebih ekonomis; berkolaborasi dengan Lembaga Keuangan Non-Bank untuk memperoleh alternatif sumber pendanaan; secara selektif melakukan pembayaran dipercepat atas pendanaan yang berbiaya tinggi; optimalisasi produk <i>capital market</i> sebagai alternatif sumber pendanaan. • Keselarasan kemampuan tenaga kerja, melalui peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga kerja, pemilihan sumber tenaga kerja yang tepat guna sesuai dengan tugas pokoknya (<i>talent pool management</i>), dan implementasi pengukuran kinerja dan <i>reward system</i> yang sesuai dengan tugas dan jabatannya. • Peningkatan <i>yield</i>, melalui pengembangan kemampuan dan diversifikasi jasa konsultasi (termasuk kolaborasi dengan Direktorat Investasi) serta <i>Asset Recycling</i>, untuk mendapatkan sumber pendanaan baru melalui sekuritisasi aset-aset pembiayaan Perseroan, untuk dialokasikan ke proyek-proyek dengan imbal hasil yang lebih tinggi.	• To utilize the application of the 8 Principles of S&E as Social & Environmental (S&E) Standards in every project financed by the Company (e.g. through offering discounted interest for projects that successfully reduce their risk through the implementation of the S&E Corrective Action Plan (CAP)), as well as encouraging the application of S&E Standards nationally through communication with regulators. • To improve the Company's overall performance (end-to-end improvement), by optimizing information technology systems, procurement processes, and deal closing processes by involving all related business units. • To offer more diverse types of financing through innovation in new sectors and products, with the aim of providing variety and flexibility to clients while optimizing margins. • Cost of fund efficiency, by collaborating with Shareholders to obtain a more economical funding scheme structure; collaborating with Non-Bank Financial Institutions to obtain alternative sources of funding; selectively settling payments for high-cost funding; optimizing capital market products as an alternative source of funding. • Alignment of workforce capabilities, through increasing the ability and expertise of the workforce, selecting appropriate manpower sources in accordance with their main tasks (talent pool management), and implementing performance measurement and reward systems in accordance with their duties and positions. • Yield increase, through capacity development and diversification of consultancy services (including collaboration with the Investment Directorate) and Asset Recycling, to obtain new funding sources through the securitization of the Company's financing assets, which will be allocated to projects with higher yields.

KONTRIBUSI IIF TERHADAP PENCAPAIAN SDGS DI TINGKAT PORTOFOLIO DI TAHUN 2021

IIF'S CONTRIBUTION TO THE SDGS ACHIEVEMENT AT THE PORTFOLIO LEVEL IN 2021

SDGs	Target Target	Indikator Indicator	Kontribusi di Portofolio IIF Contribution Under IIF Portfolio
	Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. The number of households with access to adequate and sustainable drinking water sources	Lebih dari 1,32 juta rumah tangga mendapatkan akses terhadap layanan sumber air minum dari 8 proyek Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibiayai oleh IIF. More than 1.32 million households have access to water supply services from 8 Water Supply Facility (SPAM) projects financed by IIF.
	Goal 1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, new technologies, and appropriate financial services, including microfinance.	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber penerangan dan listrik. The number of households with access to lighting sources and electricity.	Sekitar 570.650 rumah tangga mendapatkan pasokan listrik dari beberapa proyek ketenagalistrikan yang dibiayai oleh IIF di 2021. Around 570,650 households have access to electricity from several electricity projects financed by IIF in 2021.
	Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (termasuk kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum)	Di tahun 2021, IIF membiayai ekspansi gedung Rumah Sakit di Tangerang dan Bekasi dan meningkatkan kapasitasnya hingga 119 tempat tidur. Rumah Sakit tersebut merupakan rumah sakit umum yang turut menerima pasien BPJS.
	Goal 3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to good basic health services, and access to safe, effective, quality, and affordable basic medicines and vaccines for all.	Coverage of essential health services (including service capacity and access for the general population).	In 2021, IIF provided financing for the expansion of hospital buildings in Tangerang and Bekasi and increased the bed capacity to 119. The hospitals are general hospitals that also accept BPJS patients.
	Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	Peningkatan fasilitas sekolah dengan akses ke (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi, dan higienitas (WASH) bagi semua).	Di tahun 2021, IIF membiayai proyek pembangunan menara 4G Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di 271 distrik dan 17 kabupaten/kota di Papua Barat. Penyediaan internet 4G ini dapat membantu menunjang kegiatan belajar mengajar, utamanya pada masa pandemi saat ini dimana program pendidikan jarak jauh menjadi tantangan karena akses internet yang kurang memadai di Papua Barat.
	Goal 4.a Build and improve educational facilities that are child-friendly, disabled-friendly, and gender-friendly, and provide a safe, non-violent, inclusive, and effective learning environment for all.	Improvement of school facilities with access to (a) electricity (b) internet for teaching purposes, (c) computers for teaching purposes, (d) adequate infrastructure and materials for students with disabilities, (e) proper drinking water, (f) sanitation facilities basis per gender, (g) handwashing facilities (consisting of water, sanitation, and hygiene (WASH) for all).	In 2021, IIF provided financing for the construction of 4G Base Transceiver Station (BTS) towers spread across 271 districts and 17 districts/cities in West Papua. The provision of 4G internet can help support teaching and learning activities, especially during the current pandemic where remote education is still a predominant challenge due to poor internet access in West Papua.

SDGs	Target Target	Indikator Indicator	Kontribusi di Portfolio IIF Contribution Under IIF Portfolio
	Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Kebijakan yang <i>responsive gender</i> dan mendukung pemberdayaan perempuan.	Melalui penerapan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai tidak melaksanakan praktik diskriminasi terhadap kaum perempuan serta mendukung pemberdayaan perempuan.
	Goal 5.1 End all forms of discrimination against women everywhere.	Policies that are gender-responsive and support women's empowerment.	Through the application of its Social and Environmental Principles, IIF ensures at all occasions that the projects financed do not apply discriminatory practices against women and support women's empowerment.
	Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Proyek penyediaan air minum yang dibiayai oleh IIF berkontribusi terhadap pencapaian sekitar 15% dari target akses terhadap layanan sumber air minum yang layak.
	Goal 6.1. By 2030, everyone will have equitable access to safe and affordable drinking water.	Percentage of households that have access to proper drinking water sources.	The drinking water supply project financed by IIF has contributed to the achievement of around 15% of the target of access to adequate drinking water sources.
		Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan, dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Total kapasitas proyek Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibiayai oleh IIF adalah sekitar 21.525 Liter/detik.
		The capacity of raw water infrastructure to serve households, cities, and industries, and the provision of raw water for inhabited islands.	The total capacity of the Drinking Water Supply Facility project financed by IIF is around 21,525 Liters/second.
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Proyek penyediaan air minum yang dibiayai oleh IIF berkontribusi terhadap pencapaian sekitar 2% dari proporsi populasi yang ditargetkan untuk mendapatkan akses layanan sumber air minum yang aman.
		The proportion of the population that has access to safe and sustainable drinking water sources.	The drinking water supply project financed by IIF has contributed to approximately 2% of the targeted population proportion with access to safe drinking water.
	Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik. (Kualitas air sungai sebagai sumber air baku)	Sejalan dengan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai turut menjaga, memantau, dan mengelola kualitas air yang digunakan ataupun berada di sekitar lokasi proyek.
	Goal 6.3. By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating waste and minimizing the release of hazardous materials and chemicals, halving the proportion of untreated wastewater, and significantly increasing the recycling and safe reuse of recyclables globally.	The proportion of water bodies with good ambient water quality. (Quality of river water as raw water source)	In line with the Social and Environmental Principles, IIF ensures at all occasions that the projects financed help maintain, monitor, and manage the quality of the water used or in the vicinity of the project site.
	Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	Salah satu proyek pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum yang dibiayai oleh IIF di Pekanbaru menargetkan perbaikan pada <i>Non-Revenue Water (NRW)</i> atau mengurangi angka kehilangan air hingga 57% setelah dilakukannya rehabilitasi terhadap instalasi pengolahan air tersebut.
	Goal 6.4. By 2030, significantly increase the efficiency of water use in all sectors, and ensure the sustainable use and supply of freshwater to address water scarcity, and significantly reduce the number of people suffering from water scarcity.	Improved water use efficiency from time to time.	One of the drinking water supply projects financed by IIF in Pekanbaru is targeting improvements to Non-Revenue Water (NRW) or reducing water loss by up to 57% after the rehabilitation of the region's drinking water supply system.

SDGs	Target Target	Indikator Indicator	Kontribusi di Portfolio IIF Contribution Under IIF Portfolio
	Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	Jumlah listrik yang telah dan akan dihasilkan dari proyek Energi Terbarukan IIF	Total energi listrik yang telah dan akan dihasilkan dari proyek-proyek Energi Terbarukan yang dibiayai oleh IIF di 2021 adalah sekitar 938,8 MW.
	Goal 7.1 By 2030, ensure universal access to affordable, reliable, and modern energy services.	The amount of electricity that has been and will be generated by the Renewable Energy project financed by IIF	The total electricity that has been and will be generated by the Renewable Energy projects financed by IIF in 2021 is around 938,8 MW.
		Proporsi penduduk yang mendapatkan akses ke energi listrik yang dihasilkan dari seluruh proyek IIF	Lebih dari 2,85 juta penduduk mendapatkan pasokan listrik dari beberapa proyek ketenagalistrikan yang dibiayai oleh IIF di 2021.
		The proportion of the population that will have access to electricity generated from IIF projects	More than 2.85 million residents have access to electricity from several electricity projects financed by IIF in 2021.
	Target 8.7. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	Mengakhiri kerja paksa dan tenaga kerja anak.	Sesuai dengan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai tidak melakukan praktik kerja paksa ataupun mempekerjakan tenaga kerja anak dengan memastikan tersedianya kebijakan terkait hal tersebut.
	Goal 8.7. Take quick action to eradicate forced labor, end human slavery and trafficking, secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labor, including the recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labor in all of its forms.	End forced and child labor.	In accordance with the Social and Environmental Principles, IIF ensures at all occasions that the projects financed do not practice forced labor or employ child labor by ensuring the availability of policies related to this aspect.
	Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	Penerapan norma K3.	Melalui penerapan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai memperhatikan dan menerapkan manajemen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
	Goal 8.8 Protect labor rights and promote a safe and secure working environment for all workers, including migrant workers, in particular women migrant workers, and workers assigned to hazardous work.	The implementation of OHS norms	Through the application of its Social and Environmental Principles, IIF ensures at all occasions that the projects financed pay attention to and implement the occupational health and safety (OHS) management.
		Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	Sesuai dengan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF juga memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai memperhatikan dan meningkatkan kepatuhan atas hak-hak pekerja, termasuk kebebasan untuk membentuk serikat pekerja.
		Enhanced compliance on workers' rights (freedom of association and collective bargaining) based on ILO textual sources and relevant country laws and regulations.	In accordance with the applied Social and Environmental Principles, IIF also ensures at all occasions that the projects financed pay attention to and improve compliance on workers' rights, including the freedom to form workers' unions.

SDGs	Target Target	Indikator Indicator	Kontribusi di Portfolio IIF Contribution Under IIF Portfolio
	Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Goal 9.1 Develop good-quality, reliable, sustainable, and resilient infrastructure, including regional and cross-border infrastructure, to support economic development and improve welfare with a focus on affordable and equitable access for all.	Panjang pembangunan jalan tol.	Total panjang proyek jalan tol yang dibiayai IIF di tahun 2021 adalah sekitar 368,71 km.
		Length of the constructed toll road.	The total length of the toll road project financed by IIF in 2021 has reached about 368.71 km.
		Panjang jalur kereta api.	Di tahun 2021, IIF membiayai proyek pembangunan <i>Garongkong Siding Track</i> sepanjang 4,75 km yang merupakan bagian dari Jalur Kereta Api Makassar – Parepare sepanjang 142 km yang merupakan bagian dari fase 1 dari Jaringan Kereta Api Trans Sulawesi.
		Length of the constructed railroad.	In 2021, IIF provided financing for the construction of 4.75 km Garongkong Siding Track as part of the Makassar – Parepare Railway with a total length of 142 km which is part of phase 1 of the Trans Sulawesi Railway Network.
		Jumlah bandara.	Jumlah bandara yang dibiayai IIF adalah sebanyak 6 bandara yang berlokasi di Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Selain itu IIF juga membiayai pembangunan fasilitas hanggar baru di salah satu Bandara tersebut yang berfungsi untuk fasilitas pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan domestik.
		Number of airports	IIF has financed 6 airports located in Banten, Central Java, Yogyakarta, East Java, South Sulawesi, and South Kalimantan. In addition, IIF also financed the construction of a new hangar facility at one of the airports which function for maintenance, repair, and domestic inspection facilities.
	Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan, dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan, dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. Goal 10.3 Ensure equal opportunity and reduce income gaps, including eliminating discriminatory laws, policies, and practices, and promoting appropriate legislation, policies, and actions related to such legislation and policies.	Pelaporan terkait diskriminasi atau pelecehan sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.	Melalui penerapan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai memiliki mekanisme pelaporan keluhan dari pekerja maupun masyarakat, termasuk pelaporan terkait dengan diskriminasi atau pelecehan.
		Report received on discrimination or harassment under international human rights law.	Through the application of its Social and Environmental Principles, IIF ensures at every opportunity that the projects financed have a mechanism for reporting complaints from workers and the community, including reporting related to discrimination or harassment.
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Sesuai dengan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai menyediakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
		The proportion of participants in the Social Security Program in the Employment Sector.	In accordance with the Social and Environmental Principles, IIF ensures at all occasions that the projects financed provide the Employment Social Security program.
	Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. Goal 11.4 Promote and preserve world cultural heritage and world natural heritage.	Upaya preservasi, perlindungan, dan konservasi pada semua warisan budaya dan alam	Sejalan dengan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai memperhatikan dan menjaga semua warisan
		Preservation, protection, and conservation efforts of all cultural and natural heritage	In line with the Social and Environmental Principles, IIF ensures at all occasions that the projects financed pay attention to and safeguard all cultural and natural heritage that may be affected by the project.

SDGs	Target Target	Indikator Indicator	Kontribusi di Portfolio IIF Contribution Under IIF Portfolio
	Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati, dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia berbahaya dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Goal 12.4 By 2020 achieve the environmentally sound management of chemicals and all types of waste in the entire life cycle, according to agreed international frameworks, and significantly reduce the pollution of these hazardous chemicals and their wastes to the air, water, and soil to minimize adverse impacts on human health and the environment.	Pengelolaan limbah B3 yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangan. The management of hazardous waste is carried out in accordance with regulatory provisions.	Melalui penerapan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai melakukan pengelolaan terhadap material dan limbah B3 yang digunakan dan dihasilkan dari proyek sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Through the application of its Social and Environmental Principles, IIF ensures at all occasions that the projects financed manage the hazardous materials and waste produced by the projects in accordance with all regulatory provisions.
	Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. Goal 13.2 Integrate anticipatory actions on climate change into national policies, strategies, and plans.	Tersedianya pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Availability of reporting on the reduction of greenhouse gas (GHG) emissions.	Sejalan dengan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai mulai melakukan perhitungan terhadap emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. IIF juga menyediakan <i>tools</i> untuk membantu proyek menghitung GRK yang dihasilkan. Melalui pembiayaan terhadap proyek-proyek Energi Terbarukan, IIF membantu mengurangi lebih dari 3,49 juta ton CO₂eq potensi emisi GRK. In line with the Social and Environmental Principles, IIF ensures at all occasions that the projects financed begin to calculate the greenhouse gas emissions that they produced. IIF also provides tools to help projects calculate the GHGs of the project. By financing the Renewable Energy projects, IIF helps reduce more than 3.49 million ton CO₂eq of potential GHG emissions.
	Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. Goal 15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local planning, development processes, strategies, and budgeting for poverty reduction.	Tersedianya rencana pengelolaan keanekaragaman hayati. Availability of biodiversity management plan.	Melalui penerapan Prinsip Sosial dan Lingkungan yang dimiliki, IIF memastikan pada setiap kesempatan agar proyek-proyek yang dibiayai yang berlokasi di area-area yang berpotensi memiliki keanekaragaman hayati dan habitat kritis melakukan penyusunan dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati dan mengimplementasikan pengelolaan tersebut. Through the application of its Social and Environmental Principles, IIF ensures at all occasions that financed projects located in areas of potential biodiversity and critical habitat prepare a biodiversity management plan document and execute the plan.

IKHTISAR KEBERLANJUTAN TAHUN 2021

2021 Sustainability Performance Highlights



ASPEK EKONOMI [B.1]

Economy Aspect

KINERJA PORTOFOLIO DAN PEMBIAYAAN

Portfolio Performance and Financing



Komitmen investasi Bersih
Investment Commitment (Net)

Rp17.079

(Rp miliar | Rp billion)



Aset Investasi
Investment Assets

Rp12.209

(Rp miliar | Rp billion)



Pendapatan
Revenues

Rp951

(Rp miliar | Rp billion)



Laba Bersih
Net Profit

Rp53

(Rp miliar | Rp billion)



Total Aset
Total Assets

Rp14.551

(Rp miliar | Rp billion)



Jumlah Proyek yang Dibiayai
Number of Projects Financed

57

KINERJA LAYANAN ADVISORY

Advisory Service Performance



Jumlah mandat aktif yang terkait keuangan berkelanjutan
Number of active mandates related to sustainable finance

13

(Proyek | Project)



Pendapatan dari mandat aktif yang terkait keuangan berkelanjutan
Revenue from active mandates related to sustainable finance

Rp8,86

(Rp miliar | Rp billion)



Proporsi pendapatan dari proyek terkait keuangan berkelanjutan
Proportion of revenue from projects related to sustainable finance

100%

KOMITMEN BERSIH PORTOFOLIO INVESTASI

Investment Portfolio Commitment (Net)



Jalan
Road

Rp2.491

(Rp miliar | Rp billion)



Telekomunikasi dan Informatika
Telecommunications and Informatics

Rp3.886

(Rp miliar | Rp billion)



Pelabuhan
Port

Rp417

(Rp miliar | Rp billion)



Kereta Api dan Transportasi Publik
Railway and Mass Transportation

Rp238

(Rp miliar | Rp billion)



Ketenagalistrikan
Electricity

Rp4.018

(Rp miliar | Rp billion)



Bandara
Airport

Rp1.185

(Rp miliar | Rp billion)



Infrastruktur Sosial
Social Infrastructure

Rp101

(Rp miliar | Rp billion)



Kawasan Industri
Industrial Estate

Rp477

(Rp miliar | Rp billion)



Air Minum
Drinking Water

Rp1.504

(Rp miliar | Rp billion)



Minyak dan Gas
Oil and Gas

Rp2.082

(Rp miliar | Rp billion)



Lainnya
Others

Rp680

(Rp miliar | Rp billion)



ASPEK LINGKUNGAN ^[B.2] Environmental Aspect

KONSUMSI ENERGI Energy Consumption



BBM
Fuel

15.625 **583**
(Liter | Litre) (GJ)



LISTRIK
Electricity

216.263 **779**
(kWh) (GJ)

TOTAL EMISI GRK YANG DIHASILKAN Total GHG Emissions Produced



BBM (CAKUPAN 1)
Fuel (Scope 1)

32,40
(ton CO₂-eq)



LISTRIK (CAKUPAN 2)
Electricity (Scope 2)

188,15
(ton CO₂-eq)

PENGURANGAN KONSUMSI ENERGI DAN EMISI Reducing Energy Consumption and Emissions

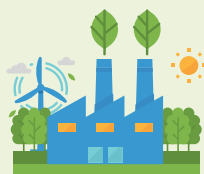
PENGHEMATAN ENERGI
Energy Saving

-16
(GJ)

PENGURANGAN EMISI
Emission Reduction

-1,84
(ton CO₂-eq)

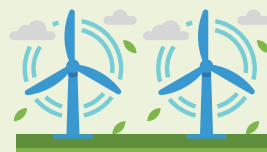
KONTRIBUSI PORTOFOLIO IIF IIF Portfolio Contribution



3,49

juta tonCO₂-eq | million ton CO₂-eq

Pengurangan emisi karbon yang setara dengan penyerapan CO₂ dari 122.948 pohon.
Carbon emission reduction equivalent to CO₂ absorption of 122,948 trees.



9,75%

Kontribusi terhadap total energi terbarukan yang terpasang di Indonesia.
Contribution of total renewable energy installed in Indonesia.



1,32

Juta Rumah Tangga
Million Households

Akses terhadap layanan sumber air minum
Access to drinking water source services



570.650

Rumah Tangga | Households

Akses terhadap listrik dari 14 proyek energi terbarukan
Access to electricity from 14 renewable energy projects



ASPEK SOSIAL [B.3]

Social Aspect

Jumlah Karyawan

Total Employees



60

(Karyawan | Employee)

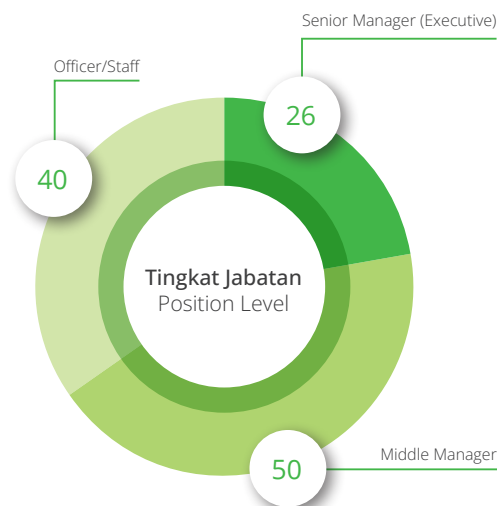
Laki-Laki
Male



56

(Karyawan | Employee)

Perempuan
Female



Jumlah Jam Pelatihan

Number of Training Hours



Rata-rata Jam Pelatihan

Average Hours of Training



Rata-rata Jam Pelatihan berdasarkan Tingkat Jabatan

Average Hours of Training based on Position Level

Keterangan Description	Jumlah Karyawan Number of Employees	Jumlah Jam Pelatihan Number of Training Hours	Rata-rata Jam Pelatihan Average Hours of Training
Tingkat Jabatan Position Level			
Senior Manager (Executive)	26	1.195	29,9
Middle Manager	50	2.090	41,8
Officer/Staff	40	3.271	125,8



Total Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan

Total Employee Competency Development Expenses

Rp905

(juta | million)



Total Biaya Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)

Total Cost of Environmental Social Responsibility (TJSL)

Rp456

(juta | million)



PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile



TENTANG IIF

About IIF



Nama Organisasi

Name of the Organization [102-1]

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

Status Organisasi

Organization Status

Perseroan Terbatas (PT),
Perusahaan Swasta
Private Company



Kegiatan, Merek, Produk, dan Jasa

Activities, Brands, Products, and Services

[C.4][102-2]

Kegiatan Usaha : Pembiayaan Infrastruktur
Produk : Produk Investasi (*fund-based* dan *non-fund-based*) dan Advisory

Business Activities : Infrastructure Financing
Products : Investment Products (*fund-based* and *non-fund-based*) and Advisory



Lokasi Kantor Pusat

Headquarters

[C.2][102-3]

Prosperity Tower 53rd-55th Floor
District 8, Sudirman Central Business District, Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
T : +62 21 50826600
F : +62 21 5082 6601
E : info@iif.co.id
www.iif.co.id



Wilayah Operasional

Area of Operations

[C.2][102-4][102-6]

Sampai bulan Desember 2021, IIF memiliki 57 proyek aktif yang dibiayai di 26 provinsi di Indonesia
As of December 2021, IIF has a total of 57 active portfolio projects in 26 provinces across Indonesia

Jumlah dan Nama Negara Tempat Beroperasi

Total Area and Name of Country of Operationss [102-4]

1 (satu), Indonesia
1 (one), Indonesia



Komposisi Kepemilikan Saham

Share Ownership Composition

[C.3][102-5]

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	30,00%
International Finance Corporation (IFC)	19,99%
Asian Development Bank (ADB)	19,99%
Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbh (DEG)	15,12%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	14,90%



Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No.100/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada PT Indonesia Infrastructure Finance
- Akta Pendirian No. 34 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., selaku pengganti Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21503. AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123.
- Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia (PMK) No. 100/2009 on Infrastructure Financing Companies.
- Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 dated August 6, 2010 on the Granting of Infrastructure Financing Company Business Permit to PT Indonesia Infrastructure Finance.
- Deed of Establishment No. 34 dated January 15, 2010, made before Aulia Taufani, S.H., substituting for Sutjipto S.H., Notary in Jakarta, and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree No. AH-U21503. AH.01.01.Tahun 2010 dated April 28, 2010, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated March 11, 2011, Supplement No. 5123.

VISI DAN MISI [C.1][102-16]

Vision and Mission



Visi Vision

Menjadi pelopor katalisator untuk pembiayaan pengembangan infrastruktur di Indonesia.

To become the leading catalyst for financing infrastructure development in Indonesia

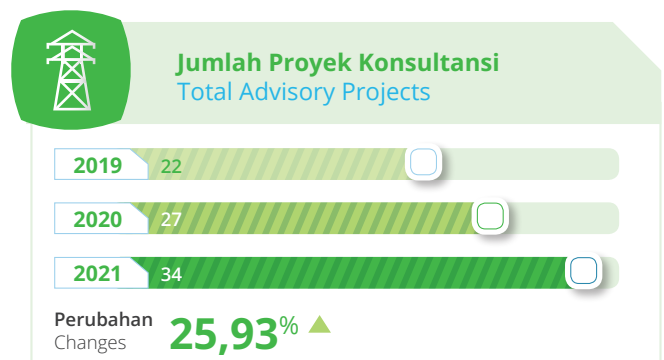
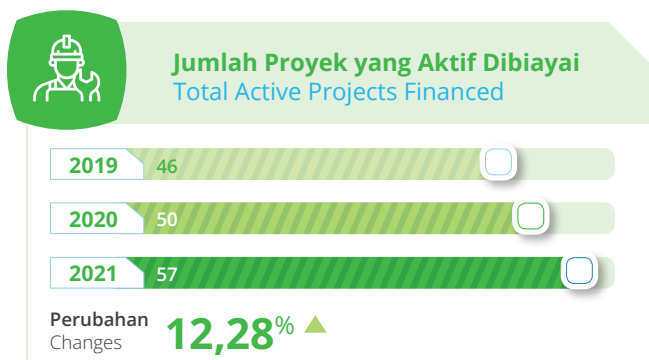
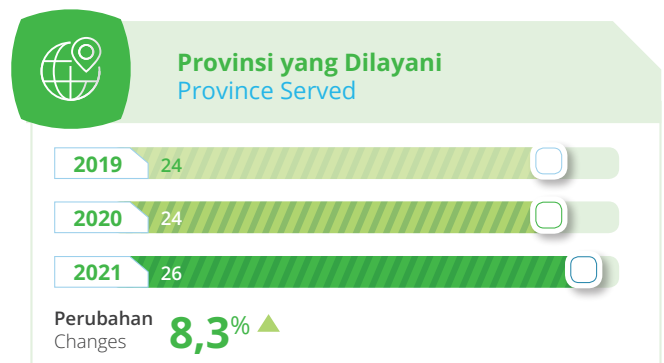
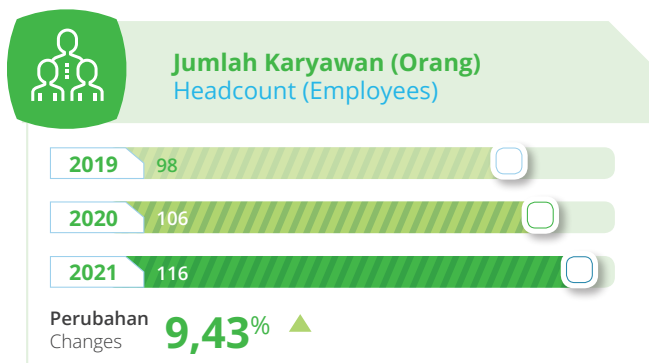
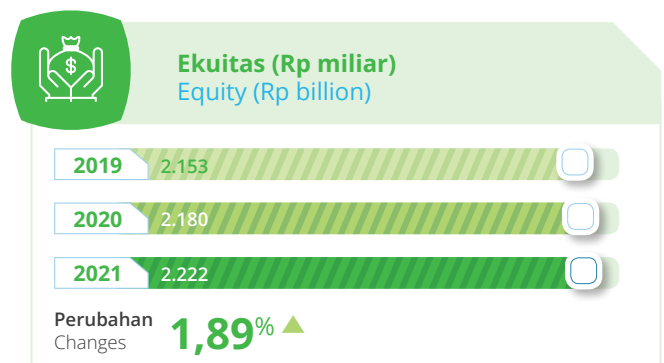
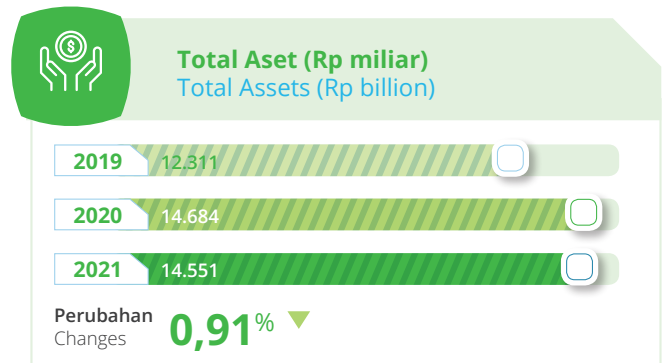
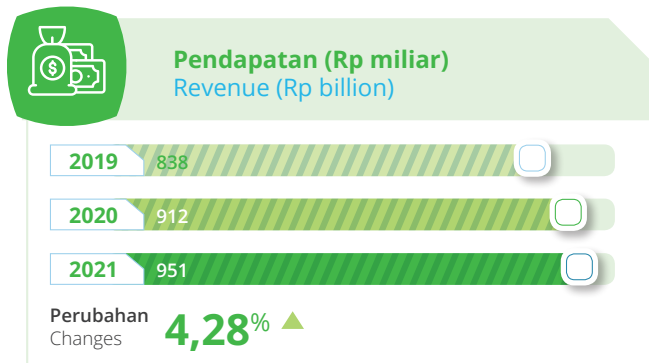
MISI Mission

- Menjamin tercerminnya kepentingan pelaku investasi di dalam struktur kontrak dan konsesi;
 - Mempelopori ketersediaan beragam instrumen pembiayaan yang tepat bagi proyek infrastruktur; dan
 - Menjadi mitra bagi lembaga keuangan dan lembaga investasi nasional lainnya dalam menyalurkan dana masyarakat ke dalam pembangunan infrastruktur jangka panjang di Indonesia.
-
- To ensure investors' needs are reflected in contractual structures and concessions;
 - To lead in offering a mix of financing instruments appropriate for infrastructure; and
 - To work with Indonesia's financial institutions and other institutional investors to channel the nation's savings into long-term development of Indonesia's infrastructure.



SKALA BISNIS [C.3][102-7]

Scale of Business



KEGIATAN USAHA [C.4][102-2]

Business Activities

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

IIF menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar yang terakhir kali diperbarui melalui Akta No. 43 tanggal 24 Juli 2018.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan di 2021

Pada tahun 2021, sesuai dengan Anggaran Dasar, IIF menyediakan produk pembiayaan berupa:

Produk Investasi

Fund-based

- Bentuk pinjaman antara lain: pinjaman senior, pinjaman subordinasi/*mezzanine finance*, *convertible* dan *hybrid securities* dan/atau pembiayaan ulang;
- Pembiayaan kegiatan lain yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur selama diperkenankan oleh peraturan; dan
- Investasi ekuitas.

Non-fund-based

Jaminan dalam bentuk antara lain: pemenuhan kewajiban keuangan, peningkatan kualitas kredit, dan/atau *take-out financing*.

JASA KONSULTASI

A. JASA UNTUK KLIEN SEKTOR PUBLIK

1. Jasa Konsultasi Transaksi

Jasa konsultasi transaksi untuk klien sektor publik, seperti kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN/ BUMD dalam proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan kontrak antara lembaga pemerintah yang berwenang dan pihak swasta, di mana pihak swasta menyediakan layanan publik dengan menanggung risiko finansial, operasional, dan teknis dalam proyek tersebut. Jenis proyek infrastruktur yang dapat diberikan jasa konsultan transaksi mencakup:

- a) Proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 38/2015; dan
- b) Proyek-proyek non-KPBU, antara lain proyek IPP di sektor pembangkit listrik atau proyek *Business to Business* (B2B) PDAM di sektor air minum.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON ARTICLES OF ASSOCIATION

IIF engages in financing infrastructure projects in Indonesia as stipulated in Article 3 of the Company's Articles of Association, which was last amended through Deed No. 43 dated July 24, 2018.

Business Activities Conducted in 2021

In 2021, in line with its Articles of Association, IIF provided the following financing products:

Investment Products

Fund-based

- Loans in the form of, among others, senior loans, subordinated loans/*mezzanine financing*, *convertible* and *hybrid securities*, and/or refinancing;
- Financing of other activities related to infrastructure projects under the prevailing laws and regulations; and
- Equity investment.

Non-fund-based

Guarantees in the form of stand-by financing guarantee, credit enhancement, and/or take-out financing.

ADVISORY SERVICE

A. SERVICES FOR PUBLIC SECTOR CLIENTS

1. Transaction Advisory Services

Transaction advisory services for public sector clients, such as ministries, regional governments, and state-owned/regional-owned enterprises, with regard to infrastructure projects involving contracts between government contracting authority and private parties, in which the private party provides a public service and assumes the financial, technical, and operational risks of the project. The types of infrastructure project to be provided with the transaction advisory services include:

- a) Public Private Partnership (PPP) projects as regulated under Presidential Regulation No. 38/2015; and
- b) Non-PPP projects, such as IPP projects in the power sector or PDAM Business to Business (B2B) projects in the drinking water sector.

Lingkup dari jasa konsultasi transaksi antara lain pelaksanaan uji tuntas dan perencanaan proyek, pelaksanaan konsultasi pasar, studi kelayakan, analisis dukungan pemerintah, penyiapan struktur komersial, negosiasi, pendampingan pelaksanaan proses tender/pengadaan, dan proses institusionalisasi dengan tujuan alokasi risiko yang optimal dan proyek yang *bankable*, di samping meningkatkan kualitas layanan yang dihasilkan proyek tersebut.

2. Jasa Konsultasi Kebijakan

Menyediakan jasa konsultasi kepada klien di sektor publik, seperti kementerian dan pemerintah daerah dalam memformulasikan kebijakan terkait proyek infrastruktur dan/atau peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan dan penyempurnaan pengadaan infrastruktur.

B. JASA UNTUK KLIEN SEKTOR SWASTA

1. Kajian Finansial dan Ekonomi

Menyediakan jasa kepada klien sektor swasta untuk mengevaluasi potensi dampak finansial dan ekonomi dari inisiatif pengembangan infrastruktur.

2. Jasa Konsultasi Keuangan

Menyediakan jasa konsultasi *project finance* dan *corporate finance* untuk klien di sektor swasta untuk memaksimalkan nilai pemegang saham (*shareholder value*). Terkait dengan *project finance*, IIF menyediakan jasa konsultasi dalam proyek KPBU, studi kelayakan, serta penyiapan proyek. Terkait dengan *corporate finance*, IIF dapat memberikan jasa penggalangan dana ekuitas dan/atau pinjaman, valuasi, transaksi *joint venture*, dan merger & akuisisi.

3. Jasa Konsultasi Transaksi

Menyediakan jasa konsultasi transaksi kepada klien sektor swasta untuk berpartisipasi pada pengadaan badan usaha pelaksana proyek infrastruktur.

The scope of the transaction advisory services may include pre-transaction due diligence and planning, market consultation, feasibility study, government support analysis, commercial structuring, negotiation, tender/procurement implementation process, and institutionalisation process aimed to ensure optimal risk allocation and bankability of the project as well as improving the quality of project outcome.

2. Policy Advisory Services

Advisory services to public sector clients, such as ministries and regional governments, in formulating infrastructure-related policies and/or increasing capacities for the purpose of accelerating and improving infrastructure procurement.

B. SERVICES FOR PRIVATE SECTOR CLIENTS

1. Financial and Economic Assessment

IIF provides services to private sector clients in order to evaluate the potential economic and financial impacts of infrastructure development initiatives.

2. Financial Advisory

Providing project finance and corporate finance advisory services to private sector clients to maximize shareholder value. With regard to project finance, IIF provides PPP tender support, feasibility studies, project preparation and structuring. With regard to corporate finance, IIF's advisory products are available for debt or equity fundraisings, valuations, joint ventures, as well as mergers and acquisitions.

3. Transaction Advisory

Providing transaction advisory for private client in order to participate in procurement of implementing business entity for infrastructure project.

SEKTOR PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

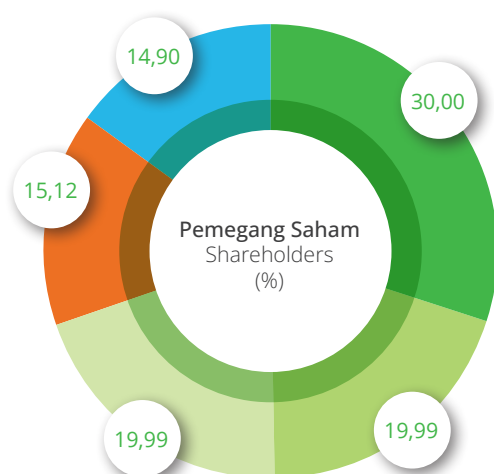
Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan infrastruktur, IIF memiliki sektor-sektor prioritas proyek infrastruktur sebagai target pembiayaannya. Sesuai dengan Pasal 5 PMK No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan, Surat OJK No. S-2/D.05/2018 dan POJK No. 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, objek pembiayaan infrastruktur meliputi infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah terpusat, sistem pengelolaan air limbah setempat, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, konservasi energi, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, kawasan, pariwisata, kesehatan, lembaga permasyarakatan, perumahan rakyat, bangunan negara, kawasan industri, distribusi pangan dan infrastruktur lain.

INFRASTRUCTURE FINANCING SECTOR

In conducting infrastructure financing activities, IIF has determined the priority sectors of infrastructure project as its financing target. Pursuant to the Article 5 of the Regulation of the Minister of Finance No. 100/PMK.010/2009 regarding Financing Companies OJK Letter No. S-2/D.05/2018 and POJK No. 46/POJK.05/2020 on Infrastructure Financing Companies, objects for infrastructure financing include transportation, roads, water and irrigation, drinking water, centralized wastewater management systems, localized wastewater management systems, waste and toxic waste, telecommunications and informatics, electricity, oil and gas and renewable energy, conservation energy, urban infrastructure facilities, education, research and development infrastructure, sports, arts and cultural infrastructure facility, district, tourism, healthcare, correctional, public housing, state owned building, industrial estate, food distribution and other infrastructure.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM [C.3][102-5]

Share Ownership Composition



Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares (Lembar Shares)	Nilai Nominal Nominal Amount (Rp)	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	600.000	600.000.000.000	30,00
International Finance Corporation (IFC)	399.800	399.800.000.000	19,99
Asian Development Bank (ADB)	399.800	399.800.000.000	19,99
Deutshce Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbh (DEG)	302.400	302.400.000.000	15,12
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	298.000	298.000.000.000	14,90
Total	2.000.000	2.000.000.000.000	100,00

PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA ORGANISASI [102-10]

Significant Changes to the Organization

Pada laporan tahun 2021 ini tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam Perusahaan baik dari segi ukuran, struktur kepemilikan, maupun rantai pasokan.

In this 2021 report there are no significant changes in the Company in terms of size, ownership structure, or supply chain.

KEANGGOTAAN ASOSIASI [C.5][102-12][102-13]

Association Membership

Hingga akhir tahun 2021, IIF merupakan anggota dari Masyarakat Telematika Indonesia.

Up to the end of 2021, IIF is a member of Masyarakat Telematika Indonesia (Indonesian Telematics Society).

IIF juga telah mengadopsi prinsip-prinsip *United Nations Framework Convention on Climate Change* dalam menerapkan kriteria pembiayaan proyeknya.

IIF has also adopted the principles of the *United Nations Framework Convention on Climate Change* for its project financing criteria.

WILAYAH PORTOFOLIO IIF [102-4][102-6]

IIF Portfolio Areas

➤ Hingga akhir Desember 2021, IIF memiliki 57 proyek yang aktif dibiayai dari berbagai sektor infrastruktur di 26 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.

As of December 2021, IIF has 57 active projects financed in various infrastructure sectors across 26 provinces of Indonesia.



Sektor Portofolio Portfolio Sector	Wilayah Portofolio Portfolio Areas	Sektor Portofolio Portfolio Sector	Wilayah Portofolio Portfolio Areas
 Ketenagalistrikan Electricity	Aceh • Riau • North Sumatera • West Sumatera • DKI Jakarta • West Java • East Java • Bali • Gorontalo • North Sulawesi • Central Sulawesi • South Sulawesi	 Kereta Api dan Transportasi Massal Railway and Mass Transport	South Sulawesi
 Bandar Udara Airport	Riau Islands • West Java • Banten • Central Java • East Java • Yogyakarta	 Telekomunikasi dan Informatika Telecommunications and Informatics	Java • Bali • Kalimantan • Sulawesi • Papua
 Kawasan Industri Industrial Estate	East Java	 Air Minum Drinking Water	• East Java • Lampung • Banten • DKI Jakarta • Riau
 Minyak dan Gas Oil and Gas	East Java • Central Java • West Papua • East Kalimantan • Central Kalimantan	 Pelabuhan Port	• Jakarta • North Sumatra
 Jalan Road	Bengkulu • DKI Jakarta • West Java • East Java • Central Java	 Pelayanan Kesehatan Health Care Facility	Banten • West Java
		 Lainnya Others	North Sumatra • South Sumatra • East Kalimantan • West Kalimantan

LAPORAN DIREKSI [D.1][102-14][102-15]

Board of Directors Report



Reynaldi Hermansjah

Presiden Direktur & CEO
President Director & CEO

➤ Peran Perseroan dalam upaya peningkatan kualitas sosial dan lingkungan dari pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah dengan menjadi agen utama perubahan untuk memperkenalkan, menjelaskan, memantau, dan memastikan kepatuhan terhadap Prinsip Sosial dan Lingkungan IIF yang telah mengadopsi standar dan praktik terbaik bertaraf internasional.

The Company's role in improving the social and environmental quality of infrastructure development in Indonesia is to become the main agent of change where IIF introduces, explains, monitors, and ensures compliance with its Social and Environmental Principles which have adopted international standards and best practices.

PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

Pertama-tama, Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia, dan kesehatan yang diberikan sehingga kami dapat melalui tahun ini dengan kinerja yang baik. Pada kesempatan ini, kami turut mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan dari berbagai pihak sehingga kami mampu melewati berbagai tantangan di tahun 2021. Atas nama Direksi IIF, izinkan saya untuk melaporkan kinerja dan kontribusi kami dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui Laporan Keberlanjutan ini.

Tahun 2021 masih menjadi tahun yang penuh tantangan bagi kita semua mengingat pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bahkan sempat mengalami lonjakan kasus aktif yang sangat tinggi pada pertengahan tahun. Berbagai penyesuaian juga dihadapi industri pembiayaan infrastruktur seiring dengan upaya Pemerintah untuk memfokuskan kebijakan anggarannya pada sektor kesehatan.

Tantangan lain yang dihadapi IIF adalah *over liquidity market* yang terjadi di industri keuangan karena hampir sebagian besar institusi perbankan di Indonesia menurunkan suku bunga kreditnya secara serempak sehingga pembiayaan yang mereka tawarkan menjadi lebih kompetitif.

Meski menghadapi situasi sulit dengan berbagai tantangan tersebut, IIF tetap memberikan kinerja yang optimal dan positif untuk menjalankan mandat sebagai katalisator percepatan pembangunan infrastruktur. Kami juga tetap bertanggung jawab dalam menjalankan komitmen untuk menerapkan perlindungan sosial dan lingkungan berstandar internasional pada setiap proyek yang kami biayai.

Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya kami untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Kami bersyukur atas banyaknya pencapaian positif yang IIF dapat realisasikan di tahun 2021, baik dari sisi kinerja operasional, sosial, maupun lingkungan.

Dari sisi kinerja operasional, kami tetap mencatat pertumbuhan dari pendapatan usaha dan aktivitas bisnis. Pendapatan usaha IIF tahun 2021 dibukukan sebesar Rp951,10 miliar atau meningkat sebesar 4,34% dari tahun sebelumnya (sebesar Rp911,52 miliar).

IIF berhasil menandatangani 17 perjanjian baru di tahun ini dengan nilai komitmen investasi mencapai Rp5,41 triliun dan berhasil naik 88,0% dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah Rp2,88 triliun. Dengan adanya komitmen baru di tahun 2021, maka total aset IIF menjadi sebesar Rp12,21 triliun. Hingga 31 Desember 2021, IIF tercatat memiliki sebanyak 57 klien yang sebagian besar berasal dari sektor kelistrikan, infrastruktur jalan, dan telekomunikasi.

DISTINGUISHED SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS,

I would like to begin this report by praising God the Almighty for His grace and blessings, and for keeping us healthy and enabling us to conclude this year with a satisfactory performance. Please allow me to take this opportunity to express our appreciation for the relentless support of our stakeholders, which has helped us to overcome various challenges in 2021. On behalf of IIF's Board of Directors, I would like to use this sustainability report to elaborate on our performance and contribution in enhancing infrastructure development in Indonesia.

2021 was still a challenging year for all of us, considering the COVID-19 pandemic which has not ended yet, and the resurgence of high active infections cases in the middle of the year. Various adjustments were also faced by the infrastructure financing industry in line with the Government attempt to refocus its budget policy on the health sector.

Just like many other players in the financing industry, IIF also faced over liquidity in 2021 due to the fact that most banks and other financial institutions in Indonesia lowered their lending rates to keep their product offerings appealing to the market.

Despite the difficult and challenging landscape, IIF delivered positive performance and fulfilled its mandate as a catalyst for accelerating infrastructure development. In particular, we fulfilled our commitment to implementing the international standards of social and environmental safeguards in every project we financed.

This commitment also supported the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. We are grateful for the numerous positive achievements that IIF managed to deliver in 2021 on the operational, social and environmental fronts.

In terms of operational performance, we delivered growth in the operating revenues from our business activities. Income from operations reached Rp951.10 billion, an increase of 4.34% from the previous year (Rp911.52 billion).

IIF signed 17 new agreements this year with a total investment commitment of Rp5.41 trillion, a drastic increase of 88.0% from Rp2.88 trillion the previous year. The new commitments in 2021 have expanded IIF's total assets to Rp12.21 trillion. As of December 31, 2021, IIF had 57 clients, with the majority in the electricity, road infrastructure, and telecommunications sectors.

Pada awal tahun 2021, IIF berhasil menerbitkan *sustainability bonds* dengan tenor 5 tahun senilai US\$150 juta di pasar internasional melalui proses pencatatan dan serangkaian pemasaran yang ekstensif kepada investor mancanegara. Obligasi ini merupakan *sustainability bonds* pertama yang diterbitkan oleh institusi keuangan non-bank Indonesia dan menegaskan kembali posisi IIF dalam penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

Di sisi kinerja portofolio, IIF berhasil meraih kesepakatan pembiayaan proyek pembangunan rel kereta api di Sulawesi untuk jalur Makassar-Parepare. Proyek ini merupakan pionir dalam portofolio IIF di sektor kereta api dan transportasi massal. Pembangunan rel kereta api Makassar-Parepare sepanjang 142 km ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional, yang menjadi bagian dari jaringan Kereta Api Nasional Trans-Sulawesi. Jalur tersebut dapat mendukung mobilisasi masyarakat dan arus barang dalam jumlah banyak dengan waktu tempuh relatif singkat.

Di tahun 2021 ini, IIF juga memberikan pembiayaan pada sektor kesehatan untuk pertama kalinya melalui penandatanganan perjanjian pinjaman *senior term* untuk mendanai renovasi dan ekspansi gedung di dua rumah sakit yang berlokasi di Tangerang dan Bekasi. Ekspansi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan di kedua rumah sakit tersebut dengan tersedianya peningkatan jumlah tempat tidur dan pembelian alat kesehatan serta fasilitas pendukung lainnya.

Pendanaan tersebut merupakan komitmen kami untuk memperluas portofolio yang tidak hanya melibatkan pembangunan fisik, tetapi juga infrastruktur sosial seperti sektor kesehatan dan pendidikan. Melalui pembangunan infrastruktur sosial, kami juga ingin konsisten untuk mengembangkan kapasitas IIF dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami juga melihat bahwa pembangunan di sektor komunikasi dan digital juga sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan kemajuan zaman.

Pada pertengahan tahun 2021, IIF memberikan fasilitas pinjaman untuk proyek pembangunan Gedung Pusat Data pertamanya. Fasilitas tersebut dibangun di Kawasan Industri Jababeka, Bekasi, dengan mengusung desain dan konsep gedung yang menekankan fasilitas *zero downtime*, *efficiency*, dan *green building*.

Menjelang akhir 2021, IIF memberikan fasilitas kredit bergulir untuk pembangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS) 4G di 1.795 titik di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) wilayah Papua Barat dan Papua Barat-Tengah. Pemberian fasilitas ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk membangun akses telekomunikasi yang dapat dinikmati masyarakat di daerah 3T.

Selain proyek-proyek pada sektor baru tersebut, IIF terus melanjutkan pembiayaan infrastruktur pada sektor lainnya seperti pendanaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 750 liter/detik di Pekanbaru, serta

In early 2021, IIF successfully issued its 5-year, US\$150 million sustainability bonds in global market after a lengthy process of listing and a series of marketing roadshows to entice foreign investors. These bonds were the first sustainability bonds issued by an Indonesian non-bank financial institution and reaffirmed IIF's leading position in implementing environmental, social and governance (ESG) principles in infrastructure financing in Indonesia.

On the portfolio performance side, IIF has sealed financing deals for the Makassar-Parepare line railroad construction project in Sulawesi. This project is a pioneer in IIF's rail and mass transportation sector portfolio. The construction of the 142 km Makassar-Parepare railway is a part of the Trans-Sulawesi National Railway network under the National Strategic Project. Once completed, this commuter line system will support people's mobility and improve the distribution of goods because it will be able to handle a large number of passengers and goods, as well as reduce transport times.

In 2021, IIF also provided its first financing facility in the health sector through the signing of a senior term loan agreement to fund the renovation and expansion of healthcare buildings in two hospitals, one in Tangerang and the other in Bekasi. With this expansion, the two hospitals are expected to increase their respective capacity and quality of service with the provision of more beds and the procurement of medical devices and other supporting facilities.

This funding represents our commitment to expanding our portfolio by tapping into other sectors which are not only focusing on physical developments, but also social infrastructure projects in the health and education sectors. Through the development of social infrastructure, we have shown our capacity to benefit the society. We have also tapped the communication and digital sector due to the increasing need for digital services.

In mid-2021, IIF provided a loan facility for its first Data Centre Building project. The facility will be built in the Jababeka Industrial Estate, Bekasi, with a building design and concept that champions zero downtime, efficiency, and green building facilities.

Before the 2021 ended, IIF provided a revolving credit facility for the construction of 4G Base Transceiver Station (BTS) towers at 1,795 points spread across the 3T (Front, Remote and Disadvantaged) areas of West Papua and West-Central Papua. The provision of this facility demonstrates the Company's commitment to developing telecommunication access for the community in the 3T area.

In addition to projects in these new sectors, IIF continued to finance infrastructure projects in other sectors. These included providing funding for the Drinking Water Supply System (SPAM) project with a capacity of 750 litres/second in Pekanbaru, and

proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) dengan kapasitas 2 x 5 MW di Poso, Sulawesi Tengah dan 2 x 1,75 MW di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

Dari sisi kinerja sosial dan lingkungan, IIF telah mengadakan konsultasi publik terkait dengan pemutakhiran dokumen manual operasional Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan. Konsultasi publik tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2021 dengan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari 33 institusi, seperti Pemegang Saham, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengatur Jalan Tol, Lembaga Keuangan, konsultan, klien, akademisi, dan NGO.

Untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, IIF juga melakukan kerja sama dengan akademisi, yaitu Universitas Indonesia, pada September 2021 terkait dengan program pengembangan masyarakat dan jasa lingkungan. Program ini menjadi bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan IIF yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan/atau lingkungan secara berkelanjutan.

Di akhir tahun 2021, IIF juga berhasil meraih Peringkat Emas dan penghargaan "A Commendation for First Year ASRRAT" untuk Laporan Keberlanjutan 2020 dari *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR) dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021 yang ke-17. Penghargaan ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi IIF yang menjadi bukti nyata bahwa IIF telah melakukan kegiatan yang bermakna dan berkelanjutan. Hal ini turut memperkuat keyakinan bahwa kami berada di jalur yang tepat dalam menjadi agen perubahan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai penutup, kami menyadari bahwa pencapaian kinerja di 2021 dan tahun mendatang merupakan upaya kerja bersama, di mana setiap orang memiliki perannya masing-masing dalam berkontribusi. Kami berharap untuk dapat memberikan lebih banyak contoh dan nilai-nilai positif dari penerapan standar sosial dan lingkungan bertaraf internasional, serta dapat berbagi solusi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

IIF juga berharap untuk dapat terus berkembang menjadi organisasi yang mampu menjadi tolok ukur bagi lembaga keuangan lainnya ataupun pembuat kebijakan, untuk mengadopsi kerangka kerja pengelolaan sosial dan lingkungan yang komprehensif. Dengan dukungan dari para pemangku kepentingan, kami percaya bahwa IIF dapat terus maju dan mampu menghadapi berbagai dinamika yang akan terjadi di masa mendatang sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur berbasis keberlanjutan.

the construction of a Mini Hydro Power Plant (PLTMH) with a capacity of 2 x 5 MW in Poso, Central Sulawesi and 2 x 1.75 MW in Bolaang Mongondow, North Sulawesi.

In terms of social and environmental performance, IIF organized a series of public consultations to update its Social and Environmental Management System operating manual. The public consultations were held in March 2021 and attended by various stakeholders from 33 institutions, including Shareholders, Ministry of Finance, Financial Services Authority, Toll Road Regulatory Agency, Financial Institutions, consultants, clients, academia, and NGOs.

To build collaboration with relevant parties, IIF also engaged the academics from the University of Indonesia in September 2021 to run community development programs and improve environmental services. This program is a part of IIF's Social and Environmental Responsibility and is expected to improve the quality of life of the community and environmental preservation.

At the end of 2021, IIF received a Gold Rating and "A Commendation for First Year ASRRAT" for its 2020 Sustainability Report from the National Center for Sustainability Reporting (NCSR) at the 17th Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021 event. IIF is very proud of this award as it clearly proves that we have done meaningful and sustainable activities in our business. It also convinces us that we are on the right track to becoming an agent of change for sustainable development.

In closing, we acknowledge that our achievements in 2021 and the coming year require collaborative effort, where everyone has to play their part in contributing. We hope that we will be able to continue providing more examples and positive values from the application of international social and environmental standards, sharing our solutions, and collaborating with various parties to face the challenges of sustainable infrastructure development.

We also hope that IIF continues to develop into an organization capable of becoming a benchmark for other financial institutions and policy makers who seek to adopt a comprehensive social and environmental management framework. We believe that with the help of our stakeholders, IIF will be able to move forward and overcome various sustainability issues that may stand in our way as a sustainability-based infrastructure financing company.



Reynaldi Hermansjah

Presiden Direktur & CEO | President Director & CEO

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Sustainability Governance



➤ Tata kelola yang baik akan membantu Perusahaan mencapai visi-misinya dan memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingannya. Tata kelola perusahaan akan berjalan efektif apabila didukung oleh kerangka kerja yang tersusun dengan baik dan menyatukan seluruh organ-organ tata kelola.

Good governance helps the Company to achieve its vision and mission and provide benefits to all of its stakeholders. Corporate governance will run effectively if it is supported by a well-structured framework that brings together governance organs.

STRUKTUR TATA KELOLA [102-18]

Struktur tata kelola perusahaan IIF dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUPT dan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, serta organ-organ pendukung lainnya seperti Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengendalian Internal, dan Komite Audit. Penyusunan struktur ini memperhatikan pemetaan fungsi atau kegiatan usaha berdasarkan standar etika bisnis serta memastikan mekanisme *checks and balances* dapat berjalan dengan efektif.

Dewan Komisaris dan Direksi berperan dalam pengembangan, persetujuan, dan memperbarui tujuan, nilai atau pernyataan misi, strategi, kebijakan, dan sasaran organisasi yang berkaitan dengan topik-topik keberlanjutan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga dibantu oleh 4 (empat) komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan 6 (enam) komite yang berada di bawah Direksi, serta Sekretaris Perusahaan dan Divisi Audit Internal. [102-26]

Masing-masing komite tersebut mengadakan pertemuan rutin untuk mendukung Direksi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Materi rapat dan hasil keputusan rapat kemudian diteruskan kepada Komite Dewan Komisaris untuk ditinjau kembali. Dengan demikian, Perseroan memastikan bahwa Dewan Komisaris melalui komite-komitennya akan mendapatkan informasi lengkap dan terkini mengenai kondisi operasional Perseroan. [102-26]

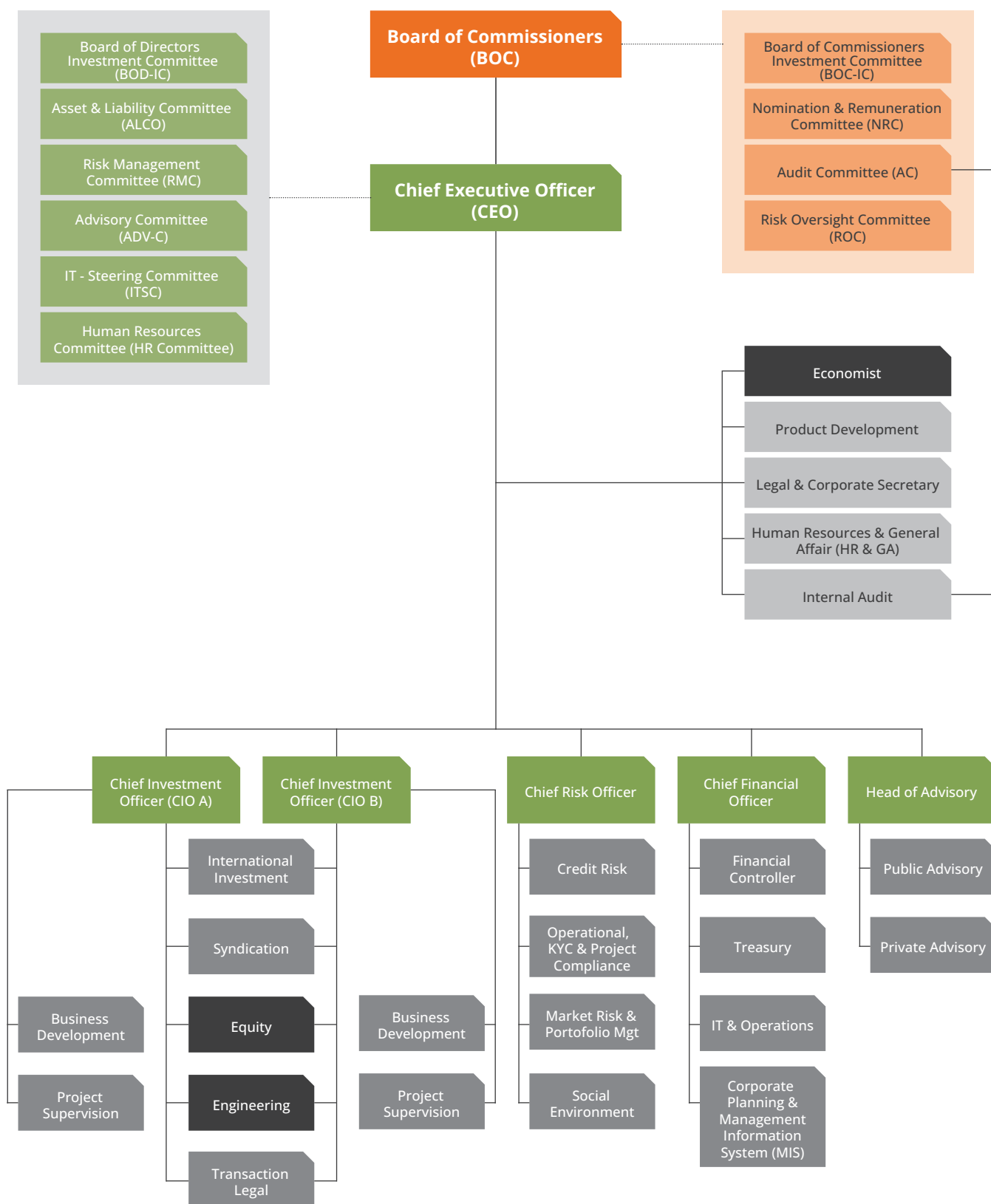
GOVERNANCE STRUCTURE [102-18]

IIF's governance structure was set up based on Article 1 of the Company Law and consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Board of Directors, and supporting organs such as the Corporate Secretary, Internal Control Unit, and the Audit Committee. The structure has considered the mapping of business functions or activities based on ethical standards and ensures it runs an effective check and balance system.

The Board of Commissioners and the Board of Directors play a role in developing, approving, and updating sustainability-related goals, values or mission statements, strategies, policies, and goals of the organization. The Company's Boards of Commissioners and Directors respectively have 4 (four) and 6 (six) committees who assist the two boards in addition to a Corporate Secretary and Internal Audit Division. [102-26]

Each of these committees holds regular meetings to support the Board of Directors in the decision-making process, e.g. on economic, environmental, and social topics. The meeting materials and decisions are submitted to the Committee of the Board of Commissioners for review. With this mechanism, the Company ensures that the Board of Commissioners will have adequate and up-to-date information regarding the Company's operational conditions. [102-26]

Struktur Tata Kelola Governance Structure



Komposisi Organ Tata Kelola berdasarkan Status Jabatan [102-22]

Composition of Corporate Governance based on Position

Jabatan	Jumlah (Orang) Total (Person)	Position
Dewan Komisaris	9	Board of Commissioners
Direksi (Eksekutif)	6	Board of Directors (Executive)

Komposisi Dewan Komisaris [102-22]

Board of Commissioner Composition

Jabatan	Jumlah (Orang) Total (Person)	Position
Non-independen	7	Non-Independent
Independen	2	Independent

Komposisi Organ Tata Kelola berdasarkan Masa Jabatan [102-22]

Composition of Corporate Governance based on Term of Office

Masa Jabatan Term of Office	Jumlah (Orang) Total (Person)	Term of Office
1 – 3 tahun	9	1 – 3 years
4 – 6 tahun	5	4 – 6 years
7 – 9 tahun	1	7 – 9 years

Komposisi Organ Tata Kelola berdasarkan Gender [102-22]

Composition of Corporate Governance based on Gender

Gender Gender	Jumlah (Orang) Total (Person)	Gender Gender
Laki-laki	14	Male
Perempuan	1	Female

Catatan | Notes:

- Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki kompetensi terkait topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial
All members of the Board of Commissioners and Board of Directors have competence related to economic, environmental, and social topics
- Ketua badan tata kelola tertinggi tidak menjabat sebagai pejabat eksekutif [102-23]
Chairman of the highest governance body does not serve as an executive officer [102-23]

PROSEDUR NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI [102-24]

Kebijakan nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan senantiasa menjunjung tinggi keberagaman komposisi anggota dengan mempertimbangkan latar belakang keahlian, usia, pendidikan, *gender*, dan pengalaman berkarier profesional.

IIF melalui Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi atau Nomination and Remuneration Committee (NRC) berdasarkan ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014. Seluruh anggota NRC telah memenuhi kriteria atau kualifikasi sebagaimana diatur dalam POJK 33/2014 sehingga dapat ditunjuk dan diangkat sebagai anggota NRC, antara lain:

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama;
- Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi;

PROCEDURE FOR NOMINATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS [102-24]

The nomination policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company always upholds the diversity of the composition of members by considering the background of expertise, age, education, gender, and professional career experience.

IIF through its Board of Commissioners set up a Nomination and Remuneration Committee (NRC) based on the provisions of POJK No. 34/POJK.04/2014. All members of the Company's NRC have met the criteria or company qualifications as stipulated in POJK 33/2014 that make them eligible as members of the NRC, including:

- Has no affiliation with Issuers or Public Companies, members of the BoD, members of the BoC, or Major Shareholders;
- Has experience related to Nomination and/or Remuneration;

3. Bukan pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia;
4. Bukan anggota Direksi; dan
5. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Setiap anggota NRC memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan pasar modal, operasional perusahaan, ketenagakerjaan serta hubungan industrial, serta mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Masa kerja NRC tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, serta dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

NRC bertanggung jawab untuk mengajukan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dalam Anggaran Dasar. Selain itu NRC memiliki fungsi untuk memberikan saran mengenai remunerasi anggota Direksi dan Komisaris Independen, serta menetapkan kebijakan remunerasi yang umum berlaku bagi seluruh karyawan Perusahaan.

Berikut ini adalah prosedur nominasi Dewan Komisaris dan Direksi IIF, yaitu:

- NRC melakukan seleksi dan memberikan nominasi calon yang akan direkomendasikan kepada Dewan Komisaris;
- Dewan Komisaris melakukan seleksi dan memberikan nominasi calon yang akan direkomendasikan kepada pemegang saham;
- Ketua NRC dan Dewan Komisaris memberikan rekomendasi nominasi calon dan remunerasinya kepada pemegang saham;
- Pemegang saham memberikan tanggapan, pertanyaan dan/atau persetujuannya pada nominasi yang disampaikan oleh Ketua NRC dan Dewan Komisaris;
- Khusus untuk anggota Komisaris yang mewakili pemegang saham, seleksi dan nominasinya dilakukan oleh pemegang saham terkait.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI [102-28]

Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi diukur dan dievaluasi melalui KPI yang menjelaskan pencapaian dalam berbagai aspek, termasuk kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi baik secara kolektif maupun individu dilakukan setiap tahun dengan metode *self-assessment* oleh masing-masing anggota Direksi dan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi juga mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan tanggung

3. Not any one that assumes a managerial position under the BoD in charge of human resources;
4. Not a BoD member; and
5. Not assuming concurrent positions as members of other committees owned by the Issuer or Public Company.

Each member of the NRC shall have adequate knowledge of the laws and regulations of the capital market, Company operations, employment and industrial relations, has adequate knowledge and experience in accordance with his educational background and has the ability to communicate well.

The term of office of the NRC may not be longer than the term of office of the BoC as stipulated in the Articles of Association, and may be reappointed for the next term of office.

The NRC nominates candidates for members of both the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, without prejudice to the provisions of Article 13 paragraph (4) in the Articles of Association. The NRC also has the function to provide advices on the remuneration of members of the Board of Directors and Independent Commissioners, and to establish remuneration policies that apply to all employees of the Company.

The following is the nomination procedure for the Board of Commissioners and Board of Directors of IIF:

- The NRC selects and gives a list of nominated candidates as recommendation to the Board of Commissioners;
- The Board of Commissioners selects the candidates to be proposed to the shareholders;
- The Chairman of the NRC and the Board of Commissioners propose the recommended candidates and their remuneration to shareholders;
- Shareholders give their responses, questions and/or approval to the nominations submitted by the Chairperson of the NRC and the Board of Commissioners;
- Specifically, for members of the Board of Commissioners who represent shareholders, the selection and nomination process are carried out by the relevant shareholders.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE [102-28]

The performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors is measured and evaluated using a predetermined KPIs that specify achievements in various aspects, including economy, social and environment. The performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, both collegially and individually, is annually self-assessed by each member of the two Boards. The Board of Commissioners and the Board of Directors report their accountabilities to shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).

The performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors is evaluated by considering the

jawab Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar IIF. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris disampaikan langsung kepada Presiden Komisaris, sementara hasil penilaian kinerja Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris dan evaluasi akhir penilaian akan dilakukan oleh Presiden Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Hasil evaluasi kinerja Direksi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan arahan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Direksi ke depannya dan menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan/atau untuk menyusun struktur remunerasi Direksi.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI [102-35][102-36]

Ketentuan mengenai besaran dan struktur remunerasi Direksi ditetapkan dalam RUPST, berdasarkan hasil evaluasi dan usulan Komite Nominasi dan Remunerasi. Besaran remunerasi Direksi pada tahun buku 2021 disajikan pada Laporan Keuangan Audit Perusahaan tahun 2021. Dalam menentukan remunerasi, IIF tidak melibatkan konsultan dan pihak ketiga lainnya.

Penentuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dimulai dengan pembahasan oleh Dewan Komisaris mengenai indikator-indikator utama yang harus diperhatikan dalam proses penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya, Dewan Komisaris menentukan usulan struktur dan besaran remunerasi dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan pertimbangan yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Selanjutnya, usulan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan kepada pemegang saham pada saat RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan.

Berikut ini adalah sejumlah indikator utama atau faktor-faktor penentu yang dijadikan sebagai landasan pertimbangan dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu:

- 1) Kinerja Perseroan;
- 2) Faktor skala usaha;
- 3) Faktor kompleksitas usaha;
- 4) Tingkat inflasi;
- 5) Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan; dan
- 6) Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

MENYAMPAIKAN HAL-HAL KRITIS [102-33][102-34]

IIF sangat terbuka dengan ide, saran, masukan, dan kritikan sebagai proses evaluasi untuk menjalankan bisnis dan memiliki kinerja yang lebih baik ke depannya. Penyampaian hal-hal

implementation of their duties and responsibilities pursuant to all regulatory provisions and/or the IIF's Articles of Association. The results of evaluation on the Board of Commissioners are submitted directly to the President Commissioner, while the Board of Directors evaluation are submitted to the Board of Commissioners and the final assessment will be made by the President Commissioner based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.

The results of the performance evaluation of the BoD are used as consideration in providing directives to improve the effectiveness of the BoD performance in the future and as one of the basic considerations for the Nomination and Remuneration Committee in giving recommendations to the BoC to reappoint members of the BoD and/or to develop the remuneration structure of the BoD.

REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS [102-35][102-36]

Provisions regarding the amount and structure of the remuneration of the Board of Directors are determined in the AGMS, based on the evaluation and the recommendations results of the Nomination and Remuneration Committee. The amount of remuneration for the Board of Directors in the 2021 financial year is presented in the Company's 2021 Audited Financial Statements. In determining the remuneration, IIF does not involve consultants and other third parties.

The determination of the remuneration for the BoC and the BoD begins with a discussion by the BoC regarding the key indicators that must be considered in the entire process of remuneration determination. Furthermore, the BoC shall determine the proposed remuneration structure and amount with due consideration on the evaluation results and considerations given by the Nomination and Remuneration Committee. The proposal for determining the remuneration for the BoC and the BoD will then be submitted to shareholders at the Annual GMS for approval.

The following are some key indicators or determining factors that serve as the basic consideration in determining the remuneration of the BoC and the BoD:

- 1) Company Performance;
- 2) Business scale factor;
- 3) Business complexity factor;
- 4) Inflation rate;
- 5) Company's financial condition and capability; and
- 6) Other relevant factors and must not conflict with the laws and regulations.

CONVEYING CRITICAL MATTERS [102-33][102-34]

IIF is open to ideas, suggestions, input, and criticism as an evaluation process to run a business and improve future

kritis dilakukan secara dua arah, baik langsung dari karyawan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, ataupun sebaliknya. Untuk mengakomodasi hal tersebut, IIF memiliki beberapa mekanisme penyampaian hal-hal kritis yang menjadi jalur komunikasi dengan badan tata kelola tertinggi seperti, namun tidak terbatas pada:

1. Laporan tertulis/Memorandum

Sebelum suatu proyek mendapatkan persetujuan pembiayaan, tim yang bertugas berkewajiban untuk menyampaikan *Project Appraisal Memorandum* yang mengkritisi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dari proyek tersebut kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Selain itu, setiap tahunnya, IIF berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan (*Annual report*) dan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) hingga ke tingkat Dewan Komisaris.

2. Rapat Direksi

Sebagaimana diatur dalam Piagam Direksi, rapat Direksi wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulan. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dan mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Selama tahun 2021, Direksi telah mengadakan 25 kali rapat internal yang merupakan rapat rutin dua mingguan untuk anggota *executive committee*.

3. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali setiap 2 bulan. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dan mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah mengadakan 10 kali rapat internal. Rincian agenda rapat dewan komisaris ini tersedia di dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) IIF di 2021.

4. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2021, IIF telah melaksanakan 9 kali rapat gabungan yang digelar secara virtual. Pada kesempatan tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan masukan, arahan, dan menjalankan fungsi untuk memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan strategi dan kebijakan.

performance. The critical matters are conveyed in two directions, either directly from employees to the Board of Commissioners and Directors, or vice versa. To accommodate this, IIF has several mechanisms for delivering critical matters which serve as communication channels with the highest governance body, including, but not limited to:

1. Written report/Memorandum

Before a project is approved for financing, the team in charge has to submit a Project Appraisal Memorandum that critics the economic, social and environmental aspects of the project to the Board of Directors and/or Board of Commissioners. In addition, every year, IIF is obliged to submit an annual report and a sustainability report up to the level of the Board of Commissioners.

2. Board of Directors Meeting

As stipulated in the Board of Directors Charter, the Board of Directors shall convene at least 1 (one) meeting every month. The BoD meetings shall be chaired by the President Director and all meeting decisions shall be made by means of deliberation to reach consensus. During 2021, the Board of Directors convened 25 internal meetings which were regular bi-weekly meetings for members of the executive committee.

3. Board of Commissioners Meeting

Meetings of the Board of Commissioners shall be held at least once every 2 months. The Board of Commissioners meeting shall be chaired by the President Commissioner and the meeting decisions shall be made by means of deliberation to reach consensus. During 2021, the Board of Commissioners convened 10 internal meetings. The details of the agenda for the Board Commissioners Meeting are available in the IIF Annual Report in 2021.

4. Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

During 2021, IIF convened 9 virtual joint meetings. On this occasion, the Board of Commissioners gave inputs, direction, and advised the Board of Directors regarding the implementation of strategies and policies.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN TATA KELOLA KEBERLANJUTAN [E.1]

Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh karyawan Perseroan mendukung keberhasilan penerapan keuangan berkelanjutan. Dewan Komisaris dan Direksi telah membentuk *Sustainable Finance Working Group* (SFWG) yang berada di bawah tanggung jawab *Chief Financial Officer* dan *Chief Risk Officer*, serta *Social and Environmental Division* (SED) yang berada di bawah tanggung jawab *Chief Risk Officer*. [102-19][102-20][102-29]

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF SUSTAINABLE GOVERNANCE ORGANS [E.1]

The Board of Commissioners and Board of Directors work with all employees to support the successful implementation of sustainable finance. The Board of Commissioners and the Board of Directors have set up a Sustainable Finance Working Group (SFWG) who reports to the Chief Financial Officer and Chief Risk Officer, and the Social and Environmental Division (SED) who reports to the Chief Risk Officer. [102-19][102-20][102-29]

Sustainable Finance Working Group (SFWG)

Untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan serta memastikan tersedianya pelaporan yang memadai atas pelaksanaan keuangan berkelanjutan yang telah dituangkan dalam *Sustainable Framework*, IIF membentuk Sustainable Finance Working Group (SFWG) yang terdiri atas koordinator, sekretaris, dan anggota dari beberapa divisi terkait yang terlibat dalam keuangan berkelanjutan, seperti SED, Divisi Finance Control, Divisi Manajemen Risiko, Divisi SDM dan Umum, Divisi Investasi, dan Divisi Legal & Corporate Secretary.

SFWG diharapkan untuk dapat menjalankan beberapa fungsi yaitu:

- Mengkoordinasikan penilaian kesesuaian proyek yang diusulkan untuk penggunaan dana *Sustainability Bond* dengan mengacu pada *Sustainability Framework*;
- Menyusun *Sustainability Impact Reporting* setiap tahun selama periode Obligasi (*Sustainability Bond*) berlangsung sebagaimana dipersyaratkan dalam *Sustainability Framework*;
- Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) serta *Sustainability Report* yang akan disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sustainable Finance Working Group (SFWG)

To support the implementation of sustainable finance and ensure that it has adequate reporting on the implementation of sustainable finance as outlined in the *Sustainable Framework*, IIF has set up a Sustainable Finance Working Group (SFWG) whose members consist of a coordinator, a secretary, and other members from several related divisions involved in sustainable finance, such as SED, Finance Control Division, Risk Management Division, HR and General Affairs Division, Investment Division, and Legal & Corporate Secretary Division.

SFWG is expected to have the capability to perform several functions, namely:

- Coordinate suitability assessment of a proposed project for the use of Sustainability Bond funds with reference to the Sustainability Framework;
- Prepare annual Sustainability Impact Reporting until the maturity date of the Bond (Sustainability Bond) as required in the Sustainability Framework;
- Prepare a Sustainable Finance Action Plan (RAKB) and a Sustainability Report which will be submitted every year to the Financial Services Authority (OJK).

Tugas dan Peran dalam Pelaksanaan Aktivitas Keuangan Berkelanjutan [102-29]

Duties and Roles in the Implementation of Sustainable Finance Activities

Pihak Terkait Related Parties	Tugas dan Peran	Duties and Roles
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Mengawasi dan memberikan nasihat mengenai manajemen Keuangan Berkelanjutan yang dilakukan oleh Direksi IIF.	Supervising and providing advice on Sustainable Finance management conducted by the BoD of IIF
Direksi Board of Directors	Mengelola aktivitas Keuangan Berkelanjutan, disesuaikan dengan Visi dan Misi IIF.	Managing the Sustainable Finance of IIF, aligned with its Vision and Mission
Sustainable Finance Working Group (SFWG)	Melakukan evaluasi dan pemantauan, serta memastikan penyampaian laporan terkait Keuangan Berkelanjutan kepada pihak otoritas keuangan, investor publik, dan investor keberlanjutan, dengan mengacu pada Kerangka Kerja Keberlanjutan IIF dan standar keberlanjutan lainnya yang relevan.	Conducting evaluation and monitoring, as well as ensuring the deliverability of reports related to Sustainable Finance to financial authorities as well as public or sustainability investors according to IIF's Sustainability Framework and relevant sustainability standards.
Social and Environmental Division (SED)	Memastikan bahwa semua proyek ditinjau dan dievaluasi berdasarkan persyaratan S&E, antara lain: Daftar Pengecualian; regulasi terkait dengan peraturan sosial dan lingkungan Pemerintah Indonesia; dan SEP IIF yang diadopsi dari IFC PS 2012.	Ensuring that projects are reviewed and evaluated against S&E requirements as follows: Exclusion List; applicable GoI regulations related to the environmental and social issues; and IIF's SEP adopted from IFC PS 2012.
Finance Control and Corporate Planning Division	• Mendukung persiapan aktivitas Keuangan Berkelanjutan IIF; dan • Melaporkan realisasi <i>budget</i> untuk penerapan Keuangan Berkelanjutan.	• Supporting the preparation of IIF's Sustainable Finance; and • Reporting the actual use of the Sustainable Finance budget
Risk Management Division	• Melakukan pelatihan rutin terkait anti-korupsi. • Mengadakan pelatihan gabungan dengan S&E terkait Keselamatan & Kesehatan, termasuk penunjukan <i>floor warden</i> untuk menangani kejadian gawat darurat yang membutuhkan evakuasi, dll. • Meninjau dokumentasi proyek dan menilai risiko potensial dan potensi pemburukan peringkat/<i>rating</i> proyek.	• Conducting regular training on Anti-Corruption. • Conducting joint training with S&E in conducting Safety & Health awareness sessions, including appointment of floor warden in case of emergency evacuation, etc. • Reviewing projects documentation and assess the potential risks of projects and their potential rating downgrading.
Human Resources & General Affairs Division	• Mengadakan pelatihan pengembangan kompetensi terkait dengan Keuangan Berkelanjutan. • Mendorong upaya efisiensi energi, seperti mematikan penyejuk udara pada jam 6 sore dan mengurangi penggunaan <i>toner printer</i>. • Mengurangi penggunaan air dengan membatasi jam operasi toilet hanya sepanjang jam kerja.	• Conducting competence improvement training related to Sustainable Finance. • Promoting energy efficiency, such as turning off air conditioners at 6 pm and reducing use of printer toner. • Reducing water use by limiting the use of restrooms only for office hours.

Pihak Terkait Related Parties	Tugas dan Peran	Duties and Roles
Investment Division	- Menyelaraskan dengan inisiatif strategis Pemerintah, menyediakan proyeksi tentang sektor-sektor infrastruktur yang sedang berkembang untuk diikutsertakan dalam strategi pertumbuhan IIF. - Menginisiasi ekspansi ke sektor-sektor yang dapat memperluas pangsa pasar produk keuangan IIF. - Melakukan uji tuntas dan penilaian atas proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan. - Memanfaatkan pengetahuan IIF dalam bisnis infrastruktur melalui sindikasi dengan institusi perbankan atau institusi keuangan lainnya. - Menginisiasi dan membentuk produk-produk <i>funded</i> dan <i>non-funded</i>, misalnya CDS dan <i>guarantee</i> yang membantu meningkatkan kelayakan finansial proyek-proyek yang berkelanjutan. - Memantau proyek-proyek yang ada di masa pinjaman agar selaras dengan persyaratan perjanjian dan prinsip-prinsip S&E.	- Aligning with the Government's strategic initiatives, provide a projection of the growing infrastructure sectors to be incorporated with IIF's growth strategy. - Initiating sector expansion that enables IIF's financial products to have broader market share - Conducting due diligence and assessments for sustainable infrastructure projects. - Leveraging IIF's knowledge in infrastructure business through syndication arrangement with other banking/ financial institutions. - Initiating and structuring funded and non-funded products, e.g. CDS, guarantee schemes, that help to improve the financial feasibility of the sustainable projects. - Monitoring the existing projects during loan tenor in alignment with agreed terms and S&E principles.
Legal & Corporate Secretary Division	Mendukung aksi korporasi, komunikasi, publikasi, sekaligus acara internal dan eksternal IIF yang terkait dengan aspek keberlanjutan, di dalam fungsi <i>corporate secretary</i> , <i>corporate legal</i> , <i>corporate communication</i> , dan hubungan investor.	Supporting IIF's sustainability-related corporate actions, communications, publications as well as internal and external events within the functions of corporate secretary, corporate legal, corporate communication and investor relations.

Sesuai dengan lingkup tugasnya, di tahun 2021, SFWG telah melakukan rapat sebanyak 10 kali dengan anggota SFWG. Agenda yang dibahas pada rapat di 2021 adalah terkait dengan tugas dan tanggung jawab anggota SFWG, metode komunikasi dan koordinasi, beberapa jenis pelaporan yang harus disiapkan di akhir 2021, rencana aksi keuangan berkelanjutan, pengelolaan aset yang akan masuk di dalam *Sustainability Bond*, penyusunan *Sustainability Bond Impact Reporting*, serta pembahasan terkait dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip keberlanjutan dalam melaksanakan keuangan berkelanjutan. **[102-31]**

Direksi juga secara formal mengkaji dan menyetujui Laporan Keberlanjutan yang berada di bawah tanggung jawab SFWG, serta memastikan bahwa seluruh topik material yang ditentukan telah diungkapkan dalam laporan. **[102-32]**

SED DAN SISTEM PENGELOLAAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN IIF **[102-20][FS1][FS2][FS3][FS4]**

Untuk mendukung penerapan tugas dan tanggung jawab pengelolaan tata kelola keberlanjutan, IIF memiliki SEMS, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan risiko sosial dan lingkungan serta risiko reputasi.

Risiko sosial dan lingkungan dapat muncul apabila proyek tidak mematuhi dan/atau tidak menerapkan aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, serta mengabaikan penerapan *Good International Industry Practice* (GIIP) terkait aspek S&E yang dapat berdampak pada penurunan nilai aset atau kemungkinan tidak dilunasnya pinjaman.

Sementara risiko reputasi mencakup kerugian atau potensi kerusakan reputasi IIF terkait dengan proyek-proyek yang mengalami konflik atau masalah publik yang signifikan atau proyek-proyek dengan isu sosial dan lingkungan yang tidak terselesaikan dengan baik yang berujung pada pemberitaan yang negatif.

In accordance with the scope of its duties, in 2021, the SFWG held 10 meetings that involved its members. The agenda discussed at the meeting in 2021 was on the duties and responsibilities of SFWG members, methods of communication and coordination, certain types of reporting that must be prepared by the end of 2021, sustainable financial action plans, asset management that will be included in the Sustainability Bond, the preparation for Sustainability Bonds Impact Reporting, and discussions on prudential principles and sustainability principles in implementing sustainable finance. **[102-31]**

The Board of Directors has also formally reviewed and approved the Sustainability Report, which is under the responsibility of SFWG and ensures that all the pre-specified material topics had been disclosed in the report. **[102-32]**

SED AND IIF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM **[102-20][FS1][FS2][FS3][FS4]**

To underpin the implementation of the duties and responsibilities of managing sustainability governance, IIF has a SEMS, which offers guidelines in managing social and environmental and reputational risks.

Social and environmental risks may occur when a project fails to comply with and/or does not implement the applicable rules and regulations in Indonesia and overlooks the application of Good International Industry Practice (GIIP) related to S&E aspects, which may have an impact on asset value impairment or the possibility of non-payment of loans.

Meanwhile, reputational risk includes loss or potential damage to IIF's reputation in relation to projects experiencing significant public conflict or problems, or projects with social and environmental issues that are not properly resolved leading to negative publications.

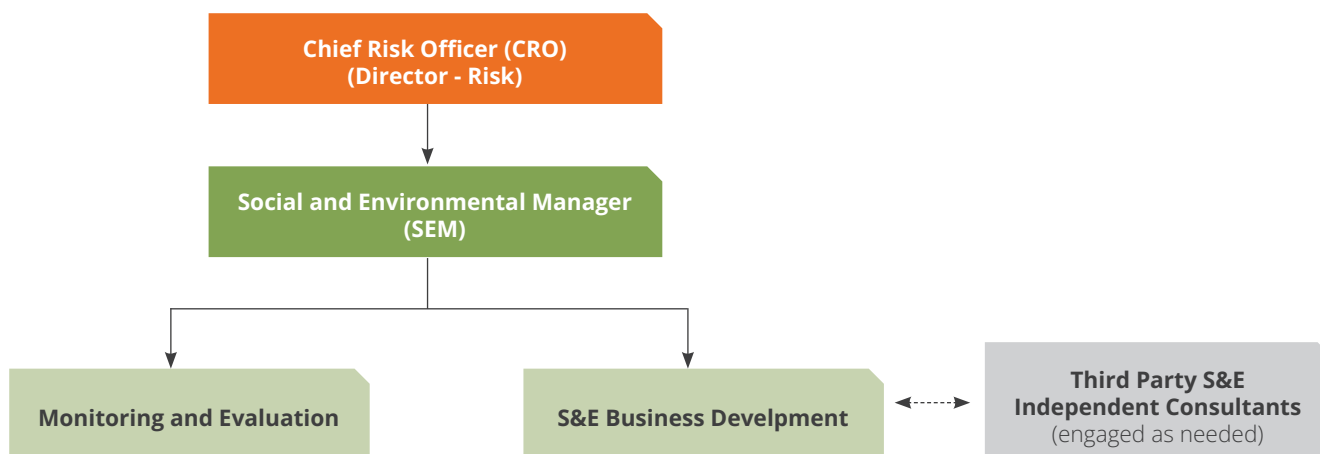
Risiko-risiko tersebut dapat memberikan dampak yang buruk bagi keberlangsungan usaha IIF itu sendiri. Oleh sebab itu di dalam mengelola risiko dibutuhkan sebuah sistem dan organisasi yang memadai.

SEMS dikelola dan dikoordinasikan oleh SED di bawah Direktorat Manajemen Risiko. SED dibentuk untuk memastikan bahwa semua Klien dapat mengelola risiko S&E dengan berpedoman pada penerapan Prinsip-prinsip S&E IIF.

SED berkomitmen untuk membantu klien dalam menerapkan pengelolaan S&E sesuai dengan Prinsip-prinsip S&E (S&E Principles-SEP). SED memberikan rekomendasi dalam bentuk *Corrective Action Plans* (CAPs) berdasarkan identifikasi kesenjangan pengelolaan aspek S&E terhadap persyaratan SEP. SED turut membantu peningkatan kapasitas internal IIF, klien, serta pihak berkepentingan lainnya terkait dengan penerapan SEP melalui program *sharing session*.

Hingga 31 Desember 2021, SED memiliki anggota 10 orang staf, jumlah ini meningkat 11% dari tahun sebelumnya. Staf SED memiliki keahlian beragam dari berbagai latar belakang dan pengalaman di bidang sosial dan lingkungan, antara lain: pembebasan lahan, masyarakat adat, keanekaragaman hayati, pengelolaan lingkungan, rekayasa lingkungan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Struktur SED SED Structure



Pada beberapa kondisi, SED akan dibantu oleh Konsultan S&E independen untuk melakukan penilaian terhadap Proyek khususnya proyek dengan risiko tinggi atau terdapat aspek tertentu yang memerlukan pengelolaan khusus, antara lain: polusi, keanekaragaman hayati, pembebasan lahan, dan/atau masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Sebagai contoh, konsultan dapat dilibatkan pada proses penyusunan *Environmental and Social Impact Assessment* (ESIA), penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, proses Audit S&E dan pelaksanaan Uji Tuntas Sosial dan Lingkungan (SEDD).

Those risks can have a negative impact on the sustainability of IIF's business itself. Therefore, in managing the risks, an adequate system and organization is needed.

The SEMS is managed and coordinated by the SED, under the Directorate of Risk Management. SED was established to ensure that all clients are able to manage the S&E risks with reference to the application of the IIF S&E Principles.

SED is committed to assisting clients in implementing S&E management in accordance with the S&E Principles (SEP). SED provides recommendations in the form of *Corrective Action Plans* (CAPs) based on the identification of gaps in the management of S&E aspects against the SEP requirements. SED also helps to increase the capacity of internal IIF, clients, and other interested parties on the SEP implementation through sharing session programs.

As of December 31, 2021, SED has 10 employees, an 11% increase from the previous year. The SED staffs have diverse expertise from various backgrounds and experiences in the social and environmental fields, such as land acquisition, indigenous peoples, biodiversity, environmental management, environmental engineering, to Occupational Health and Safety (OHS).

In some cases, SED will be assisted by an independent S&E Consultant to conduct an assessment of the Project, especially projects with high risk or certain aspects that require special management, including: pollution, biodiversity, land acquisition, and/or occupational health and safety issues. For example, consultants can be involved in the preparation of *Environmental and Social Impact Assessment* (ESIA), S&E Audit, and the implementation of Social and Environmental Due Diligence (SEDD).

SED IIF didukung oleh *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), *International Finance Corporation* (IFC), dan *Asian Development Bank* (ADB), yang telah memberikan input dan ulasan konstruktif pada proses penilaian, pemantauan dan pengawasan proyek. IBRD, IFC, dan ADB bersama-sama mendukung staf SED dalam meninjau SEDD, *Environmental and Social Action Plan* (ESAP), dan dokumen perlindungan hukum untuk memastikan bahwa risiko S&E telah diidentifikasi dengan baik dan disertai dengan upaya pengelolaan dan mitigasi risiko yang kemudian akan dimasukkan ke dalam persyaratan pembiayaan proyek.

Dukungan ini dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan yang secara rutin dilakukan atas kinerja SED oleh para Pemegang Saham. Dalam 1 tahun, IBRD dan IFC akan melakukan minimal dua kali pengawasan dalam bentuk *Mission*. Berdasarkan *Aide Memoire* yang dikeluarkan oleh IBRD dan IFC, selama 2021, Pemegang Saham mengakui bahwa kinerja SED semakin meningkat secara signifikan terbukti dengan terpenuhinya beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Pemegang Saham selama *Mission* berlangsung. SED turut diakui memiliki komitmen yang baik dalam peningkatan sistem pengelolaan dan kapasitas S&E. Peningkatan terus menerus ini salah satunya dibuktikan dengan pembaharuan dokumen SEMS 2019 yang telah diungkapkan kepada publik pada Maret 2021.

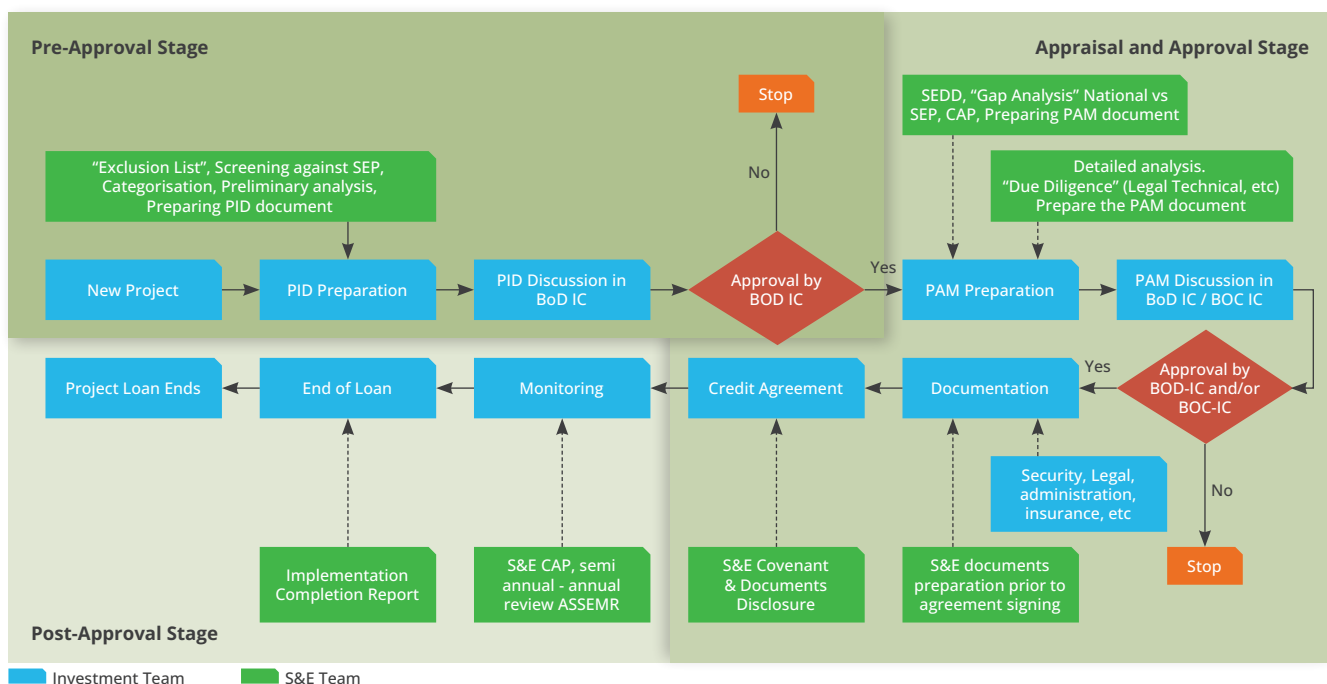
IIF juga telah mengidentifikasi tantangan dalam menerapkan SEMS dan memastikan kepatuhan terhadap SEP IIF, serta Standar Kinerja Bank Dunia dan IFC. IIF juga berupaya untuk melakukan standarisasi elemen-elemen kunci dari SEMS dan SEP dan mempersiapkan berbagai bentuk sarana pendukung terkait penilaian S&E pada isu-isu khusus, seperti pembebasan lahan dan masyarakat adat, untuk meningkatkan penerapan SEMS dan SEP.

IIF's SED is supported by the *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), *International Finance Corporation* (IFC), and the *Asian Development Bank* (ADB), which provide constructive feedback and reviews related to project assessment, monitoring and supervisory activities. IBRD, IFC, and ADB jointly support the SED staffs in reviewing SEDD, *Environmental and Social Action Plan* (ESAP), and legal safeguards documents to ensure that the S&E risks have been well-identified and completed with measures to manage and mitigate the risk which will be included in the project financing requirements;

This support is given through routine supervision and monitoring on the performance of SED by the Shareholders. Within 1 year, IBRD and IFC will carry out at least two supervisions in the form of *Mission*. Based on the *Aide Memoire* issued by IBRD and IFC, during 2021, Shareholders acknowledged that SED's performance was improving significantly as evidenced by the fulfillment of several recommendations given by Shareholders during the *Mission*. SED is also recognized as having shown its strong commitment to improve the management system and S&E capacity. This continuous improvement is evidenced by the renewal of the 2019 SEMS document which was disclosed to the public in March 2021.

IIF has also identified challenges in implementing SEMS and ensuring compliance with the SEP of IIF, as well as World Bank and IFC Performance Standards. IIF is also working to standardize the key elements of the SEMS and SEP and prepare various forms of supporting tools related to S&E assessments on specific issues, such as land acquisition and indigenous peoples, to improve the implementation of SEMS and SEP.

Penerapan S&E dalam Alur Kerja Bisnis S&E Implementation on Business Workflow



Konsultasi Publik Dokumen Sistem Pengelolaan Sosial dan Lingkungan [102-21][FS5]

Public Consultation on Social and Environmental Management System Document

Sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, IIF mengadakan konsultasi publik mengenai Dokumen Sistem Pengelolaan Sosial Lingkungan (SEMS) tahun 2019. Tujuan dari konsultasi publik ini adalah untuk menyampaikan pemutakhiran dokumen SEMS versi 2019 kepada para pemangku kepentingan dan menerima masukan serta rekomendasi perbaikan.

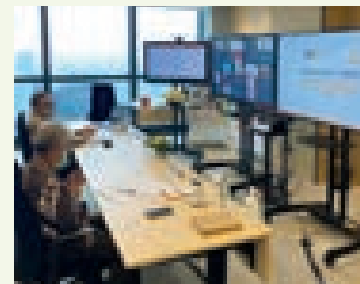
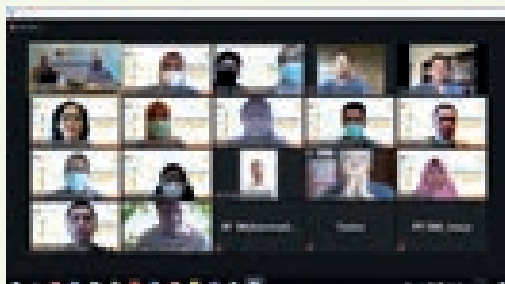
SEMS merupakan bagian dari Operational Manual IIF yang berlaku sejak pendirian IIF. Seiring dengan kebutuhan, pada tahun 2019 berdasarkan rekomendasi dari Pemegang Saham Pendiri, IIF melakukan proses pembaharuan terhadap Dokumen SEMS versi 2014. Proses pembaharuan dilakukan bersama para pemangku kepentingan melalui lokakarya dan diskusi. Pada akhir Februari 2020, Dokumen SEMS yang telah diperbaharui mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Pendiri untuk kemudian dikonsultasikan kepada Publik.

Dikarenakan kondisi pandemi, konsultasi publik baru dapat dilaksanakan secara virtual pada bulan Maret 2021. Pemangku kepentingan yang hadir antara lain: perwakilan dari Kementerian Keuangan, BAPPENAS, OJK, pemegang saham dan kreditur, LSM, akademisi, klien-klien, dan konsultan sosial dan lingkungan IIF.

As a form of commitment to sustainable infrastructure development, IIF held a public consultation on the 2019 Environmental Social Management System (SEMS) Document. The public consultation was held to communicate the 2019 version of the SEMS document update to relevant stakeholders and to receive inputs and recommendations for improvement.

SEMS document has been in effect since IIF establishment and is part of the IIF's Operation Manual. In line with the need for updating, in 2019 as recommended by the Founding Shareholders, IIF conducted an update to the SEMS 2014 version. The updates were made by involving various stakeholders through workshops and discussions. At the end of February 2020, the updated SEMS obtained approval from the founding shareholders for later consultation with the public.

Due to the pandemic, the public consultation was not realized until March 2021 and had to be held virtually. Various stakeholders were invited to attend this event, which includes representatives from the Ministry of Finance, BAPPENAS, OJK, shareholders and creditors, NGOs, academia, IIF's clients, and social and environmental consultants.



PENGEMBANGAN KOMPETENSI TATA KELOLA KEBERLANJUTAN [E.2][102-27]

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi terkait topik keberlanjutan, IIF telah melaksanakan program pengembangan kompetensi selama tahun 2021. Pengembangan kompetensi dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam topik keberlanjutan memiliki kemampuan dan pemahaman mengenai perkembangan ilmu dan isu-isu terkini terkait keberlanjutan.

Program Pengembangan Kompetensi Badan Tata Kelola Tahun 2021 2021 Sustainable Governance Competency Development Program

Peran dan Jabatan Roles and Position	Judul Program Program Title
Dewan Komisaris Board of Commissioners	- Internal Audit National Seminar - Qualified Government Internal Auditor - Certified Professional Management Accountant (CPMA) and Management Accountant Conference
Direksi Board of Directors	- Public Consultation for Social and Environmental Management System ("SEMS") document - Bisnis Indonesia - IIF Webinar - Introducing IIF's Core Value to Achieve Sustainable Infrastructure Development - Sustainability Bond & Framework Workshop by World Bank - PT SMI Webinar Invitation to "Synergy to Restore the Nation" - World Bank Workshop Day 2 – Sustainability Bond Framework and Reporting - Sharing Session on Implementing Regulation of Omnibus Law
	- Conference Climate Change - Preparing for Indonesia's Green and Sustainable Future - UI & SMV - Indonesia Energy Efficiency and Conservation Conference and Exhibition (IEECCE) 2021 - Global Infrastructure Investment Forum - GIIF 2021 - IDX Invitation "ESG and Sustainability Leadership and Journey" - Enlit Asia Digital Festival 2021 "Piecing Together the Finance Puzzle: Local Banks, International Banks, ECAs, DFIs & The Availability of Capital in a Transitioning ASEAN Energy Sector" - METI Talks - New and Renewable Energy Stakeholder - Bioshare Series #3: Webinar on Bioenergy Project Financing in Indonesia - Climate Bonds Initiative Annual Conference 2021 - EnergyTalk Series 12 - "The Deal with Intermittency: Energy Storage Resilience for Solar PV and Solar Park Development Indonesia" - FGD on Overseas Benchmark of Affordable Housing PPP Project - Speaker: IJ ASIA 2021 Virtual Event - Panel IV: Outlining the roadmaps for the development of the Indonesian power sector
Sustainable Finance Working Group	- Social and climate emergency - How intense are ESG risks globally? By Moody's - Sustainability Bond & Framework Workshop by World Bank - Issuer Case Studies: Financing the Green Transition in Emerging Markets - Waste to Energy Short Course by Griffith University - Bisnis Indonesia - IIF Webinar - Introducing IIF's Core Value to Achieve Sustainable Infrastructure Development - Planning and Monitoring Corporate Biodiversity Performance by IUCN - Overview of IFC Performance Standards - 101 - Public Consultation for Social and Environmental Management System ("SEMS") document - ESG Acceleration Webinar: Forward-Looking Materiality by Finch and Beak - ADB Webinar on Updated SPS policy - Community Health and Safety course by Swiss TBH – World Bank - Connecting ESG Assessments into the Credit Portfolio Management - APAC - The Modern Road Ecologist's Toolbox-Emerging Tools and Technologies for Biodiversity Assessments on Linear Transport Projects, MODULE 2 on Managing and Analyzing Biodiversity Data by ADB - The Role of Education in Waste Management and Circular Economy to Drive Behavioural Change - Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) Training - BNP Paribas Sustainable Future Forum Corporate Access Days - Ministry of Finance Discussion: Establishing ESG Policy and Procedure

MANAJEMEN RISIKO PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [E.3]

Pengelolaan risiko yang dilakukan oleh IIF melalui unit manajemen risiko bersifat menyeluruh atas setiap aktivitas usahanya, di mana setiap tahapan pengelolaannya diatur secara sistematis dan efektif yang memungkinkan adanya proses umpan balik yang berkesinambungan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, IIF melakukan prinsip tiga

SUSTAINABLE GOVERNANCE COMPETENCY DEVELOPMENT [E.2][102-27]

To enhance the knowledge and competency in sustainability topics, IIF implemented a competency development program in 2021. The program was run so everyone in charge of sustainability topics would have the competence in and understanding of knowledge developments and the latest sustainability-related issues.

RISK MANAGEMENT OF SUSTAINABLE FINANCIAL IMPLEMENTATION [E.3]

IIF runs a comprehensive risk management through the risk management unit in each of its business operations, where each stage is systematically and effectively regulated to allow a continuous process of getting feedback. In running business operations, IIF applies the principle of three lines of defense

lini pertahanan (*three lines of defense*) yang terdiri dari unit bisnis, unit manajemen risiko, dan unit audit internal. [102-11]

Dalam proses pengambilan keputusan, unit bisnis menjadi lini pertahanan terdepan, sedangkan unit manajemen risiko menjadi lini pertahanan kedua. Selanjutnya, proses ini diperkuat oleh lini pertahanan ketiga yaitu unit audit internal. Disamping penerapan tiga lini pertahanan, beberapa komite yang dibentuk pada tingkat Direksi dan Komisaris ikut terlibat dalam berbagai aspek pengelolaan risiko dan inisiatif bisnis, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan. Strategi ini secara keseluruhan adalah bagian dari konsep *four-eyes-principle* dan pembagian tugas yang secara konsisten diterapkan IIF sebagai wujud komitmen untuk mencapai pengembangan bisnis yang optimal. [E.3][102-11]

Beberapa inisiatif yang sudah dilakukan oleh Direktorat Manajemen Risiko pada tahun 2021 dalam hal menyempurnakan pengelolaan risiko yang sudah ada, terutama untuk menangani dampak dari Pandemi COVID-19 sekarang ini di antaranya adalah:

1. Dari segi pengelolaan risiko kredit dan pembiayaan, IIF terus melakukan proses pemantauan ketat atas portofolio investasinya dalam hal mengukur potensi dampak buruk yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19, terutama dengan adanya perlambatan ekonomi dan penurunan kinerja bisnis. Penurunan kinerja ini mengakibatkan adanya kenaikan risiko kredit dari portofolio IIF walau tidak secara signifikan dibanding dengan kenaikan risiko yang terlihat pada tahun 2020. Sejak tahun lalu penurunan kinerja dari beberapa nasabah terdampak sudah dimitigasi dengan memberikan relaksasi kredit yang merujuk kepada Peraturan OJK (yang baru diberlakukan tahun 2020 dan diperpanjang sampai April 2022). Peraturan tersebut merupakan salah satu usaha proaktif pemerintah dalam membantu pemulihan ekonomi, khususnya membantu likuiditas dan kinerja debitur yang terdampak. Hal ini terbukti efektif, di mana IIF menilai bahwa saat ini keseluruhan portofolio IIF masih dinilai berkelanjutan.
2. Sejalan dengan naiknya risiko kredit dari portofolio IIF yang disebabkan oleh COVID-19, IIF memperketat Pemantauan secara periodik terhadap portofolio pembiayaan yang prosesnya terus disempurnakan dengan memperkenalkan *Early Warning System* dan *Watch List* guna mendeteksi perubahan (penurunan) kualitas kredit sejak dini. Jika terjadi penurunan kualitas kredit yang cukup ekstrem dan fundamental dan tidak bersifat sementara maka pemantauan yang lebih intensif akan dilakukan oleh unit kerja khusus untuk melakukan tindakan pemulihan yang dianggap perlu. Proses pemantauan ini sudah tertuang di dalam SOP Kredit.
3. IIF telah melakukan pengembangan *automated database* dalam rangka pemantauan pemenuhan janji-janji finansial atau laporan, termasuk kondisi-kondisi yang disyaratkan Komite Kredit atau yang tertuang di dalam Fasilitas Kredit, yang sekarang dilakukan secara terintegrasi antara unit bisnis, risiko kredit dan *Credit Operation* yang dapat membantu memberikan indikasi atas adanya penurunan

consisting of a business unit, a risk management unit, and an internal audit unit. [102-11]

In the decision-making process, the business unit acts as the front line of defense, while the risk management unit act as the second line of defense. The entire process is backed by the third line of defense, the internal audit unit. In addition to the implementation of the three lines of defense, the process also involves Board of Directors and Commissioners committees in various aspects, from risk management and business initiatives, decision making, to supervision. This strategy as a whole is part of the four-eyes-principle concept and segregation of duty that IIF has consistently implemented as a form of commitment to achieve optimal business development. [E.3][102-11]

Elaborated below are initiatives that the Risk Management Directorate took in 2021 to improve IIF existing risk management, especially in dealing with the impact of the current COVID-19 Pandemic:

1. In terms of credit and financing risk management, IIF continued to closely monitor its investment portfolio by measuring the potential severe repercussions of the COVID-19 Pandemic, especially the subsequently economic slowdown and weaker business performance. This weaker performance had presented an increased credit risk in IIF portfolio although the increase was not as significant as the one seen in 2020. Since last year, IIF has mitigated the decline in the performance of some affected customers by providing credit relaxation which refers to the OJK Regulation (which was enacted in 2020 and extended until April 2022). This regulation is one of the government's proactive efforts to push economic recovery, in particular, in helping affected debtors to have liquidity and improve performance. The mitigation has proven effective as IIF considers that to date, all of its current portfolio is sustainable.
2. In line with increased credit risk in IIF's portfolio caused by COVID-19, IIF has done closer periodic monitoring on the portfolio and improved financing process by introducing an *Early Warning System* and *Watch List* to detect early if there is changes (decreases) in credit quality. If the change is quite extreme and fundamental and not temporary, IIF will have a special work unit do more intensive monitoring and take necessary recovery actions. This monitoring process has been stated in the Credit SOP.
3. IIF has developed an automated database system in order to monitor the fulfillment of financial and non-financial covenants, and certain conditions certain conditions required by the Credit Committee or contained in the Credit Facility, which is now carried out in an integrated manner between business units, credit risk and credit operations to help identify any possible decline in credit

kualitas kredit. Selanjutnya, *database* ini akan mencakup pemantauan *Action List* dari Komite Kredit yang merupakan daftar hal yang harus dipenuhi oleh Tim Investasi dan Kredit sebagai bagian dari syarat persetujuan Kredit.

4. IIF telah menyiapkan kerangka kerja untuk *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) dan mulai melakukan RCSA untuk unit bisnis dan fungsional utama. RCSA adalah kerangka penilaian risiko operasional untuk mengelola risiko operasional dalam suatu organisasi. RCSA akan diperbarui setidaknya setiap tahun untuk memeriksa relevansinya dengan lingkungan operasi internal dan eksternal saat ini.
5. *Compliance checklist*. IIF telah memiliki kebijakan terkait kerangka kerja kepatuhan dan selalu melakukan peninjauan kelengkapan *compliance checklist* yang memuat janji-janji (*covenants* dan *undertaking*) dan persyaratan kepatuhan terkait regulasi fasilitas pinjaman, perjanjian dengan pemegang saham, dan *Operation Manual* yang harus dipenuhi untuk memastikannya terkini dan komprehensif. Pemantauan atas pemenuhan dan kelengkapan *compliance checklist* tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu, IIF telah melakukan pengembangan sistem *compliance checklist* dengan menyertakan akuntabilitas pembagian tugas antara *maker* dan *checker* yang lebih jelas.
6. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran No.27/SEOJK.05/2021 atas peraturan No 46/POJK.05/2020, IIF telah menyiapkan Laporan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan dan kerangka kerja yang dapat menghasilkan pengawasan dan kontrol yang efektif atas pemenuhan pelaporan sesuai dengan Surat Edaran No.27/SEOJK.05/2021 terutama yang terkait OJK No 46/POJK.05/2020 yang diterbitkan untuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Finalisasi dan pelaporan akan dilakukan di awal tahun 2022 dan pelaporan ke OJK ditargetkan paling lambat tanggal 15 Februari 2022.
7. Perusahaan secara proaktif melakukan *monitoring* dan kajian terhadap perkembangan pasar yang dapat berdampak pada meningkatnya profil risiko perusahaan dan portfolio asetnya. Dalam mengantisipasi penghentian menyeluruh di 2023 atas penggunaan suku bunga acuan LIBOR di pasar, misalnya, perusahaan telah membentuk LIBOR Transition Working Group (LTWG) untuk menyiapkan kerangka kerja dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan proses transisi ke suku bunga acuan alternatif berjalan lancar dan risiko-risiko teridentifikasi dan termitigasi dengan baik.

Dalam hal risiko sosial dan lingkungan atas proyek-proyek yang dibiayai, IIF memiliki standar dan Prinsip S&E yang menjadi landasan untuk pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. IIF berupaya melakukan penerapan prinsip kehati-hatian (*Precautionary Principle*) dengan memastikan pembiayaan yang dilakukan oleh IIF telah memenuhi ketentuan dan persyaratan lingkungan, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta sosial yang berlaku. **[E.3][102-11]**

quality. Furthermore, the system will include monitoring the Action List from the Credit Committee, which gives certain requirements that the Investment and Credit Team must meet as part of the credit approval requirements.

4. IIF has prepared a framework for Risk Control Self-Assessment (RCSA) and has started conducting RCSAs for key business and functional units. RCSA is an operational risk assessment framework for managing operational risk within an organization. The RCSA will be updated at least annually to check its relevance to the current internal and external operating environment.
5. Compliance checklist. IIF already has a policy related to the compliance framework and always reviews the completeness of the compliance checklist that contains the promises (*covenants* and *undertakings*) and compliance requirements related to loan facility regulations, agreements with shareholders, and the Operation Manual that must be fulfilled to ensure that it is not only current but also comprehensive. The compliance and adequacy of the compliance checklist is routinely monitored. IIF has developed a compliance checklist system that includes clearer accountability for the segregation of duty between makers and checkers.
6. With the issuance of the Circular Letter No.27/SEOJK.05/2021 on regulation No.46/POJK.05/2020, IIF has initiated the preparation on the Report with regard to self-assessment on Soundness Rating and a framework to support an effective compliance with regulatory reporting governed in Circular Letter No.27/SEOJK.05/2021 that has been issued for Infrastructure Financing Companies. Finalization on the report will be done at the beginning of 2022 with submission target to OJK the latest 15 February 2022.
7. The Company proactively monitors and reviews market developments that may increase its risk profile and asset portfolio. To anticipate the discontinuation of the use of the LIBOR benchmark interest rate in the market by 2021, for example, the Company has formed a LIBOR Transition Working Group (LTWG) to prepare a framework and take the necessary steps to ensure the transition process to an alternative benchmark interest rate runs smoothly and that all risks are identified and properly mitigated.

In terms of the social and environmental risks of the projects it finances, IIF has S&E standards and principles that form the basis for sustainable development to allow a balanced approach towards the economic, social and environmental aspects. IIF seeks to implement the precautionary principle by ensuring that all financings it distributes have complied with the applicable environmental, security, occupational health and safety, and social regulatory provisions. **[E.3][102-11]**

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO [E.3][102-30]

Untuk memantau manajemen risiko kegiatan bisnis, IIF telah membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee - RMC*) yang aktif memantau dan memberikan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan dan strategi manajemen risiko IIF. Komite ini beranggotakan lima anggota Direksi yang dipimpin oleh Presiden Direktur dan Chief Executive Officer (CEO).

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko antara lain:

1. Memberikan rumusan strategis kebijakan dan kerangka kerja Manajemen Risiko, termasuk penetapan batas kerangka kerja dan perumusan rencana darurat untuk kondisi yang merugikan;
2. Mengawasi proses evaluasi dan pengelolaan komposisi risiko secara keseluruhan dalam portofolio IIF, meminimalisir risiko potensial di proyek maupun di tingkat portofolio, mengembangkan budaya Manajemen Risiko di semua tingkatan, dan memastikan bahwa Departemen Manajemen Risiko mampu melakukannya secara mandiri;
3. Menyelidiki, menganalisis, dan mengambil Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan masalah yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur pada umumnya;
4. Mengevaluasi proposal terkait aktivitas dan produk baru, mengukur keinginan dan kapasitas IIF dalam melakukan aktivitas dan produk baru melalui perspektif risiko, serta mengevaluasi proposal untuk perubahan terkait kebijakan dan prosedur;
5. Memantau kecukupan modal IIF terhadap risiko yang diidentifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan toleransi risiko Perusahaan;
6. Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, merumuskan perubahan yang diperlukan untuk kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang ada, mengevaluasi kecukupan pengendalian internal, dan meninjau laporan *Management Information System (MIS)* secara reguler;
7. Melakukan tinjauan rutin untuk mengevaluasi kesesuaian metodologi penilaian risiko;
8. Mengkaji dan menyetujui Laporan Manajemen Risiko Triwulanan yang dihasilkan oleh Departemen Manajemen Risiko;
9. Meninjau dan mengusulkan perubahan apa pun, jika diperlukan, pada parameter atau indikator risiko apa pun kepada Komite Pemantau Risiko untuk persetujuan lebih lanjut oleh Dewan Komisaris.
10. Terkait dengan Pencegahan Kecurangan dan Korupsi, RMC bertanggung jawab untuk: **[205-1]**
 - a) Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan etika karyawan atas penipuan (kecurangan) dan korupsi;
 - b) Meninjau penilaian risiko kecurangan dan korupsi untuk seluruh lingkup Perseroan sebagaimana

OVERVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM [E.3][102-30]

To monitor its business risk management, IIF has set up a Risk Management Committee (RMC) who does an active oversight and gives recommendations in the formulation of IIF's risk management policies and strategies. This committee is made up of five members of the board of directors led by the President Director and Chief Executive Officer (CEO).

The following are the duties and responsibilities of RMC:

1. Deliver the strategic formulation of Risk Management policies and frameworks including setting the framework limits and the formulation of contingency plans in situations or conditions that may be detrimental to the Company;
2. Oversee the evaluation process and management of the overall risk composition in IIF portfolio, minimize potential risks at the project and at the portfolio level, develop a Risk Management culture at all levels, and ensure that the Risk Management Department is able to do it independently;
3. Investigate, analyze, and take necessary actions in relation to issues related to business decisions that deviate from general procedures;
4. Evaluate proposals related to new activities and products, measuring IIF's intention and capacity to carry out activities and manage new products through a risk perspective, as well as evaluating proposals related to changes in policies and procedures;
5. Monitor IIF's capital adequacy against identified risks in accordance with applicable regulations and the Company's risk tolerance;
6. Evaluate the effectiveness of Risk Management policies and procedures, formulate necessary changes related to existing Risk Management policies and procedures, evaluate the adequacy of internal control, and review Management Information System (MIS) reports on a regular basis;
7. Make regular reviews to evaluate the suitability of the risk assessment methodology;
8. Review and approve the Quarterly Risk Management Report produced by the Risk Management Department;
9. Review and propose changes to the Company's risk parameters or indicators to the Risk Monitoring Committee for further approval from the BoC;
10. Regarding the Prevention of Fraud and Corruption, the RMC is responsible for: **[205-1]**
 - a) Developing strategies in order to increase employee awareness and ethics on fraud (fraud) and corruption;
 - b) Reviewing the risk assessment of fraud and corruption within the scope of the Company which has been

disusun oleh Direktorat Manajemen Risiko setidaknya tiga tahun sekali, atau setelah terjadinya perubahan struktural atau fungsional yang signifikan di IIF;

- c) Menentukan strategi pengendalian penipuan dan korupsi untuk mengatasi risiko yang diidentifikasi diidentifikasi melalui penilaian risiko atas penipuan dan korupsi atas penipuan dan korupsi;
- d) Memastikan setiap karyawan dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing menerima pelatihan peningkatan kesadaran atas penipuan dan korupsi dan memahami Kode Etik IIF;
- e) Merekomendasikan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk deteksi dan pencegahan penipuan dan korupsi; dan
- f) Meninjau dan memperbarui kebijakan dan prosedur apabila diperlukan namun setidaknya setiap dua tahun sekali untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip, standar, dan praktik terbaik dalam pencegahan penipuan dan korupsi.

Sepanjang tahun 2021, ROC telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. ROC melakukan evaluasi berkala atas seluruh parameter risiko utama yang dihadapi Perusahaan, termasuk kecukupan kebijakan manajemen risiko dan langkah-langkah mitigasi yang diterapkan oleh Manajemen.
2. ROC menyetujui dan mengawasi kemajuan berbagai inisiatif maupun rencana kerja divisi Manajemen Risiko dalam menjaga profil risiko dan tingkat kesehatan Perusahaan.
3. ROC menyetujui penerapan inisiatif *Early Warning System (EWS)* – *Credit Risk* sebagai mekanisme pengendalian risiko kredit secara regular untuk mengidentifikasi, mengawasi lebih ketat dan menjaga debitur berkualitas buruk atau berpotensi memburuk supaya tidak masuk dalam kategori kredit bermasalah atau pun macet dan akhirnya berdampak terhadap profitabilitas Perusahaan.
4. ROC menyetujui kajian *stress test* atas keseluruhan portofolio investasi Perusahaan dengan asumsi pandemi COVID-19 berkelanjutan dan dampaknya terhadap potensi penambahan total provisi. ROC juga merekomendasikan pengawasan lebih ketat atas perkembangan semua akun-akun yang terdampak dan bermasalah, dan menyetujui rencana pengembangan aset yang lebih terfokus pada sektor dengan paparan risiko rendah terhadap pandemi COVID-19.
5. ROC menyetujui kajian dan proposal perubahan *Portfolio Control Limit* untuk mengakomodasi dinamika lingkungan bisnis dan *Risk Appetite* perseroan.

prepared by the Directorate of Risk Management at least once every three years, or after significant structural or functional changes have occurred at IIF;

- c) Determining fraud and corruption control strategies to address the risks identified by Fraud and Corruption Risk Assessment;
- d) Ensuring that every employee within the scope of their respective responsibilities receives adequate training in order to raise their awareness of fraud and corruption and so they can better understand the IIF Code of Ethics;
- e) Recommending appropriate policies and procedures to detect and prevent fraud and corruption; and
- f) Reviewing and updating other policies and procedures as necessary at least every two years. This is done to ensure the alignment of the existing internal policies and procedures with the principles, standards and best practices in order to prevent fraud and corruption.

Throughout 2021, RMC carried out its duties and responsibilities, including:

1. RMC made periodic evaluations of all the main risk parameters faced by the Company, including the adequacy of risk management policies and mitigation measures implemented by Management.
2. RMC approved and oversaw the progress of various initiatives and work plans of the Risk Management division in maintaining the Company's risk profile and healthiness.
3. RMC approved the implementation of the Early Warning System (EWS) – Credit Risk initiative as a credit risk control mechanism on a regular basis to identify, closely monitored and safeguarded debtors showing deteriorating or potentially deteriorating credit quality, so they would not fall under non-performing or troubled loans category which could have an impact on Company profitability.
4. RMC approved a stress test review of the Company's entire investment portfolio, presuming that the COVID-19 pandemic would be persisting and how it would create the need of additional provisions. The RMC also recommended closer monitoring on the progress of all affected and troubled accounts and approved an asset development plan that was more focused on sectors with low risk exposure to the COVID-19 pandemic.
5. RMC approved the study and proposal for changes in Portfolio Control Limit to accommodate dynamic business environment and the Company's Risk Appetite.

TANTANGAN PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [E.5]

Tantangan yang dihadapi IIF dalam melaksanakan RAKB diantaranya adalah apabila terjadi perubahan arahan atau regulasi dari pemerintah terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan. Untuk mengatasi hal tersebut, IIF akan menjalin

CHALLENGES OF SUSTAINABLE FINANCE APPLICATION [E.5]

IIF faces many challenges in implementing the RAKB, including regulatory changes by the government related to the implementation of sustainable finance. To overcome this specific challenge, IIF will communicate routinely with stakeholders and

komunikasi secara rutin dengan para pemangku kepentingan maupun pejabat terkait yang menerapkan regulasi untuk dapat mengetahui arah kebijakan selanjutnya dan sedapat mungkin melakukan penyesuaian pada aksi keuangan berkelanjutan IIF. IIF juga akan senantiasa menyambut undangan untuk terlibat sebagai tim teknis dalam proses penyusunan regulasi terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu dalam hal pengembangan produk dan jasa keuangan berkelanjutan, tantangan yang dihadapi antara lain adalah terkait dengan dinamika ekonomi Indonesia, perubahan tren preferensi produk, penerapan Prinsip S&E, dan pemulihan dari pandemi COVID-19 yang terjadi sejak 2020. Perubahan ekonomi Indonesia dapat mempengaruhi kondisi ekonomi secara makro serta performa IIF yang selanjutnya dapat meningkatkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Tantangan selanjutnya adalah terkait perubahan tren, dimana terdapat tantangan perubahan preferensi debitur dan produk investasi yang tersedia dipasar sektor infrastruktur khususnya pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

IIF juga menyadari bahwa diperlukan usaha yang lebih untuk meningkatkan kesadaran debitur maupun masyarakat umum terkait dengan implementasi Prinsip S&E. Untuk menghadapi hal tersebut, IIF akan memberikan asistensi dan sosialisasi kepada calon debitur maupun debitur dalam penerapan 8 Prinsip S&E. Tantangan lain yang dihadapi adalah terkait dengan pemulihan dari pandemi COVID-19, dimana IIF perlu untuk mempersiapkan kembali sumber daya manusia yang ada untuk bersiap menyambut tantangan serta akselerasi bagi perkembangan sektor keuangan nasional.

KODE ETIK [F.1][102-16][102-17]

IIF memiliki ruang lingkup kode etik yang mengatur berbagai hal terkait tata cara kerja, pola hubungan di internal maupun eksternal, serta komitmen perusahaan terkait masalah lingkungan dan kesehatan. Adapun isi Kode Etik sebagai berikut:

- **Melakukan Usaha dengan Taat Hukum dan Beretika**
Kebijakan yang tercantum dalam Etika Bisnis IIF merupakan panduan bagi Perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Dalam kebijakan ini dinyatakan bahwa semua kegiatan usaha harus dipandu oleh nilai-nilai mendasar IIF, yakni integritas dan kejujuran yang tak tergoyahkan, mencakup integritas, kewajaran, hormat, kepedulian, dan pertanggungjawaban pribadi. Selain menjadi panduan dalam pengambilan keputusan beretika sehari-hari, nilai-nilai ini juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap etika personal, seperti penerimaan hadiah, pengungkapan kekayaan pribadi, sikap politik dan donasi, serta kepatuhan terhadap panduan Anti-Korupsi dan Pencegahan Penipuan.

relevant officials who are tasked with enforcing the regulations so IIF will know in advance the Government policy direction and make adjustments to its sustainable financial actions wherever possible. IIF will always attend a relevant event to which it is invited as a technical team in the process of drafting regulations related to the implementation of sustainable finance in Indonesia.

IIF also faces challenges in developing sustainable financial products and services including those related to the dynamics of the Indonesian economy, product preference, the application of S&E Principles, and economic recovery from the COVID-19 pandemic that has been going on since 2020. Changes in the Indonesian economy can affect macroeconomics conditions and IIF's performance which will eventually lead to increased credit risk, market risk, and operational risk. The next challenge is related to changing trends, where debtor preferences with regards to investment products available in the infrastructure sector, especially in infrastructure financing in Indonesia, have changed.

IIF also realizes that it has to do more to increase the awareness of debtors and the general public of the implementation of the S&E Principles. To deal with this trend, IIF will give assistance and socialization to prospective debtors and debtors on 8 S&E Principles. Another challenge faced is related to the recovery from the COVID-19 pandemic, where IIF needs to re-prepare its existing human resources so they are ready for every emerging challenge and accelerate the development of the national financial sector.

CODE OF ETHICS [F.1][102-16][102-17]

IIF has a code of ethics that governs matters pertaining to work procedures, internal and external relationship, and commitment to address environmental and health issues. The contents of the Code of Ethics are as follows:

- **Run Ethical and Law-Abiding Business**
The policies contained in IIF's Business Ethics offer guidelines to the Company in running daily business operations. The policy states that all of its business operations shall be based on IIF's basic values, namely integrity, fairness, mutual respect, caring, and personal responsibility. In addition to serving as guidelines in the day-to-day ethical decision-making process, these values are also related to adherence to personal ethics, such as the acceptance of gifts, disclosure of personal wealth, political attitudes and donations, as well as adherence to Anti-Corruption and Fraud Prevention guidelines.

- **Kebijakan Informasi, Pengendalian Internal, dan Pelaporan Keuangan**

Untuk melindungi sekaligus mengawal asset dan reputasi IIF, Perusahaan berlandaskan pada kebijakan konflik kepentingan, kebijakan sumber daya elektronik, perlindungan data dan kebijakan keamanan, perdagangan efek, informasi *inside trader*, pengendalian internal, pelaporan keuangan, serta retensi dokumen dan *auditing*.

- **Benturan Kepentingan**

Dalam melakukan kegiatan usaha dan melaksanakan tugas, baik segenap karyawan maupun perwakilan IIF, harus bebas dari benturan kepentingan mengingat hal ini dapat berpengaruh buruk pada keputusan, objektivitas, atau kesetiaan mereka pada Perusahaan. **[102-25]**

Seluruh proyek yang memiliki potensi konflik kepentingan juga akan menjadi subyek dari proses persetujuan sesuai dengan limit kewenangan. Jika klien meminta IIF untuk memberikan kombinasi jasa *advisory* dan pembiayaan, IIF akan: **[102-25]**

- a) Memberikan penjelasan kepada klien terkait;
 - i. Sifat umum dan/atau sumber konflik kepentingan yang ada pada saat ini maupun potensial;
 - ii. Dalam kasus pembiayaan, preferensi IIF adalah untuk terlibat secara non-eksklusif, untuk memungkinkan memberikan penawaran pembiayaan yang sama kepada klien lain.
- b) Membentuk kebijakan, prosedur, dan prinsip-prinsip pemisahan wewenang dan tanggung jawab ("*Chinese Walls*") jika diperlukan.

- **Kebijakan Sumber Daya Elektronik**

Kebijakan ini mengatur bahwa penggunaan semua sumber daya elektronik tidak melanggar hukum dalam Kebijakan Perilaku Usaha IIF. Semua karyawan IIF harus melindungi sumber daya elektronik IIF dari penggunaan tanpa izin dan dari ancaman keamanan.

- **Keamanan Informasi dan Kebijakan Kerahasiaan**

Segeanap karyawan dan perwakilan IIF bertanggung jawab untuk melindungi informasi rahasia dari IIF terhadap pengungkapan tanpa izin, entah pengungkapan tersebut bersifat internal atau eksternal, sengaja atau kebetulan. IIF juga menghormati kerahasiaan dan sensitivitas informasi yang bukan milik IIF. Merupakan kebijakan IIF untuk hanya menggunakan sarana yang legal dan beretika untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi bisnis dan pasar dengan tujuan memahami secara lebih baik tentang pasar, pelanggan, dan pesaing. IIF tidak mengumpulkan atau menggunakan informasi rahasia milik pihak lain tanpa pemberian izin secara eksplisit oleh pihak tersebut.

- **Pengendalian Internal, Pelaporan Keuangan, Retensi Dokumen dan Kebijakan Audit**

Manajemen IIF bertanggung jawab untuk mempersiapkan Laporan Keuangan tahunan dan triwulan yang lengkap

- **Information Policy, Internal Control, and Financial Reporting**

In order to give protection and safeguard its assets and reputation, IIF's management shall always base its management on a conflict of interest policy, electronic resources policy, data protection and security policy, securities trading, insider trading information, internal control, financial reporting, as well as document retention and auditing.

- **Conflict of Interest**

In carrying their business activities and daily tasks, all of IIF's employees and representatives shall act independently and free from conflicts of interest to avoid bad influence in the decision-making process, on objectivity, or on their loyalty to the Company. **[102-25]**

Projects deemed to have potential conflict of interest will also be subject to an approval process depending on the scope of authority. If a client requests IIF to provide a combination of advisory and financing services, IIF will: **[102-25]**

- a) Give explanation to the referred client on;
 - i. The general nature and/or sources of current or potential conflicts of interest;
 - ii. In the case of financing, IIF has a preference to engage on a non-exclusive basis, to enable providing the same financing offer to other clients.
- b) Set policies, procedures, and principles of separation of authority and responsibility ("*Chinese Walls*") if necessary.

- **Electronic Resources Policy**

This policy stipulates that the use of all electronic resources within the scope of the Company shall be law-abiding as stipulated in IIF Business Conduct Policy. However, all IIF employees must protect IIF's electronic resources from unauthorized use and security threats.

- **Information Security and Privacy Policy**

All employees and representatives of IIF are responsible for keeping the confidentiality of IIF's information from unauthorized disclosure, whether it is internal or external, intentionally or coincidentally. In the same context, IIF also respects the confidentiality and sensitivity of all information that does not belong to IIF. It is also a policy of IIF to use only legal and ethical means to collect and use business and market information in order to get more insights to the market, customers and competitors. IIF shall never collect or use confidential information that belongs to other parties without their explicit permission.

- **Internal Control, Financial Reporting, Document Retention and Audit Policy**

The management of IIF is responsible for preparing comprehensive and accurate annual and quarterly

dan akurat sesuai dengan prinsip-prinsip *accounting* Indonesia yang diterima luas dan IFRS. Hal ini demi mempertahankan prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan akuntansi dan pelaporan Keuangan yang sesuai dan pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar, hukum, dan regulasi terkait akuntansi.

IIF mematuhi kebijakan dari semua pihak yang bertanggung jawab untuk ketepatan, kelengkapan, dan ketepatan waktu terkait informasi keuangan yang aktual dan bersifat prediksi dan atas kepatuhan terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan, pengendalian, dan prosedur pengungkapan, retensi dokumen, dan kebijakan akuntansi. IIF memastikan adanya kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan ini melalui kegiatan Auditor Internal dan auditor independen, dan melalui mekanisme pemantauan internal.

Keamanan informasi juga harus mencakup perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dari berbagai divisi. Kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara divisi yang berbeda yang mungkin sedang memberikan layanan *Advisory* dan yang melakukan transaksi pendanaan.

- **Hormati Individu dan Masyarakat**

Sikap hormat kita kepada individu dan lingkungan merupakan bagian dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam 8 Prinsip S&E, yang membedakan IIF dari lembaga keuangan lainnya di Indonesia. IIF juga berupaya untuk memperoleh dan mempertahankan talenta terbaik dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan memberikan *reward* yang layak kepada para karyawan dan perwakilannya. Semua upaya ini dituangkan ke dalam kebijakan-kebijakan berikut:

- a. Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan
IIF berkomitmen memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan, dan semua karyawan bertanggung jawab mendapatkan pengetahuan mengenai hukum dan regulasi yang berlaku terkait Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan dan menaatinya. Manajemen IIF bertanggung jawab memberikan pelatihan bagi semua karyawan mengenai hukum dan kebijakan yang relevan.
- b. Kebijakan Mengenai Pelecehan
IIF berkomitmen memberikan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk perilaku yang tidak pantas dan pelecehan berdasarkan usia, cacat tubuh, status pernikahan, ras atau warna kulit, asal usul negara, agama, seks, orientasi seksual, atau identitas gender. Setiap karyawan harus memahami bahwa tindakan pelecehan dan perilaku tidak pantas tidak akan ditoleransi di IIF.

Financial Statements in accordance with the principles and Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia. IIF is committed to complying with the policies of all parties responsible for the completeness and timeliness of the actual and projected financial information and/or in connection with IIF's compliance with internal control over financial reporting, control and disclosure procedures, document retention, and accounting policies.

IIF ensures compliance with these policies through the activities of Internal Auditors and independent auditors, as well as through internal monitoring mechanisms. Information security must also consider the protection of confidential information from various divisions. IIF is aware that there is always a potential conflict of interest between the Advisory Division that is offering consulting services and a counterpart Division that is in charge of making financing transactions.

Information security must also include the protection of confidential information from various divisions. There may be a conflict of interest between a division that is providing Advisory services and another division that conducts financing transactions.

- **Respect Individuals and Society**

Respect for others and the society in general is part of the principles contained in IIF's Eight Principles, which distinguish the Company from other financial institutions in Indonesia. IIF is continuously seeking to recruit and retain the best talents by providing a safe, healthy work environment, and providing proper rewards to the employees and representatives. All of these efforts are embodied in the following policies:

- a. Environment, Safety, and Health
IIF is committed to providing a safe and healthy work environment for all employees. However, each employee also has self-responsibility to update their knowledge about all applicable laws and regulations related to Environment, Safety, and Health and comply with each one of them. IIF management is responsible for providing trainings for all employees on relevant laws and policies.
- b. Policy Regarding Harassment
IIF is committed to providing a work environment that is free from all forms of inappropriate behavior and acts of harassment, and ensures that it is free from prejudice against age, disability, marital status, race or color, national origin, religion, sex, sexual orientation, or gender. It should be every employee's understanding that IIF will never tolerate any form of harassment and inappropriate behavior.

• Kebijakan Privasi

IIF memberikan nilai signifikan pada upaya memperoleh dan mempertahankan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, klien, mitra usaha, dan orang lain yang membagikan informasi pribadi mereka dengan IIF. Oleh karena itu, IIF sepenuhnya mematuhi kebijakan tentang kepatuhan terhadap semua hukum terkait privasi dan perlindungan data.

• Perilaku dengan Mitra Usaha dan Pihak Ketiga

IIF mematuhi semua hukum terkait anti-suap yang berlaku dan secara akurat membukukan semua transaksi dalam pembukuannya. Aksi penyuapan didefinisikan sebagai tindakan menawarkan, memberi izin atau memberikan sesuatu yang bernilai kepada Pejabat Pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung dengan maksud mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mendapatkan keuntungan yang tidak pantas, yakni persetujuan kenaikan harga, pemberian kontrak, pemberian izin operasi, persetujuan atas penggunaan/registrasi produk, vonis pengadilan yang menguntungkan, atau penyelesaian sengketa perpajakan. IIF mematuhi kebijakan untuk menjalankan kontraknya dengan pemerintah dan melakukan sub-kontrak bisnis dengan kepatuhan yang ketat pada hukum dan regulasi nasional, negara, provinsi, dan lokal yang berlaku dan pada semua persyaratan kontrak.

• Privacy Policy

IIF places significant value on earning and keeping the trust of its stakeholders, including employees, clients, business partners and others who share their personal information with IIF. Therefore, IIF fully complies with its policy to comply with all laws regarding privacy and data protection.

• Behavior with Business Partners and Third Parties

IIF complies with all regulations and provisions governing anti-bribery practices and accurately keeps records of all transactions. Bribery is defined as an unlawful act of offering, permitting or giving anything of value to a Government Official either directly or indirectly with the intention of gaining or retaining business, or obtaining an improper advantage, i.e. approval of price increases, awarding of contracts, granting of operating licenses, approval of product use/registration, favorable court verdict, or tax dispute resolution. IIF adheres to a policy of executing its government contracts and sub-contracting business and does that in full compliance with applicable national, state, provincial and local laws and regulations and with all contract terms.

KEBERLAKUAN DAN PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Kode Etik IIF berlaku penuh bagi seluruh personil IIF, baik anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, hingga pejabat dan karyawan. Setiap karyawan baru akan diberikan sosialisasi terkait Kode Etik dan diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan bahwa karyawan tersebut telah membaca dan memahami isi Kode Etik IIF. IIF juga mengimbau kepada semua pihak yang berkepentingan untuk selalu mematuhi peraturan hukum ataupun norma yang berlaku baik di skala internasional, nasional, hingga skala lokal dan dimanapun tempat mereka beroperasi.

IIF juga mempublikasikan dokumen Kode Etik Perusahaan pada situs web IIF yang dapat diakses di: <https://iif.co.id/id/hubungan-investor/tata-kelola-perusahaan/dokumen-lain/>

UPAYA PENEGAKAN DAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

IIF telah menetapkan sanksi tegas untuk para pelaku pelanggaran Kode Etik. Bagi karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik maupun tindakan kriminal, IIF akan memberikan tindakan disiplin internal, yang dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, sampai pemutusan hubungan kerja. Adapun pada tahun 2021, tidak terdapat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh karyawan IIF.

ENFORCEMENT AND DISSEMINATION OF THE CODE OF ETHICS

The Code of Ethics of IIF is without exception applicable to all IIF employees, including members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, executive management and employees. All new employees will be socialized about the Code of Ethics and are required to sign a statement that says they have read and comprehended the contents of the IIF Code of Ethics. IIF also appeals to all interested parties to always comply with applicable legal regulations or norms at the international, national, to local scales and wherever they operate.

IIF publishes its Code of Ethics document on its official website at: <https://iif.co.id/id/jualan-investor/tata-kelola-corporate/document-lain/>

ENFORCEMENT EFFORTS AND SANCTIONS FOR VIOLATION OF THE CODE OF ETHICS

IIF has set strict sanctions anyone proven to have violated the Code of Ethics. IIF will provide internal disciplinary action to employees who are proven to have violated the Code of Ethics or other acts of crime either through verbal warnings, written warnings, to employment termination. In 2021, none of IIF employees committed violations of the Code of Ethics.

KEBIJAKAN DAN PRAKTIK ANTI-KORUPSI

Korupsi dan penipuan merupakan ancaman yang berbahaya bagi dunia usaha bahkan sudah dianggap sebagai sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan korupsi dan penipuan sangat merugikan bangsa dan negara sehingga telah dikategorikan sebagai kejahatan tingkat berat. Korupsi juga dinilai dapat memberikan citra yang buruk bagi perusahaan dan berdampak pada ekonomi maupun operasional perusahaan secara keseluruhan. [103-1]

Oleh karena itu, IIF menjunjung tinggi integritas dan tidak menoleransi praktik korupsi dalam semua aktivitas dan interaksinya dengan semua pemangku kepentingannya. Untuk memastikan hal tersebut, IIF telah melakukan penilaian terhadap seluruh kegiatan operasional dan proyek-proyek yang memiliki risiko terkait korupsi. Dengan demikian, 100% operasi IIF telah dinilai risikonya. [103-2][205-1]

Korupsi juga sudah diidentifikasi melalui pengkajian risiko yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee - RMC). Risiko ini dimitigasi melalui penerapan *four-eyes-principle* dan pemisahan tugas dalam aktivitas utama, larangan menerima hadiah dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang nilainya melebihi US\$100, sesi sadar risiko bagi karyawan, kebijakan pelaporan pelanggaran, dan pernyataan yang harus ditandatangani karyawan bahwa mereka akan mematuhi kode etik dan kebijakan anti-korupsi. Direksi akan secara berkala meninjau dan merevisi jumlah atau nilai larangan hadiah tersebut tergantung pada praktik yang terjadi di dunia kerja. Setiap hadiah yang diterima secara langsung dan melebihi dari jumlah batas yang telah ditentukan, harus dikembalikan tanpa menyinggung maupun mengganggu reputasi pihak pengirim. [103-3][205-1]

TOTAL DAN PERSENTASE PELATIHAN ANTI-KORUPSI [205-2]

Selain melakukan penilaian dan identifikasi, IIF juga telah memberikan sosialisasi, komunikasi, dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi. Seluruh karyawan dari manajemen puncak hingga karyawan di tingkatan rendah, atau 100% dari keseluruhan tenaga kerja IIF, telah mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi sejak saat mereka mulai bekerja di IIF. Seluruh pelatihan anti-korupsi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan dilaksanakan di Kantor Pusat ataupun secara virtual melalui *video conference*.

IIF mewajibkan klien dan mitra usaha untuk mematuhi kebijakan anti-korupsi IIF seperti tertera dalam Perjanjian Fasilitas dan dalam Integrity Pack yang masing-masing harus ditandatangani oleh klien proyek pembiayaan dan vendor dan eksternal konsultan dan juga menyampaikan dokumen "Panduan Pencegahan dan Pemberantasan Penipuan dan Korupsi dalam Proyek yang Dibiayai oleh Pinjaman IBRD dan Kredit dan Hibah IDA" sebelum penandatanganan Perjanjian

ANTI-CORRUPTION POLICY AND PRACTICE

Corruption and fraud are a detrimental threat to any business and even seen as violation of human rights. Acts of corruption and fraud can ruin a nation and its peoples and are therefore categorized as heavy crimes. A corruption practice can give a company a bad reputation and have negative impacts on the economy and the company's operations as a whole. [103-1]

Therefore, IIF upholds integrity and does not tolerate corrupt practices in all its activities and interactions with all its stakeholders. To ensure this, IIF has made assessments on all of its operational activities and projects that have risks related to corruption. Thus, 100% of IIF operations have been risk assessed. [103-2][205-1]

Corruption has also been identified through a risk assessment conducted by the Risk Management Committee (RMC). This risk is mitigated through the implementation of the four-eyes-principle and segregation of duties in key activities, prohibition of accepting in cash or other forms of gifts in excess of US\$100, risk awareness sessions for employees, violation reporting policies, and statements that employees must sign that they are will comply with the code of ethics and anti-corruption policies. The Board of Directors shall periodically review and revise the limit of the amount or value of the gift depending on the prevailing practice in employment. Every gift that is received directly and exceeds the specified limit, must be returned in a way that it does not offend the sender nor does it ruin their reputation. [103-3][205-1]

TOTAL AND PERCENTAGE OF ANTI-CORRUPTION TRAINING [205-2]

In addition to making assessments and identifications, IIF has also socialized and communicate anti-corruption policies and procedures and organized trainings for this subject. Socialization on anti-corruption policies and procedures is given to the top management to employees of the lowest level, or 100% of IIF's entire workforce, since their first days at IIF. All anti-corruption trainings for members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees are given at the Head Office or via video conference.

IIF makes it mandatory to its clients and business partners to comply with IIF's anti-corruption guidelines contained in Facility Agreement (for Project Funded client) and Integrity Pack (for vendor or third-party consultants) and also to submit the document "Guidelines for the Prevention and Eradication of Fraud and Corruption in Projects Funded by IBRD Loans and IDA Credits and Grants" before the Facility Agreement is signed.

Fasilitas. IIF juga memasukkan klausul tentang praktik korupsi dan penipuan yang dapat dikenai sanksi sebagai bagian dari Perjanjian Fasilitas. **[103-2]**

IIF telah menyusun pedoman pencegahan penipuan dan anti-korupsi yang berlaku bagi semua karyawan dan harus dibaca bersama dengan Pedoman Perilaku IIF. Pedoman ini telah tersedia dan dapat diakses oleh seluruh karyawan IIF. **[103-2]**

Sepanjang tahun 2021, IIF tidak memiliki insiden korupsi yang terbukti di dalam lingkup internal Perseroan. Kami juga dapat menyampaikan bahwa tidak ada mitra kerja yang diputus kontrak karena pelanggaran terkait korupsi. **[205-3]**

RANTAI PASOKAN **[102-9]**

Pada tahun 2021, 79% dari total kegiatan transaksi pengadaan meliputi pengadaan jasa, sedangkan 21% mencakup pengadaan belanja modal yang sebagian besar merupakan pengadaan barang-barang terkait teknologi informasi. Total transaksi pengadaan di tahun 2021 adalah 97 transaksi yang melibatkan 51 vendor dengan perkiraan nilai kontrak sebesar Rp29,2 billion.

Pengadaan jasa dilakukan untuk keperluan konsultasi seperti Konsultan Keuangan, Konsultan IT & Lisensi Sistem, Konsultan SDM, Konsultan Pajak, Konsultan S&E, Konsultan Hukum, *Valuator*, Asuransi Kesehatan, Pialang Asuransi, Auditor, Penyedia *Data Center Cloud*, Penyedia Jaringan, dan lain-lain. Kami juga dapat melibatkan konsultan lokal atau asing serta konsultan institusional atau individu tergantung pada kebutuhan dan jenis proyeknya.

Dalam hal belanja modal, pengadaan di tahun 2021 sebagian besar terdiri dari pengembangan aplikasi baru dan peningkatan terhadap aplikasi yang sudah ada. Modal belanja yang besar untuk tahun 2021 adalah terkait dengan pemindahan Data Centre dan pengembangan sistem terkait *Loan, Treasury, Finance, Investment, HR&GA*, dan *Risk & Compliance* serta pembelian *IT peripheral*. Sebagian besar pengadaan belanja modal bersumber dari vendor lokal. Total vendor yang terlibat untuk pengembangan dan/atau pengadaan aplikasi adalah 6 vendor dengan perkiraan total nilai kontrak sebesar Rp6,2 billion.

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku kepentingan merupakan salah satu kunci bagi IIF untuk tumbuh dan berkembang sehingga dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara luas. IIF berkomitmen agar seluruh pemangku kepentingan baik di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan mendapatkan manfaat berkelanjutan dari kegiatan yang kami lakukan.

IIF menggunakan hasil proses identifikasi untuk menentukan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*

IIF also includes clauses on punishable corrupt and fraudulent practices as part of the Facility Agreement. **[103-2]**

IIF has developed fraud prevention and anti-corruption guidelines that apply to all employees as another mandatory read attached to IIF Code of Conduct. These guidelines are made available and accessible to all IIF employees. **[103-2]**

Throughout 2021, IIF did not have any proven incidents of corruption within the Company's internal scope. We can also convey that none of our partners have been terminated due to corruption-related violations. **[205-3]**

SUPPLY CHAIN **[102-9]**

In 2021, 79% of the total procurement transaction activities covers the procurement of services, while the remaining 21% covers the procurement of capital expenditures, mostly for IT related items. The total procurement transactions in 2021 are 97, involving 51 vendor with an estimated contract value of Rp29.2 billion.

The Procurement for services consists mainly for consultancy purposes, such as Financial consultant, IT consultant & System Licenses, HR consultant, Tax consultant, S&E consultant, Legal consultant, *Valuator*, Health Insurance, Insurance Broker, Auditor, Data Centre Cloud provider, Network Provider, etc. Depending on the needs and project types, we may engage local or foreign consultant, as well as institutional or individual consultant.

In terms of capital expenditures, the procurement in 2021 consisted mainly on the development of new applications and improvement of existing applications. Big items for 2021 were the Data Centre relocation, and development of systems related to *Loan, Treasury, Finance, Investment, HR&GA*, and *Risk & Compliance*, as well as the purchase of IT peripherals. Most of capital expenditure items are sourced from local vendors. Total vendors engaged for the application development and/or procurement are 6 vendors with approximate total contract value of Rp6.2 billion.

RELATIONSHIP WITH STAKEHOLDERS

Stakeholders are one of the keys to IIF's business growth and development in order that the Company can give sustainable benefits for the society at large. IIF is committed to ensuring that all of its stakeholders in the economic, social, and environmental fields get sustainable benefits from our activities.

IIF uses the results of the identification process to determine stakeholder engagement programs. IIF precedes the programs

engagement). IIF melakukan pemetaan dan pengelolaan isu yang menjadi fokus perhatian pemangku kepentingan, hingga merumuskan dan melaksanakan program berdasarkan isu yang dihadapi di lapangan dan kebutuhan dari masing-masing pemangku kepentingan.

with mapping and managing certain issues that are the focus of stakeholders' concern and formulates and implements programs based on the issues faced in the field and stakeholder' needs.

Metode Identifikasi Kelompok Pemangku Kepentingan [102-42]

Stakeholder Group Identification Method

Dependency (D)	IIF memiliki ketergantungan pada seseorang atau sebuah organisasi, atau sebaliknya	IIF has dependence on a person or an organization, or vice versa
Responsibility (R)	IIF memiliki tanggung jawab legal, komersial atau etika terhadap seseorang atau sebuah organisasi	IIF has legal, commercial or ethical responsibilities towards a person or an organization
Tension (T)	Seseorang atau sebuah organisasi memiliki pengaruh terhadap terkait isu ekonomi, sosial atau lingkungan tertentu	A person or an organization who has influence on certain economic, social or environmental issues
Influence (I)	Seseorang atau sebuah organisasi memiliki pengaruh terhadap atau strategi atau kebijakan pemangku kepentingan lain	A person or an organization who has influence over or the strategies or policies of other stakeholders
Diverse Perspective (DP)	Seseorang atau sebuah organisasi memiliki pandangan yang berbeda yang dapat mempengaruhi situasi dan mendorong adanya aksi yang tidak ada sebelumnya	A person or an organization who has a different perspective that may affect a given situation and stimulate an unprecedented action
Proximity (P)	Seseorang atau sebuah organisasi memiliki kedekatan geografis dan operasional dengan IIF	A person or organization that has proximity with IIF both geographically and operationally

IIF juga berusaha memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan telah dilibatkan dalam kegiatan usaha Perseroan. Melalui berbagai pendekatan seperti pertemuan berkala, *one-on-one meeting*, seminar, survei kepuasan, dan kegiatan lainnya, IIF berusaha menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan dan mendengar aspirasi, kebutuhan, ide, saran, dan kritik. IIF juga berusaha memastikan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan terdapat wakil dari setiap kelompok sehingga dapat terwakili dengan baik. [102-40]

IIF also strives to ensure that all stakeholders are engaged in the Company's business activities. Through various approaches such as regular meetings, one-on-one meetings, seminars, satisfaction surveys, and other activities, IIF works to establish healthy relations with stakeholders and listens to their aspirations, needs, ideas, suggestions, and criticisms. IIF also tries to ensure that each of its activities that involve multiple stakeholders has representatives from each group to ensure their aspirations are represented. [102-40]

Ikhtisar Basis Identifikasi, Topik, dan Metode Pelibatan Pemangku Kepentingan [E.4][102-40][102-42][102-43][102-44]

Stakeholder Identification Bases, Topics, and Methods of Stakeholder Engagement Highlights

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Basis Penetapan Pemangku Kepentingan Basis for Determination	Metode Pendekatan & Frekuensi Pertemuan Engagement Methods and Frequency	Fokus Perhatian Focus of Concern
Pemegang Saham dan Investor	Pengaruh dan ketergantungan	Pemegang Saham: - Persetujuan rencana bisnis, aksi korporasi, dan struktur organisasi; - Penunjukan anggota Direksi; - Penetapan struktur tata kelola; - Keterwakilan melalui keanggotaan dalam Dewan Komisaris; dan - Pengaruh dalam pengambilan keputusan pembiayaan oleh Komite Investasi. Investor: - Pengendalian struktur permodalan; - Pembatasan penerbitan utang dan ekuitas; dan - Penetapan proyek-proyek yang akan dibiayai.	- Kinerja perusahaan - Tanggung jawab sosial dan lingkungan - Pengelolaan risiko
Shareholders and investors	Influence and Dependency	Shareholders: - Approval of business plans, corporate actions, and organisational structure; - Appointment of BoD members; - Determination of governance structures; - Representation through membership in the BoC; and - Influence in the financing decision-making by the Investment Committee Investors: - Controlling of capital structure; - Limit-setting of debt and equity issuances; and - Determination of projects eligible for financing.	- Company performance - Social and environmental responsibility - Risk management

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Basis Penetapan Pemangku Kepentingan Basis for Determination	Metode Pendekatan & Frekuensi Pertemuan Engagement Methods and Frequency	Fokus Perhatian Focus of Concern
Karyawan	Pengaruh, ketergantungan, dan kewajiban	• <i>Team Building</i> per Divisi dan per Direktorat (frekuensi tidak ditetapkan namun anggaran per tahun terbatas); • <i>Team Building</i> di tingkat Perseroan (1x setahun); • <i>Town Hall Meeting</i> (sesuai kebutuhan); • Sosialisasi prosedur operasional dan induksi terhadap karyawan (sesuai kebutuhan); • Acara-acara penting Perseroan, seperti <i>Investor Gathering</i>, <i>Pencatatan Obligasi</i>, dsb. (sesuai kebutuhan); • Acara Tutup Tahun (1x setahun); • Acara-acara penting Karyawan, seperti pernikahan, kelahiran, sakit, meninggal, promosi, dsb. (sesuai kebutuhan)	• Pengembangan karier dan kompetensi • Remunerasi dan kesejahteraan • Perbaikan kinerja operasional Perseroan • Fasilitas kerja • Kesehatan dan keselamatan kerja
Employees	Influence, Dependency, and Responsibility	• Team Building at each Division and each Directorate (frequency undetermined with predefined annual budget); • Team Building at Company-wide level (once a year); • Town Hall Meeting (as needed) • Socialization of operational and induction procedures to employees (as needed); • Significant Corporate Events, such as investor Gathering, Bonds Listings, etc. (as needed); • Year-End event (once a year); • Employees' important events or situations, such as marriage, birth, sickness, death, promotion, etc. (as needed).	• Career and competency development • Remuneration and welfare • Improvement of the Company's operational performance • Work facilities • Occupational Health and Safety
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Anggota Legislatif Terkait	Pengaruh dan ketergantungan	• Melakukan koordinasi dan identifikasi proyek infrastruktur di pusat dan daerah; • Menghadiri <i>market sounding</i>/sosialisasi oleh pemerintah pusat/daerah; • Menghadiri dan memberikan input pada <i>event</i> METI; • Berpartisipasi dalam berbagai acara Kementerian Keuangan; • Menjadi anggota dalam <i>Sustainable Finance Task Force</i> OJK.	• Pembangunan infrastruktur • Perkembangan kemajuan proyek • Kendala yang dihadapi proyek • Pencapaian target SDGs dan NDCs
Central Government, Regional Government, and related Members of the Legislative Branch	Influence and Dependency	• Infrastructure project coordination and identification at the central or regional governments; • Attendance in market sounding/dissemination events organised by central/regional government; • Attendance and input in METI events • Participation in the events of the Ministry of Finance. • Become a member of OJK's Sustainable Finance Task Force.	• Infrastructure development • Project progress • Constraints faced by project • Achievement of SDGs and NDCs targets
Klien dan Sponsor/ Pemrakarsa Proyek, serta Pemangku Kepentingan Terkait	Pengaruh dan ketergantungan	Klien/Sponsor/Pemrakarsa Proyek: • Ketersediaan untuk dibiayai oleh IIF. • Kepatuhan terhadap perjanjian yang diatur oleh IIF dalam kesepakatan pinjaman (terkait hal-hal finansial, pelaporan, dan S&E); • Penetapan harga (suku bunga, biaya, dan semua hal komersial lainnya); • Kerja sama dalam penyediaan data; • Pemantauan perkembangan proyek dan penerapan aspek sosial dan lingkungan (sebagaimana diperlukan); • Tinjauan secara berkala atas proyek-proyek yang dibiayai (kunjungan rutin ke proyek); • Koordinasi atau konsultasi terkait proyek infrastruktur yang berlangsung (sebagaimana diperlukan). Pemangku Kepentingan terkait: • Ketersediaan untuk membangun/mengerjakan proyek berdasarkan standar S&E yang diatur oleh IIF; • Ketersediaan untuk patuh pada perjanjian yang relevan bagi pemangku kepentingan terkait (misalnya, perusahaan EPC, konsultan rekayasa/teknis, dll.).	• Produk dan jasa • Pelayanan Konsultasi • <i>Rate</i>/suku bunga pinjaman • Proses dan durasi dalam pemberian keputusan • Persyaratan kredit • Kepatuhan terhadap standar S&E IIF
Project sponsors/ proponents, and associated stakeholders	Influence and Dependency	Clients/Project Sponsors/Proponents: • Willingness to be financed by IIF; • Compliance with the covenants set by IIF in the loan agreements (financial, reporting and S&E covenants); • Price-setting (interest rates, fees and all commercial matters); • Cooperation in providing data; • Monitoring of project development and implementation of social and environmental aspects (as needed); • Periodic reviews of financed projects i.e. routine site visit; • Coordination or consultation on ongoing infrastructure projects (as needed). Associated Stakeholders: • Willingness to develop/construct projects according to S&E standard as set by IIF; • Willingness to comply with the covenants relevant to the associated stakeholders (e.g. EPC companies, engineering/technical consultants, etc.).	• Products and services • Advisory Service • Interest rates on loans • Process and duration of decision making • Credit terms • Compliance with IIF S&E standards

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Basis Penetapan Pemangku Kepentingan Basis for Determination	Metode Pendekatan & Frekuensi Pertemuan Engagement Methods and Frequency	Fokus Perhatian Focus of Concern
Vendor	Pengaruh dan ketergantungan	IIF menggunakan jasa konsultan profesional untuk melakukan analisis kesenjangan, memberikan saran tentang dokumen yang dihasilkan oleh proyek, atau menawarkan saran profesional mengenai masalah yang lebih kompleks, dan/atau apabila informasi yang diberikan perusahaan proyek tidak cukup untuk menentukan sejauh mana klien mematuhi kebijakan IIF. Konsultan eksternal dipakai berdasarkan kasus per kasus. IIF mengarahkan dan mengawasi pekerjaan para konsultan untuk memenuhi praktik terbaik S&E berdasarkan SEP. Kontraktor dan Mitra Kerja: - Pengaturan hubungan hak dan kewajiban masing-masing melalui kontrak kerja sama; - Koordinasi dan supervisi mengenai proyek infrastruktur, secara rutin sesuai dengan rencana kerja selama masa kontrak kerja sama. Asosiasi di Bidang Infrastruktur: - Partisipasi pada acara yang diselenggarakan oleh asosiasi-asosiasi yang berfokus pada pengembangan Infrastruktur Indonesia; - Inisiatif <i>knowledge sharing</i> sebagai bentuk partisipasi aktif IIF dengan mitra kerja proyek infrastruktur.	- Proses pengadaan barang dan jasa yang transparan - Seleksi dan evaluasi kandidat mitra bisnis yang obyektif - Prosedur administrasi yang mudah dan akurat - Pembayaran produk dan jasa tepat waktu - Hubungan saling menguntungkan - Independent review dan/atau laporan yang berkualitas
Vendor	Influence and Dependency	IIF employs professional consultants' services to conduct gap analysis, provides advice on documents delivered by the projects, or offers professional advice on more complex issues and/or in the event the information provided by the project company is inadequate to determine the extent to which the clients can comply with IIF's policies. External consultants are employed on a case-by-case basis. IIF directs and supervises the work of these consultants to meet the S&E best practices under the SEP. Contractors and Work Partners - Arrangement on respective rights and obligations through a cooperation agreement; - Coordination and supervision on infrastructure projects, routinely according to the work plan during the period of cooperation agreement. Associations Engaging in the Field of Infrastructure - Participation in events organised by associations focusing on the national infrastructure development; - Knowledge sharing initiatives as a form of active participation of IIF with its work partners in infrastructure projects.	- Transparent process of procurement of goods and services - Objective selection and evaluation of business partners - Easy and accurate administrative procedures - Timely payment of products and services - Mutually beneficial relationship - Independent review and/or quality report
Masyarakat	Pengaruh dan ketergantungan	- Pada praktiknya IIF tidak berhubungan secara langsung dengan masyarakat dan hubungan dengan masyarakat lebih banyak dikelola melalui proyek. - Proses diskusi dengan masyarakat seringkali dilakukan oleh IIF pada saat melakukan uji tuntas untuk mengonfirmasi beberapa hal terkait pengelolaan aspek sosial di lokasi proyek. - Beberapa proyek yang dibiayai IIF yang bersinggungan langsung dengan kelompok masyarakat adat akan dikelola sesuai dengan standar yang tertuang pada SEMS sepanjang periode pembiayaan. - Masyarakat dapat menyampaikan keluhan melalui <i>Grievance Redress Mechanism</i> (GRM) yang tersedia di <i>website</i> IIF dan juga di level proyek. Mekanisme ini spesifik dan dapat diakses oleh publik di seluruh wilayah di mana terdapat investasi IIF, dalam format dan bahasa yang mudah dimengerti.	- Program-program pengembangan masyarakat - Penanganan keluhan - Pengelolaan kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat di proyek - Kontribusi di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
Public	Influence and Dependency	- In practice, IIF is not directly related to the public as it is managed through the projects. - IIF often has discussions with the affected community during the due diligence process to clarify matters pertaining to the management of social aspects at the project site. - Some of the projects financed by IIF that have direct contact with indigenous peoples will be managed throughout the financing period in accordance with SEMS standards - The public at large can submit complaints through the Grievance Redress Mechanism (GRM) that is made available on IIF official website and directly to the projects. This mechanism is specific and can be accessed by the public in all areas where IIF investments are available, in a format and language that is easily understood.	- Community development programs - Complaint handling - Management of public health, safety and security in the project - Contributions to education, health and the economy

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Basis Penetapan Pemangku Kepentingan Basis for Determination	Metode Pendekatan & Frekuensi Pertemuan Engagement Methods and Frequency	Fokus Perhatian Focus of Concern
Media Massa	Pengaruh dan ketergantungan	- IIF melibatkan media massa untuk setiap peristiwa penting yang berhubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Media massa secara formal diundang ke acara tersebut untuk meliput langsung. Demi terjaganya akurasi dan aktualnya berita, IIF membuat rilis resmi untuk menjadi acuan media massa dalam menerbitkan berita; - Media massa dilibatkan melalui badan agensi agar berita terkait Perseroan mencapai target pembaca secara aktual dan efektif; - Jenis media massa yang terlibat dalam operasi IIF, mayoritas merupakan media daring yang terafiliasi dengan media cetak, dan umumnya dalam bidang bisnis dan ekonomi	- Kinerja perseroan - Informasi yang berkaitan dengan proyek-proyek yang didukung
Mass Media	Influence and Dependency	- IIF engages the mass media for every significant event related to external stakeholders. The media are formally invited to each event so to cover the event directly. To maintain accuracy and actuality of the news, IIF prepares an official press release as a reference for the media in publishing the news; - The media are involved through an agency so that Company-related news are actual and can reach the target readers effectively; - The media involved in the IIF's operations are mostly online media affiliated with print media, with a majority of them covering business and the economy.	- Company performance - Project-related Information

MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN [F.1]

Sebagai perusahaan yang berkomitmen pada pembiayaan berkelanjutan, IIF turut membangun budaya keberlanjutan untuk internal dan eksternal. Setiap tahunnya, IIF mengadakan sesi *sharing* internal untuk karyawan dalam rangka mengembangkan kapasitas karyawan antar divisi secara berkelanjutan. Pada tahun 2021, beberapa kegiatan *sharing session* internal yang dilakukan adalah:

BUILDING A SUSTAINABLE CULTURE [F.1]

As a company that is committed to sustainable financing, IIF has helped build a culture of sustainability internally and externally. Every year, IIF organizes internal sharing sessions for employees across all functions so they can continue to develop their capacity. In 2021, IIF organized the following internal sharing sessions:

Time	Subject	Organizer
February	Introduction to Onedrive System	IT Team
April	Implementing Regulation of Omnibuslaw 2020	Corsec – Transaction Legal, with Dewi Negara Fachri & Partners Law Firm
	Sustainability Bond Workshop	SFWG, with World Bank
	PIP Data Socialization	Operational Risk Team
May	Sharing Session Series: Landslide	S&E Division, with UGM Faculty of Civil Engineering
July	Sharing Session Series: OHS Construction Industry	S&E Division
	Sharing Session Series: Introduction to Geothermal Power Plant for S&E Division	S&E Division
	Sharing Session Series: Multilateral Development Bank – Accountability Mechanism	S&E Division
August	Refreshment of IIF Graphic Standard Manual “GSM” and Introduction to New System Automatic Generated Numbering System “AGNS”	HR GA, Corsec, IT Dept
October	Biodiversity Discussion on Taman Nasional Batang Gadis for S&E Division	S&E Division
November	Legal and Commercial Aspect in PPP Projects	HR GA and Transaction Legal, with Herman Juniarto & Partners and Deloitte Financial Advisory Services
December	Risk Awareness (Basic Security Guidelines for Protecting Data Confidentiality, Safety Guidelines for Using Elevators, WFO during COVID-19 Pandemic, Code of Conduct, Whistleblowing Mechanism, Call Tree, Workplace Evacuation Plan)	Operational Risk Team and S&E Division

Sementara untuk sesi eksternal, IIF telah menyelenggarakan dan berkolaborasi sebagai pembicara dalam beberapa webinar dan konsultasi publik, yaitu:

Meanwhile, for external sessions, IIF has organized and collaborated as keynote speakers in several webinars and public consultations, as listed below:

Time	Subject	Organizer
March	Webinar Series #3 Introducing IIF's Core Value to Achieve Sustainable Infrastructure Development	IIF – Bisnis Indonesia
	Training on Project's Risk and Impact Management on Indigenous People (batch 2nd) 2021	IIF - Network Learning Centers for Environmental and Social Sustainability (NLC-ESS) and Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH), Universitas Gadjah Mada (UGM).
April	Land Acquisition and Livelihood Restoration	IIF - Network Learning Centers for Environmental and Social Sustainability (NLC-ESS) and Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH), Universitas Gadjah Mada (UGM).
June	Innovative Financial Instrument for Infrastructure Financing	IIF – Bisnis Indonesia
	DSTP UI Webinar Climate Change Challenge	IIF – Universitas Indonesia
	SEMS training by S&E Division to Three (3) Clients	IIF
October	BNP Paribas Sustainable Future Forum Corporate Access Days	IIF – BNP Paribas

Sesuai dengan RAKB 2022 yang telah disusun, IIF memiliki tiga prioritas program yang direncanakan sebagai bagian dari aksi keuangan berkelanjutan di 2022, yaitu:

In accordance with its 2022 RAKB, IIF has three priority programs that are planned as part of the sustainable finance action for the fiscal year:

1. Penyesuaian Organisasi dan Tata Kelola Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Hal ini akan dilakukan dalam bentuk:

- Penyesuaian *Corporate Sustainability Target* dengan *Sustainable Development Goals*
- Perumusan program *Corporate Sustainability* sebagai perwujudan atas target yang telah disesuaikan

1. Organizational and Governance Adjustment and for the Implementation of Sustainable Finance

This will be done in the form of:

- Adjustment of Corporate Sustainability Targets with Sustainable Development Goals
- Formulation of the Corporate Sustainability program as the realization of the adjusted targets

2. Pengembangan Kapasitas Internal IIF terkait dengan Keuangan Berkelanjutan

Hal ini akan dilakukan dalam bentuk:

- Peningkatan kapasitas internal terhadap divisi-divisi yang terlibat dalam penyusunan dan penerapan aksi keuangan berkelanjutan
- Sosialisasi terkait dengan *Corporate Sustainability Target* dan program aksi keuangan berkelanjutan kepada seluruh karyawan IIF.
- Pengembangan kapasitas teknis SED, konsultan S&E, dan Debitor dalam hal pengelolaan dan penerapan Prinsip S&E bekerja sama dengan IIF *Shareholders dan Lenders*

2. IIF Internal Capacity Development related to Sustainable Finance

This will be done in the form of:

- Increasing the internal capacity of the divisions involved in the preparation and implementation of sustainable finance actions
- Socialization related to the Corporate Sustainability Target and sustainable financial action program to all IIF employees.
- Development of technical capacity of SED, S&E consultants, and Debtors in terms of managing and implementing S&E Principles in collaboration with IIF Shareholders and Lenders

3. Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan Berkelanjutan

Hal ini akan dilakukan dalam bentuk:

- Pendanaan
- Peningkatan akses ke pembiayaan campuran dan hibah dari dana berkelanjutan
- Strategi pengembangan aset
- Business support*
- Perumusan dan pelaksanaan program CSR yang sesuai dengan standard IIF dalam menerapkan prinsip S&E bersama dengan Universitas Indonesia sebagai mitra kerja sama

3. Development of Sustainable Financial Products and Services

This will be done in the form of:

- Funding
- Improved access to mixed financing and grants from sustainable funds
- Asset development strategy
- Business support
- The formulation and implementation of CSR programs in accordance with IIF standards in implementing S&E principles in collaboration with the University of Indonesia as a cooperation partner

KINERJA KEBERLANJUTAN

Sustainability Performance



MENGHASILKAN KINERJA OPERASIONAL YANG POSITIF

Delivering Positive Operational Performance



➤ Meski tahun 2021 masih diselimuti pandemi COVID-19 dan memberikan tantangan yang cukup besar bagi dunia usaha, IIF tetap mampu memberikan kinerja operasional dan keuangan yang optimal dalam menjalankan mandat sebagai katalisator percepatan pembangunan infrastruktur.

Although the dark cloud of COVID-19 pandemic still presented businesses with enormous challenges in 2021, IIF managed to deliver optimum operations and financial results as the Company was fulfilling its mandate as a catalyst for accelerating infrastructure development.

KINERJA PORTOFOLIO DAN PEMBIAYAAN

IIF berhasil mencatat pertumbuhan yang positif dari pendapatan usaha dan aktivitas bisnis pada 2021. Pendapatan usaha IIF tahun 2021 dibukukan sebesar Rp951,10 miliar atau meningkat sebesar 4,34% dari tahun sebelumnya (sebesar Rp911,52 miliar). Selaras dengan itu, IIF berhasil mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 24,74%. IIF juga berhasil menandatangani 17 perjanjian baru di tahun 2021 dengan nilai komitmen investasi mencapai Rp5,41 triliun, naik 88,0% dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah Rp2,88 triliun.

Dengan adanya realisasi komitmen baru di tahun 2021, maka total aset IIF yang tercatat menjadi sebesar Rp12,21 triliun. Per 31 Desember 2021, IIF tercatat memiliki sebanyak 57 proyek yang sebagian besar berasal dari portofolio pembiayaan di sektor

PORTFOLIO AND FINANCING PERFORMANCE

IIF delivered positive growth in operating revenues and business operations in 2021. Operating revenues reached Rp951.10 billion, which is an increase of 4.34% from the previous year (i.e. Rp911.52 billion). In line with this stronger revenue generation, our bottom line expanded by 24.74%. IIF also sealed 17 new financing deals this year with a total investment commitment value of Rp5.41 trillion, a significant increase of 88.0% compared to Rp2.88 trillion sealed in the previous year.

With the realization of new commitments in 2021, IIF's total assets grew to Rp12.21 trillion. As of December 31, 2021, IIF had distributed financing to 57 projects under its portfolio, with a majority coming from the electricity, road infrastructure,

ketenagalistrikan, infrastruktur jalan, dan telekomunikasi. Pada pelaksanaannya, IIF berkomitmen untuk memberikan layanan atas produk/jasa yang setara kepada klien serta menjelaskan bagaimana produk yang dihasilkan ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. **[F.17]**

and telecommunications sectors. As its business grows, IIF remains committed to providing equal services/products to the clients and explaining how the financing products it offers are intended to meet various consumer needs. **[F.17]**

Kinerja Portofolio dan Pembiayaan **[F.2][F.3]**

Summary of Economic and Sustainable Finance Performance and Targets

Keterangan Description	Hasil (Rp miliar) Results (Rp Billion)			Target 2021 (Rp miliar) Target (Rp Billion)	Pencapaian 2021 (%) Achievement (%)
	2019	2020	2021		
Komitmen investasi bersih Net commitments	12.770	14.098	17.079	19.633	87%
Aset investasi Investment Asset	8.776	11.445	12.209	14.631	83%
Pendapatan Revenue	838	912	951	1.189	80%
Laba bersih Net Income	16	43	53	81	65%
Nilai komitmen untuk proyek terkait keuangan berkelanjutan Commitments in Sustainable Finance-related projects	12.770	14.098	17.079	19.633	87%
Aset investasi dalam proyek terkait keuangan berkelanjutan Investment assets in Sustainable Finance-related projects	8.776	11.445	12.209	14.631	83%

Kinerja Layanan Advisory

Summary of Advisory Performance

Keterangan Description	Hasil Results		
	2019	2020	2021
Jumlah mandat yang aktif (proyek) Number of active mandates (projects)	9	9	13
Pendapatan (Rp Miliar) Revenues (Rp Billion)	8,06	9,39	8,86
Jumlah mandat aktif yang terkait keuangan berkelanjutan (proyek) Number of Sustainable Finance-related active mandates (projects)	8	8	13
Pendapatan dari mandat aktif yang terkait keuangan berkelanjutan (Rp Miliar) Revenue from Sustainability Finance-related active mandates (Rp Billion)	8,06	9,39	8,86
Proporsi pendapatan dari proyek terkait keuangan berkelanjutan Proportion of revenues from Sustainable Finance-related projects to total advisory revenues	100%	100%	100%

MITIGASI DAMPAK PRODUK/JASA **[F.28]**

Sesuai syarat Panduan Operasi IIF (IIF OM SEMS 2019), IIF melakukan uji tuntas sosial dan lingkungan (SEDD) terhadap semua proyek yang akan dibiayai untuk mengidentifikasi potensi risiko dan dampak sosial dan lingkungan terkait aktivitas proyek. Uji tuntas tersebut juga mencakup penilaian terhadap kapasitas proyek tersebut untuk mengelola isu sosial dan lingkungan yang diidentifikasi. SED mengelompokkan proyek ke dalam beberapa kategori risiko: Kategori A (Risiko Tinggi), B (Risiko Sedang), dan C (Risiko Rendah) yang mengacu pada Kategorisasi S&E yang ada di dalam SEMS.

PRODUCT/SERVICE IMPACT MITIGATION **[F.28]**

In accordance with the requirements of the IIF Operations Manual (IIF OM SEMS 2019), IIF does Social and Environmental Due Diligence (SEDD) on all projects IIF is about to finance to identify all potential social and environmental project-related risks and impacts. The due diligence also includes assessments of the project's capacity to manage the identified social and environmental issues. SED projects are classified into several risk categories: Category A (High Risk), B (Medium Risk), and C (Low Risk) which refers to the S&E Categorization in the SEMS.

SEDD yang dilakukan oleh IIF, yang dilakukan oleh IIF, dilaksanakan baik oleh *internal safeguards expert* IIF secara mandiri atau dengan bantuan dari konsultan S&E untuk menilai proyek yang diusulkan dan untuk menentukan langkah-langkah mitigasi dan instrumen perlindungan yang tepat. Berdasarkan hasil SEDD, identifikasi kesenjangan terhadap prinsip-prinsip S&E akan dianalisis. Kemudian hasil analisis kesenjangan ini akan menghasilkan serangkaian upaya mitigasi yang disebut Rencana Tindakan Perbaikan (CAP). CAP tersebut akan disertakan sebagai bagian dari perjanjian fasilitas antara IIF dan debitur, di mana IIF mewajibkan debitur untuk mengikuti dan mematuhi pemenuhan CAP sesuai dengan standar IIF.

Pada tahun 2021, tidak terdapat produk/jasa yang ditarik kembali karena tidak relevan dengan sifat bisnis IIF yang bergerak di bidang jasa keuangan. Hingga akhir periode pelaporan, IIF belum menyelenggarakan survei kepuasan pelanggan atas produk dan jasa yang diberikan. **[F.29][F.30]**

SEDD is conducted with in-house is conducted with in-house (internal) safeguards experts or with assistance from an S&E consultant to assess every proposed project and determine the right mitigation measures and safeguards instruments. Based on the SEDD results, IIF will then analyze the potential gap between the assessed project and the S&E principles. The results of this gap analysis will produce a Corrective Action Plan (CAP) which contains a series of mitigation efforts. The CAP will be included in each facility agreement between IIF and its debtors, where IIF requires the debtors to follow and comply with the CAP in accordance with IIF standards.

In 2021, there were no products/services recalled since there were irrelevant to the nature of IIF's business which is engaged in financing. Until the end of the reporting period, IIF had not conducted a customer satisfaction survey for its products and services provided. **[F.29][F.30]**

IIF Berhasil Masuk Pasar Internasional melalui Penerbitan Sustainability Bonds

IIF Entered International Market through Issuance of Sustainability Bonds



IIF berhasil memasuki pasar internasional melalui penerbitan *sustainability bonds* dengan tenor 5 tahun senilai US\$150 juta ("Obligasi") setelah melalui proses pencatatan dan serangkaian pemasaran ekstensif kepada investor internasional. Obligasi ini mendapat peringkat BBB (stabil) dari Fitch Rating, atau setara dengan Obligasi Republik Indonesia.

Dalam penerbitan perdannya, IIF memanfaatkan sentimen optimis di pasar utang global dan transaksi tersebut mendapat tanggapan positif dari investor global dengan jumlah minat akhir mencapai sebesar US\$390 juta atau 2,6x kali di atas target IIF yakni sebesar US\$150 juta.

IIF terus menunjukkan komitmen, kepemimpinan dan kontribusinya terhadap pembiayaan berkelanjutan dengan mendedikasikan Obligasi ini sebagai *sustainability bonds* serta menggunakan dana hasil penjualan Obligasi untuk proyek ramah lingkungan dan/atau sosial yang memenuhi persyaratan di bawah kerangka pembiayaan keberlanjutan (*Framework*).

Obligasi ini merupakan *sustainability bonds* pertama yang diterbitkan oleh institusi keuangan non-bank Indonesia serta menegaskan kegigihan dan posisi terkemuka IIF dalam penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance* - ESG) dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

IIF successfully entered the international market through the issuance of its 5-year, US\$150 million sustainability bond, after a listing process and a series of marketing roadshows to entice international investors. The bond was rated BBB (stable) by Fitch Ratings, who gave the very same rating for the Bonds of the Republic of Indonesia.

Prior to this first issuance, IIF had made the most of the global debt market's upbeat sentiment toward the bond offering, as proven by the positive response from global investors who made a final offering of US\$390 million or 2.6 times larger than the targeted US\$150 million.

IIF's commitment, leadership, and contribution to sustainable financing were shown when IIF dedicated these first bonds as sustainability bonds and allocated the bond proceeds to environmentally and/or socially friendly projects that meet the requirements as specified under the sustainability financing framework.

These bonds were the first sustainability bond issued by an Indonesian non-bank financial institution and reaffirmed IIF's persistence and its leading position in implementing environmental, social, and governance (ESG) principles in infrastructure financing in Indonesia.

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN PRODUK/JASA BERKELANJUTAN

IIF berkomitmen untuk memberikan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan para nasabah atau calon nasabah yang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh pendanaan. IIF memastikan seluruh produk dan jasa yang diberikan telah memenuhi prinsip S&E. Termasuk di dalamnya terdapat perhatian terhadap aspek keselamatan dan keamanan, pencegahan polusi, dan sosial inklusivitas. Dengan menerapkan prinsip S&E, seluruh produk yang diberikan dan proyek yang dibiayai oleh IIF merupakan produk dan proyek keuangan berkelanjutan. **[F.27]**

Sebagai komitmen untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, IIF terus melanjutkan pembiayaan proyek pembangkit listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sumatera Utara, Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Gorontalo Utara dan Nusa Tenggara Timur, Pembangkit Listrik Tenaga Angin di Sulawesi Selatan, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro di Jawa Barat, Sumatera Utara Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Jawa Barat, dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Aceh.

Selain itu, IIF juga mendanai proyek-proyek baru seperti rel kereta api di Sulawesi jalur Makassar-Parepare, pembangunan gedung baru Rumah Sakit di Tangerang dan Bekasi, hingga proyek data center pengembangan Pusat Data Skala Hiper di Jawa Barat. Proyek-proyek tersebut merupakan wujud komitmen IIF untuk memperluas sektor portofolio yang dimiliki.

Komitmen Bersih Portofolio Investasi

Investment Portfolio Commitment (Net)

Keterangan Description	Hasil (Rp miliar) Results (Rp billion)			Target 2021 (Rp miliar) Target (Rp billion)	Pencapaian 2021 (%) Achievement (%)
	2019	2020	2021		
Jalan Road	3.561	3.235	2.491	3.696	67
Telekomunikasi dan Informatika Telecommunications & Informatics	1.682	1.967	3.886	1.931	201
Air Minum Water	1.272	1.574	1.504	2.442	62
Minyak dan Gas Oil and Gas	598	572	2.082	2.704	77
Ketenagalistrikan Electricity	2.934	3.573	4.018	4.990	81
Bandara Airport	1.337	1.208	1.185	1.073	110
Pelabuhan Seaport	706	667	417	782	53
Kereta Api dan Transportasi Publik Railway and Public Transportation	-	-	238	350	68
Kawasan Industri Industrial Estate	-	500	477	500	95
Infrastruktur Pertanian Agriculture Infrastructure	-	-	-	-	-
Infrastruktur Sosial Social Infrastructure	-	-	101	504	20
Lainnya Other Infrastructure	680	802	680	662	103
Total	12.770	14.098	17.079	19.633	87

RESPONSIBILITY FOR SUSTAINABLE PRODUCT/SERVICE DEVELOPMENT

IIF is committed to providing products and services that meet the needs of both its existing and prospective customers who are qualified for infrastructure funds. IIF ensures that all products and services provided comply with S&E principles. This includes attention to aspects of safety and security, pollution prevention, and social inclusiveness. By applying the S&E principle, all products provided and projects financed by IIF are considered as sustainable finance products and projects. **[F.27]**

As a commitment to support renewable energy development, IIF finances power plant projects from the New and Renewable Energy (EBT) sector such as Hydroelectric Power Plants in North Sumatra, Solar Power Plants in North Gorontalo and East Nusa Tenggara, Wind Power Plants in South Sulawesi, Mini Hydro Power Plant in West Java, North Sumatra, North Sulawesi, South Sulawesi, Central Sulawesi, Geothermal Power Plant in West Java, and Biomass Power Plant in Aceh.

IIF also provided financing to some new projects, from railway construction for Makassar-Parepare track in Sulawesi, new hospital building construction in Tangerang and Bekasi, to the construction of a Hyper-Scalable Data Center in West Java. These projects show IIF's commitment to expanding its portfolio by penetrating into more sectors financed.

Highlights Pembiayaan Keberlanjutan IIF pada 2021 [F.26]

Pada tahun 2021, IIF terus melanjutkan dan mengembangkan diversifikasi pembiayaan di beberapa sektor yang terangkum di bawah ini:

Highlights of IIF Sustainability Financing in 2021 [F.26]

In 2021, IIF continued and developed financing diversification in several sectors as summarized below:

Membangun Konektivitas melalui Kereta Api

Building Connectivity through Railways



IIF memperluas sektor portofolio yang dimiliki melalui pembiayaan proyek rel kereta api. IIF beserta dua institusi keuangan lain menandatangani Perjanjian Fasilitas dalam hal pemberian fasilitas pinjaman sindikasi untuk pembangunan dan pengembangan proyek jalur Kereta Api di Makassar-Parepare. Bagi IIF, proyek ini merupakan pionir dalam sektor kereta api dan transportasi massal dalam portofolionya.

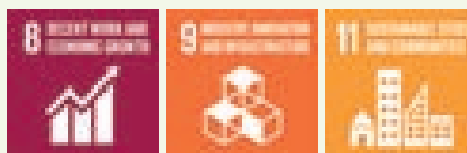
Rel kereta api Makassar-Parepare sepanjang 142 km ini merupakan inisiasi Pemerintah dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional. Jalur ini merupakan bagian dari jaringan Kereta Api Nasional Trans-Sulawesi, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan dan distribusi pertumbuhan ekonomi nasional di Sulawesi.

Kereta Api merupakan salah satu angkutan massal untuk melayani kebutuhan masyarakat akan transportasi umum karena kemampuannya mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah banyak dengan waktu tempuh yang relatif singkat tanpa ada hambatan di sepanjang jalur rel. Moda transportasi ini sangat diperlukan dalam mendukung mobilisasi masyarakat dan arus barang. Dengan mengemban mandat sebagai katalisator dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan, IIF senantiasa mendukung berbagai jenis proyek untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

IIF is expanding its portfolio sector through financing for railway projects. IIF and two other financial institutions signed a Facility Agreement for a syndicated loan facility for the construction and development of the Makassar-Parepare Railway project. For IIF, this project is a pioneer in the rail sector and mass transportation in its portfolio.

The 142 km Makassar-Parepare railroad is part of the National Strategic Project initiated by the Indonesian Government. This future commuter line is part of the Trans-Sulawesi National Railway network constructed to further ignite economic growth in Sulawesi with the subsequently larger distribution capacity.

A railway system is one of the most viable options of mass transportations because the system can handle a large number of people and goods with relatively faster, traffic-free commuting. This mode of transportation is indispensable in supporting community mobilization and distribute goods. By carrying out the mandate as a catalyst in sustainable infrastructure development, IIF continues to support various types of projects to accelerate infrastructure development in Indonesia.



Big Data, Big Opportunity: IIF Mendanai Proyek Data Center Pertamanya

Big Data, Big Opportunity: IIF Funds Its First Data Center Project

Digitalisasi terus tumbuh dan berkembang dengan pesat. Dengan tingginya permintaan penggunaan data, kebutuhan akan *data center* dengan kapasitas yang mumpuni juga menjadi semakin penting untuk melengkapi infrastruktur telekomunikasi dan akan memberikan peluang investasi yang menjanjikan. Sebagai katalis dalam pembangunan yang berkelanjutan, di tahun 2021 IIF berhasil mengambil bagian dalam pembiayaan proyek *data center* pertamanya.

IIF memberikan fasilitas pinjaman senior berjangka kepada sebuah perusahaan untuk proyek pengembangan *data center* fase pertama yang berlokasi di Kawasan Industri Cikarang-Jababeka. Proyek ini mendapatkan fasilitas pembiayaan sekitar 70% dari total biaya proyek.

Telekomunikasi adalah salah satu sektor pembiayaan terbesar dalam portofolio IIF. Sebelumnya IIF juga telah berpartisipasi dalam pembiayaan proyek *Palapa Ring*, pembiayaan untuk penyedia jasa internet, penyedia menara telekomunikasi, dan operator telekomunikasi di berbagai lokasi di Indonesia.

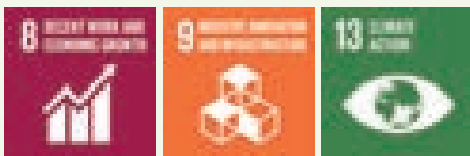
Big data pun saat ini menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saat ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya sekedar pembangunan fisik seperti konstruksi jalan dan bangunan, namun kian merambah kepada pembangunan infrastruktur digital. Oleh karena itu, IIF konsisten untuk selalu berkembang dan pencapaian ini menjadi motivasi bagi IIF untuk kembali mengambil bagian dalam pembangunan di fase-fase proyek yang akan datang.

Digitalization continues to grow and develop rapidly. The increasingly high demand for data usage has created a strong need for a large-capacity data center to support the telecommunications infrastructure, presenting many businesses with enormous and promising investment opportunities. As a catalyst in sustainable development, IIF began its role on this front in 2021 with its first participation in a data center project.

IIF provided a senior term loan facility to a company who was constructing the first phase of its data center in the Cikarang-Jababeka Industrial Estate. This project was granted a total financing that accounted for of around 70% of the project budget.

Telecommunications is one of the largest sectors financed under IIF's portfolio. IIF's previous participation in this sector was in the *Palapa Ring* project, providing financing for internet service providers, telecommunication tower providers, and telecommunication operators in various locations in Indonesia.

Big data is playing an increasingly bigger role in economic growth in Indonesia. Infrastructure development has gone beyond physical construction like road network and building construction, and now includes digital infrastructure. IIF remains consistent with its business development and hopes that an accomplishment in this sector will motivate us even more to participate further in the future phases of the project.



IIF Rambah Infrastruktur Sosial, Beri Pinjaman ke Proyek di Sektor Kesehatan

IIF Expands Social Infrastructure, Provides Loans to Projects in the Health Sector



Tahun 2021 menjadi titik tolak bagi IIF untuk mulai merambah infrastruktur sosial. Hal ini diwujudkan dengan adanya penandatanganan perjanjian pinjaman *senior term* untuk keperluan ekspansi bisnis dalam sektor jasa kesehatan.

Fasilitas pinjaman tersebut digunakan untuk ekspansi fasilitas kesehatan dengan membangun gedung baru di rumah sakit yang berlokasi di Tangerang dan Bekasi. Melalui ekspansi ini, kapasitas tempat tidur di rumah sakit yang ada di Tangerang akan meningkat dari 39 menjadi 123 tempat tidur. Sementara di rumah sakit Bekasi, kapasitasnya akan meningkat dari 36 menjadi 155 tempat tidur. Fasilitas yang IIF berikan juga termasuk penyediaan alat kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya seperti poliklinik, instalasi apotek, laboratorium, radiologi dan rehabilitasi.

Melalui pencapaian ini, IIF terus menunjukkan kinerjanya untuk meningkatkan diversifikasi investasi ke sektor-sektor yang baru yang sesuai dengan mandat IIF dan memberikan kontribusinya secara nyata kepada masyarakat. Transaksi di sektor kesehatan ini tidak hanya memberikan keuntungan dari aspek komersial namun juga memberikan solusi kesehatan dan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

2021 was a year where IIF began exploring the social infrastructure. IIF has done so by signing of a senior term loan agreement for business expansion purpose in the healthcare services sector.

The loan facility was used to expand the health facilities with the construction of new hospital buildings in Tangerang and Bekasi. This expansion has increased the bed capacity of the hospital in Tangerang from 39 to 123. Meanwhile, the hospital bed capacity in Bekasi has increased from 36 to 155. The financing facility provided by IIF to these two hospitals also includes provisioning of medical devices and other health facilities such as polyclinics, pharmacies, laboratories, radiology, and rehabilitation unit.

This achievement shows IIF's performance in diversifying its investment portfolio by entering new sectors according to the mandate it has received while making a real contribution to society. Not only has the transaction in the health sector generated returns commercially, but also helped give healthcare solutions and access to community's basic needs.



Kontribusi dalam Penyediaan Kebutuhan Air Minum

Contribution in Provision of Drinking Water Needs

Pada bulan Juli, IIF memberikan fasilitas pembiayaan proyek SPAM di Pekanbaru yang dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU).

Proyek ini diharapkan dapat merehabilitasi instalasi pengolahan air yang ada dan membangun instalasi pengolahan air baru yang terletak di daerah Tampan, yang akan meningkatkan kapasitas IPA saat ini dari 340 liter/detik menjadi 750 liter/detik selama masa konstruksi 6 tahun.

Proyek ini diperkirakan untuk dapat melayani sekitar 61.000 sambungan rumah yang mencakup 7 kabupaten dan 31 kelurahan.

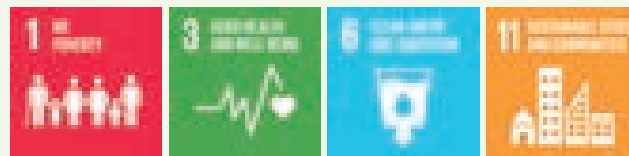
Sesuai mandatnya sebagai katalis penyedia pembiayaan pembangunan infrastruktur, proyek air minum ini merupakan wujud komitmen IIF untuk membangun infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia dalam penyediaan kebutuhan dasar air minum bagi masyarakat.

In July, IIF provided Drinking Water Supply System project financing facilities in Pekanbaru which were implemented under the Public-Private Partnership (PPP) scheme.

This 6-year project is expected to rehabilitate the existing water treatment plant and construct a new water treatment plant in the district of Tampan, which will increase the WTP capacity from currently 340 liters/second to 750 liters/second.

The project is estimated to serve around 61,000 house connection covering 7 districts and 31 urban villages.

In accordance with its mandate as a catalyst for providing financing for infrastructure development, the drinking water project is a manifestation of IIF's commitment to build sustainable infrastructure in Indonesia by helping to provide drinking water supply to the public



Mendukung EBT melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro

Supporting EBT through Mini Hydro Power Plant

IIF telah menyepakati untuk memberikan fasilitas pinjaman jangka panjang dalam mendukung penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pembangunan Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTMH) berkapasitas 2 x 1,75 MW yang berlokasi di Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara. Proyek PLTMH ini menggunakan sistem *run-off river* dengan memanfaatkan aliran Sungai Sinandaka untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik tanpa perlu membendung sungai.

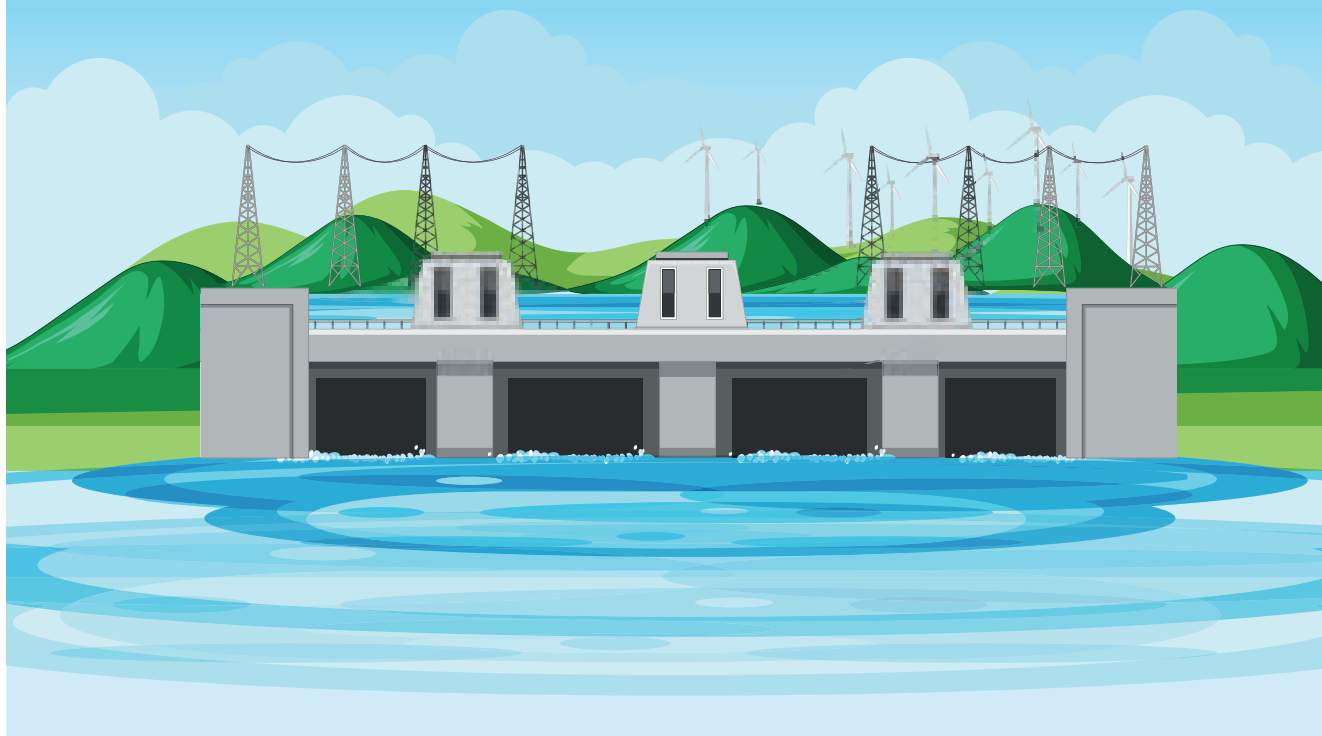
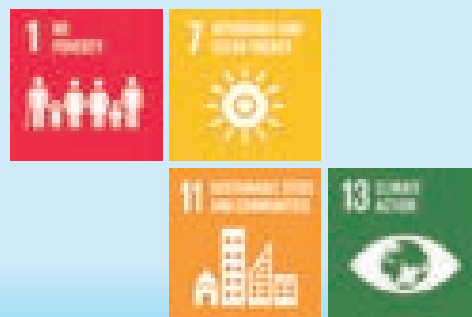
Selain di Bolaang Mongondow Selatan, IIF juga memberikan dukungan untuk pembangunan PLTMH berkapasitas 2 x 5 MW yang berlokasi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Proyek ini juga menggunakan sistem *run-off river* dengan memanfaatkan aliran Sungai Koro Yaentu.

Kedua proyek ini diharapkan dapat membantu Indonesia dalam mencapai target bauran EBT sebesar 23% dari total energi yang digunakan hingga 2025.

IIF has agreed to provide a long-term loan facility to support the use of New and Renewable Energy (EBT) through the construction of a Mini Hydro Power Plant (PLTMH) with a capacity of 2 x 1.75 MW located in South Bolaang Mongondow, North Sulawesi. This PLTMH project uses a run-off river system where the water stream from the Sinandaka River is used to drive power generator turbines without having to build a dam.

In addition to Bolaang Mongondow Selatan, IIF has also provided financial assistance for the construction of a 2 x 5 MW MHP located in Poso Regency, Central Sulawesi. This project also uses a run-off river system by utilizing the Koro Yaentu River flow.

These two projects are expected to help Indonesia achieve the targeted 23% Renewable Energy mix of the total energy used by 2025.



MELESTARIKAN LINGKUNGAN

Preserving the Environment



➤ IIF memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan dan bertanggung jawab terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai untuk melaksanakan tanggung jawab lingkungan yang sesuai dengan Prinsip S&E.

IIF has a strong commitment to environmental preservation and ensures that all of the projects it finances fulfill their environmental responsibilities in accordance with the S&E Principles.

Salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawab IIF untuk memitigasi dampak negatif dari pembangunan infrastruktur adalah dengan menerapkan mekanisme pembiayaan yang terintegrasi dengan Prinsip S&E. Prinsip S&E tersebut memperhatikan bagaimana suatu proyek melakukan pengelolaan dan penilaian terhadap aspek lingkungan, pencegahan dan pengurangan polusi serta perubahan iklim, konservasi terhadap keanekaragaman hayati, serta pengelolaan sumber daya alam.

One form of IIF's commitment and responsibility to mitigate the negative impacts of infrastructure development is to implement a financing mechanism that is integrated into the S&E Principles. The S&E principles offer guidelines on how a project should manage and assess environmental aspects, prevent and reduce pollution and climate change, conserve of biodiversity, and manage of natural resources.

Pada tahun 2021, proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai IIF telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan seperti peralihan energi konvensional ke energi baru terbarukan, pengurangan karbon dan emisi, dan penyediaan air bersih.

In 2021, infrastructure projects financed by IIF contributed to environmental quality improvements such as energy shift from conventional to renewable energy, carbon and emission reduction, and the provision of clean water supply.

Pasokan Air ke Masyarakat

Water Supplied to Communities

Region	Jumlah Kapasitas Total Capacity		
	2019	2020	2021
East Java	4.000.00	5.000	5.000
Lampung	825	825	825
Banten	4.400	4.750	4.750
DKI Jakarta	10.200	10.200	10.200
Riau	-	-	750
Total	19.425	20.775	21.525

Region	Jumlah Pengguna (Rumah Tangga) Total Number of User (Household)		
	2019	2020	2021
East Java	400.000	500.000	500.000
Lampung	60.000	60.000	60.000
Banten	254.768	262.768	262.768
DKI Jakarta	435.777	435.777	435.777
Riau	-	-	61.000
Total	1.150.545	1.258.545	1.319.545

Kontribusi IIF terhadap Target Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

IIF's Contribution to the Regional Energy General Plan (RUED) Target

Region	Renewable Energy Types	Total Capacity (MW)			Total Regional Produced Target (MW) - RUED ¹⁾	% IIF Contribution to RUED
		2019	2020	2021		
North Sumatera	Hydropower Plant	180	180	180	4.935	4,01
	Minihydro Power Plant	10	18	18		
West Sumatera	Minihydro Power Plant	10	10	10	1.244	0,80
Aceh	Biomass Power Plant	12	12	12	2.530	0,47
North Sulawesi	Minihydro Power Plant	-	-	3,5	371	0,94
Central Sulawesi	Minihydro Power Plant	21,1	21,1	26,1	1.546	1,69
South Sulawesi	Wind Farm	70	70	70	2.411	2,90
Gorontalo	Solar PV	2	2	2	97	2,06
West Java	Minihydro Power Plant	7,4	7,4	7,4	8.767	2,67
East Java	Geothermal Power Plant	227	227	227	4.230	2,60
	Geothermal Power Plant	110	110	110		
Total		649,5	657,5	666	26.131	2,55

¹⁾ IESR (2019). Laporan Status Energi Bersih Indonesia: Potensi, Kapasitas Terpasang, dan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan 2019

Pengurangan Karbon dari Energi Terbarukan [305-5]**Carbon Reduction from Renewable Energy [305-5]**

Region	Renewable Energy Types	Emission Reduction (TCO ₂ eq)		Number of People Served	
		2020	2021	Household	Person
North Sumatera	Hydropower Plant	1. 137. 183,80	1. 137. 183,80	160. 551	802.755
	Minihydro Power Plant	93. 965,54	110. 752,74	18. 000	90. 000
West Sumatera	Minihydro Power Plant	24. 703,20	51. 891,43	10. 000	50. 000
Aceh	Biomass Power Plant	61. 294,80	61. 294,80	12. 000	60. 000
North Sulawesi	Minihydro Power Plant	-	16. 330,86	3. 500	17. 500
Central Sulawesi	Minihydro Power Plant	70. 749,91	99. 409,25	26. 100	130. 500
South Sulawesi	Wind Farm	206. 343,13	190. 723,90	70. 000	350. 000
Gorontalo	Solar PV	2. 385,65	2. 211,30	2. 000	10. 000
West Java	Minihydro Power Plant	24. 643,13	27. 469,30	7. 400	37. 000
East Java	Geothermal Power Plant	1. 036. 483,20	1. 036. 483,20	151. 099	755. 495
	Geothermal Power Plant	754. 498,80	754. 498,80	110. 000	550. 000
TOTAL		3. 412. 251,15	3. 488. 249,38	570. 650	2. 853. 250

ENERGI DAN EMISI

IIF berupaya untuk menggunakan energi secara optimal dan seefisien mungkin di seluruh kegiatan operasional. IIF terus mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan penghematan energi yang berdampak pada pengurangan emisi. Upaya ini dievaluasi secara berkala oleh divisi-divisi terkait yang berkoordinasi langsung dengan Direksi. [103-2][103-3]

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, sumber energi di Kantor Pusat berasal dari energi tidak terbarukan yakni energi listrik yang dibeli dari PLN dan Bahan Bakar Minyak (BBM). IIF belum menggunakan energi yang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk kegiatan operasional dikarenakan sumber energi untuk kantor pusat disediakan dan dikelola langsung oleh pihak Pengelola Gedung. [302-1]

Energi listrik yang digunakan untuk penerangan dan peralatan elektronik dihitung dengan mengakumulasi jumlah pemakaian listrik dalam satuan kWh yang tertera pada tagihan listrik dari bulan Januari sampai Desember 2021. Sedangkan konsumsi BBM diakumulasi dari total biaya pembelian BBM yang dikonversi menjadi satuan liter. [302-1]

Konsumsi Energi

Pada tahun 2021, total konsumsi energi IIF yang berasal listrik dan BBM sebesar 1.362 GJ. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh adanya pembatasan kegiatan operasional di kantor selama pandemi, di mana kegiatan *Work from Office* (WFO) dengan proporsi 50:50 dan 25:75 hanya berlangsung sekitar empat bulan pada 2021. Sedangkan intensitas energi yang dihitung dari total konsumsi energi listrik dan BBM dengan denominator jumlah karyawan adalah sebesar 11,74 GJ/karyawan. [302-1][302-3]

ENERGY AND EMISSIONS

IIF makes all possible efforts to use energy optimally and efficiently in all aspects of its operations. IIF consistently develops initiatives to increase energy savings that can reduce emissions. The efforts are evaluated periodically by the relevant divisions in direct coordination under the Board of Directors. [103-2][103-3]

The source of energy for operations at the Head Office is non-renewable electricity, supplied by the state utility provider PLN, and fossil fuel oil (BBM). The Company has not used New and Renewable Energy (EBT) for its operational activities since the source of energy for the main office is provided and managed directly by the Building Management. [302-1]

The energy used for lighting and electronic equipment is calculated by accumulating the amount of electricity consumption in kWh units charged on the electricity bill from January to December 2021. Meanwhile, fuel consumption is calculated from the accumulation of total cost of purchasing fuel and converted into liters. [302-1]

Energy Consumption

In 2021, IIF's total energy consumption in terms of electricity and fuel is 1,362 GJ. This was a lower figure from the previous year largely due to the restrictions on operational activities in the office during the pandemic, where *Work from Office* (WFO) activities with a proportion of 50:50 and 25:75 were carried out for only four months in 2021. Meanwhile, energy intensity that was calculated by dividing the total consumption of electricity by total employees was 11.74 GJ/employee. [302-1][302-3]

Tren Konsumsi Energi [F.6][302-1]

Energy Consumption Trend

	Energi Energy	Satuan Unit	2019	2020	2021	Perubahan Changes
	BBM ¹ Fuel	Liter	24.627	15.936	15.625	-311
		GJ	918	594	583	-11
	Listrik ² Electricity	kWh	262.232	217.645	216.263	-1.382
		GJ ³	944	784	779	-5
	Total Penggunaan Listrik dan BBM (GJ) Total Electricity and Fuel Consumption (GJ)		1.862	1.378	1.362	-16

Keterangan | Notes:

¹ Konsumsi bahan bakar dalam liter dihitung berdasarkan jumlah bahan bakar yang dibeli (Rp) dibagi dengan harga bahan bakar per liter (asumsi 1 liter = Rp9.000)
Fuel consumption in litres is calculated based on the amount of fuel purchased (Rp) divided by the price of fuel per litre (assume 1 litre = Rp9,000)

1 Liter = 10,36 kWh | 1 Litre = 10.36 kWh

² Penggunaan listrik kWh diperoleh berdasarkan pengukuran tagihan listrik kWh gedung kantor IIF
kWh electricity usage is obtained based on the IIF office building kWh electricity bill measurement

³ Konsumsi listrik dikonversi dari kWh ke Gigajoule menggunakan Greenhouse Gas Protocol Initiatives (2005), di mana 1 kWh = 3.600.000 Joule = 0,0036 GJ
Electricity consumption is converted from kWh to Gigajoules using the Greenhouse Gas Protocol Initiatives (2005), where 1 kWh = 3,600,000 Joule = 0,0036 GJ

Rasio Intensitas Energi [F.6][302-3]

Energy Intensity Ratio [F.6][302-3]

Rasio Energi per Karyawan

Ratio of Energy per Employee

Tahun Year	Total Energy (GJ)	Jumlah Karyawan Total Employees	GJ/Karyawan GJ/Employee
2019	1.863	98	19,01
2020	1.378	106	13,00
2021	1.362	116	11,74

Rasio Energi per Area Kantor

Ratio of Energy per Office Area

Tahun Year	Total Konsumsi Listrik (GJ) Total Electricity Consumption (GJ)	Area Kantor Office Area m ²	GJ/m ²
2019	944	2.600	0,36
2020	784	2.600	0,30
2021	779	2.600	0,30

Selain menghitung konsumsi energi, IIF juga menghitung dan mencatat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan dari Cakupan 1 dan Cakupan 2 sebagai dampak dari penggunaan energi yang dilakukan dalam kegiatan operasional. [103-2]

Emisi GRK Cakupan 1 (*Scope 1*) didapat dari sumber energi BBM yang digunakan dalam kendaraan operasional karyawan saat melakukan pertemuan dengan klien dan kunjungan ke lokasi proyek. Sedangkan emisi GRK Cakupan 2 (*Scope 2*) didapat dari asumsi penggunaan listrik yang dibeli dari PLN untuk digunakan di Kantor Pusat. [305-1][305-2]

Seperti dijelaskan sebelumnya, penurunan emisi sebagian besar dipengaruhi oleh adanya pembatasan kegiatan operasional di kantor selama pandemi, di mana kegiatan *Work from Office* (WFO) dengan proporsi 50:50 dan 25:75 dilakukan hanya selama empat bulan pada tahun 2021.

In addition to calculating energy consumption, IIF also calculates and records Greenhouse Gas (GHG) emissions resulting from Scope 1 and Scope 2 as the impact of energy consumption in operational activities. [103-2]

Scope 1 of GHG emissions is obtained from fuel energy sources used for employees' operational vehicles when they have meetings with clients and visit project sites. Meanwhile, Scope 2 of GHG emissions is the assumed consumption of electricity used at the Head Office purchased from PLN. [305-1][305-2]

As also mention above, the emission reduction was largely due to the restrictions on operational activities in the office during the pandemic, where *Work from Office* (WFO) activities with a proportion of 50:50 and 25:75 were carried out for only four months in 2021.

Melihat karakteristik IIF yang bergerak di bidang jasa keuangan, IIF tidak melakukan perhitungan emisi selain CO₂ seperti Zat Perusak Ozon (*Ozon Depleting Substance* – ODS). **[305-6] [305-7]**

Given its business nature as a company engaged in financial services, IIF does not calculate emissions other than CO₂ such as emissions of Ozone Depleting Substances (ODS). **[305-6] [305-7]**

Total Emisi GRK yang Dihasilkan (ton CO₂-eq) (Cakupan 1 dan 2) **[F.11][305-1][305-2]**

Total GHG Emissions Generated (tonnes CO₂-eq) (Scope 1 and 2)

Sumber Emisi Source of Emission	2019	2020	2021
BBM (Cakupan 1) Fossil Fuel (Scope 1)	51,06	33,04	32,40
Listrik (Cakupan 2) Electricity (Scope 2)	228,14	189,35	188,15
Total	279,20	222,39	220,55

Catatan | Notes:

- Perhitungan Emisi Konsumsi Listrik (Cakupan 2) menggunakan Faktor Emisi (FE) GRK Sistem Interkoneksi Tenaga Listrik Tahun 2019 Jakarta (ESDM, 2019)
FE (ex-Post) 0,87 tonCO₂/MWH
Electricity Consumption Emissions (Scope 2) is calculated the GHG Emission Factor (FE) of the 2019 Jakarta Electric Power Interconnection System (ESDM, 2019)
FE (ex-Post) 0.87 tonCO₂/MWH
- Perhitungan Emisi Konsumsi BBM (Cakupan 1) mengacu pada IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (2006) dengan rincian sebagai berikut:
The calculation of BBM Consumption Emissions (Scope 1) refers to the IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (2006) with the following details:

	Faktor Konversi (kg/TJ) Conversion Factor (kg/TJ)	Berat Jenis (ton/L) Specific Gravity (ton/L)	Net Calorific Value (TJ/ton)
Bensin Gasoline	69.300	0,00068	0,044

Rasio Intensitas Emisi **[F.11][305-4]**

Emission Intensity Ratio **[F.11][305-4]**

Rasio Emisi per Karyawan

Ratio of Emission per Employee

Tahun Year	Total Emisi (ton CO ₂ -eq) Total Emission (ton CO ₂ -eq)	Jumlah Karyawan Total Employees	ton CO ₂ -eq /karyawan ton CO ₂ -eq/employees
2019	279,20	98	2,85
2020	222,39	106	2,10
2021	220,55	116	1,90

Catatan | Notes:

- Total emisi yang digunakan dalam perhitungan adalah kombinasi emisi bahan bakar (Cakupan 1) dan listrik (Cakupan 2)
Total emission used in the calculation is a combination of fuel (Scope 1) and electricity (Scope 2) emission

Rasio Emisi per Area Kantor

Ratio of Emission per Office Area

Tahun Year	Total Emisi dari Konsumsi Listrik (ton CO ₂ -eq) Total Emission from Electricity Consumption (ton CO ₂ -eq)	Area Kantor Office Area m ²	ton CO ₂ -eq/m ²
2019	228,14	2.600	0,088
2020	189,35	2.600	0,073
2021	188,15	2.600	0,072

Pengurangan Konsumsi Energi dan Emisi

Pengurangan energi yang terjadi di 2021 lebih banyak didorong oleh adanya pembatasan kegiatan operasional di kantor selama pandemi. IIF akan menyusun beberapa inisiatif terkait penghematan energi untuk memastikan konsumsi energi tidak secara signifikan bertambah setelah kondisi pandemi selesai dan kembali normal (100% WFO).

Reducing Energy Consumption and Emissions

The energy reduction achieved in 2021 was driven more by the operational restrictions in the office during the pandemic. IIF will develop several initiatives in energy saving to ensure the energy consumption does not significantly increase after the pandemic is over and things return to normal (100% WFO).

Trend Pengurangan Konsumsi Energi dan Emisi [F.7][F.12][302-4][302-5][305-5]

Trend of Energy Consumption and Emission Reduction

Tahun Year	Penghematan Energi (GJ) Energy Saving (GJ)	Pengurangan Emisi (TonCO ₂ -eq) Emission Reduction (TonCO ₂ -eq)
2021	-16	-1,84
2020	-484	-56,81
2019	-78	30,21

Konsumsi Energi dan Emisi Proyek**[302-2][305-3]**

Selain menghitung energi yang digunakan untuk operasional Perusahaan, IIF juga mulai melakukan upaya untuk mencatat konsumsi energi dan emisi yang dihasilkan dari proyek-proyek yang dibiayai. Di tahun 2021, IIF mencoba mengambil sampel perhitungan konsumsi energi dan emisi dari empat sektor di empat lokasi proyek.

Energy Consumption and Emissions of Projects [302-2][305-3]

In addition to calculating the energy used for its operations, IIF has also made efforts to record energy consumption and emissions generated from the projects it finances. In 2021, IIF took a sample calculation of energy consumption and emissions from four sectors in four project sites.

Sektor Sector	Sampel Proyek Project Sample	Lokasi Location	Konsumsi Listrik Electricity Consumption	Emisi Cakupan 1 Emission Scope 1	Emisi Cakupan 2 Emission Scope 2	Total Emisi Total Emission
Drinking Water	Processed Drinking Water	Sumatera	1.566.486	7,09	1.303,31	1.310,40
Telecommunication & Informatics	Telecommunication Network Provider	Java	696.000	136,94	610,39	747,33
Oil and Gas	Oil and Gas Refinery/ Processing	Kalimantan	5.813	43,12	5,09	48,21
Others	Multi Infrastructure Projects	Sulawesi	128.604	518,94	112,79	631,73

PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH [F.8][F.13][F.14][F.15]

Meski sifat dan karakteristik usaha IIF yang tidak bersinggungan langsung dengan alam dan tidak berdampak langsung dengan lingkungan, kami tetap berupaya untuk menggunakan air secara bijak dan melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan *best practice* pengelolaan limbah perkantoran. **[103-2][303-1]**

Selama tahun 2021, IIF telah menggunakan air yang bersumber dari PDAM untuk kegiatan operasional kantor yang disediakan dan dikelola langsung oleh pengelola gedung. IIF tidak melakukan perhitungan volume air, mengingat penggunaan air terintegrasi ke dalam fasilitas sewa gedung. **[F.8][303-1][303-3][303-5]**

Kegiatan usaha IIF bergerak di sektor jasa keuangan, sehingga IIF tidak menghasilkan limbah dalam bentuk ataupun jumlah yang signifikan, selain limbah perkantoran (seperti kertas). Dengan demikian, IIF tidak mengukur ataupun mengelola limbah atau efluen berskala industri. **[F.13][303-2][303-4]**

IIF tidak menghasilkan limbah yang berbahaya dan tidak pernah menghasilkan tumpahan dari limbah cair. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional hanya berupa sampah perkantoran seperti sampah organik dan sampah kertas yang langsung dikelola oleh pengelola gedung untuk dikirimkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). **[F.14][F.15]**

WATER AND WASTE MANAGEMENT [F.8][F.13][F.14][F.15]

Although by business nature and characteristics IIF business is not in direct contact with the nature and does not have a direct impact on the environment, we are using water wisely and manage our office waste in accordance with best practice. **[103-2][303-1]**

During 2021, IIF used water sourced from PDAM for office operational activities which is provided and managed by the Building Management. IIF does not calculate the volume of water, considering that water use is integrated into the building rental facility. **[F.8][303-1][303-3][303-5]**

IIF is engaged in the financial services sector, so IIF does not produce waste in significant forms or quantities, other than office waste (such as paper). As such, IIF does not measure or manage industrial-scale waste or effluents. **[F.13][303-2][303-4]**

Neither does IIF produce hazardous waste nor produces spills from liquid waste. The waste generated from operational activities is only in the form of office waste such as organic waste and paper waste which is managed by the Building Management who sent it to the Final Disposal Site (TPA). **[F.14][F.15]**

Selama pandemi COVID-19 di tahun 2021, IIF menerapkan kebijakan kerja dari rumah (*work from home – WFH*), dimana beberapa proses dokumentasi dilakukan lebih banyak secara digital tanpa kertas. Hal ini mengurangi konsumsi kertas sebanyak 7% (dari 150 rim di tahun 2020 menjadi 140 rim di 2021). Selain itu, IIF juga mencatat adanya pengurangan dalam biaya konsumsi *toner* atau tinta *printer* sebanyak 16,5% (total biaya dari Rp46,1 juta di 2020 menjadi Rp38,5 juta di 2021).

During the COVID-19 pandemic in 2021, IIF implemented a Work from Home (WFH) policy, where often-times some documentation processes were carried out digitally or paperless. This practice reduced paper consumption by 7% (from 150 reams in 2020 to 140 reams in 2021). In addition, IIF also noted a reduction in the cost of consumption of toner or printer ink by 16.5% (total costs from Rp46.1 million in 2020 to Rp38.5 million in 2021).

Konsumsi Kertas Paper Usage

Tahun Year	Jumlah Penggunaan (Rim) Total Usage (Reams)	Perubahan (%) Changes (%)
2019	745	40,57
2020	150	-79,87
2021	140	-6,67

Konsumsi Toner/Tinta Printer Toner/Ink Consumption

Tahun Year	Jumlah (Rp) Total (Rp)	Perubahan (%) Changes (%)
2019	163.487.252	26,07
2020	46.118.268	-71,79
2021	38.506.148	-16,51

IIF juga melakukan inisiatif penggunaan material yang dapat digunakan berulang dan di daur ulang dalam kegiatan operasional kantor untuk mengurangi sampah kertas dan plastik. Inisiatif yang dilakukan antara lain dengan menggunakan kertas bekas untuk keperluan pencetakan internal dan *draft* kerja, menghindari penggunaan air kemasan sekali pakai dan menggantinya dengan botol air berbahan gelas yang dapat dikembalikan ke penjual, hingga menyediakan botol air (*tumbler*) yang dapat digunakan kembali untuk karyawan. **[F.5]**

IIF also initiated the use of reusable and recyclable materials in office operations to reduce paper and plastic waste. The initiatives included using used paper for internal printing and work drafts, avoiding the use of single-use bottled water and replacing it with glass water bottles that can be returned to sellers, and providing reusable water bottles for employees.

[F.5]

KEANEKARAGAMAN HAYATI **[F.9][F.10]**

Pelestarian keanekaragaman hayati merupakan salah satu aspek penting dalam strategi keberlanjutan IIF yang sudah tertuang dalam Prinsip S&E yakni Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. **[103-1]**

Pada tahun 2021, tidak terdapat biaya terkait dengan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh IIF yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pelestarian keanekaragaman hayati, secara langsung dilakukan di tingkat proyek berdasarkan rekomendasi dari IIF untuk proyek-proyek yang dibiayai. **[F.4]**

Kegiatan operasional IIF seluruhnya berlangsung di Kantor Pusat di Jakarta sehingga tidak ada kegiatan operasional yang berada atau berdekatan dengan daerah konservasi yang dilindungi pemerintah ataupun daerah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Oleh karena itu, kegiatan bisnis IIF tidak berdampak secara langsung terhadap keanekaragaman hayati. **[304-1][304-2]**

BIODIVERSITY **[F.9][F.10]**

Biodiversity conservation is one of the important aspects of IIF's sustainability strategy which has been stated in the S&E Principles, namely Biodiversity Conservation and Natural Resources Management. **[103-1]**

In 2021, IIF did not directly incur any environmental-related costs in its operational activities. Environmental management measures, including biodiversity conservation, are taken by each of the projects financed by IIF based on the recommendations that IIF has provided to them. **[F.4]**

IIF runs its entire business operations at its Head Office in Jakarta, meaning that none of its operational activities are carried out near or within government-protected conservation areas or areas which have a dense population of biodiversity. It is safe to say that the IIF's business activities do not have a direct impact on biodiversity. **[304-1][304-2]**

Meski demikian, IIF tetap memperhatikan aspek keanekaragaman hayati dari setiap proyek yang akan dibiayai. Kami memastikan tersedianya dukungan studi yang memadai serta menyusun rencana mitigasi apabila sebuah proyek berada di kawasan konservasi atau keanekaragaman hayati yang tinggi. **[103-2]**

IIF akan meminta setiap proyek yang dibiayai untuk melakukan penapisan terhadap area yang dilindungi secara hukum sebagaimana ditentukan oleh pemerintah, untuk memastikan semua persyaratan hukum setempat terpenuhi. IIF juga meninjau apakah wilayah proyek berada di Wilayah Keanekaragaman Hayati Utama (*Key Biodiversity Areas* - KBA) yang diakui secara internasional dan wilayah kritis lainnya yang diketahui dan diterima oleh komunitas ilmiah.

Apabila lokasi proyek yang akan didanai berada di dalam atau sekitar KBA, maka proyek harus mengembangkan strategi Hirarki Mitigasi (*Mitigation Hierarchy*). Jika pembukaan lahan di KBA tidak terhindarkan, IIF memberlakukan skema penggantian kerugian nilai keanekaragaman hayati bagi proyek yang didanai, yang mengikuti prinsip “setara (*Net Loss*) atau lebih baik (*Net Gain*).” Ini berarti bahwa nilai keanekaragaman hayati yang digantikan oleh proyek haruslah setara atau lebih baik dari kondisi KBA sebelum proyek tersebut dilakukan.

Beberapa proyek infrastruktur yang dibiayai IIF mungkin memiliki kebutuhan lahan yang luas, misalnya proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan infrastruktur linier seperti jalan dan rel kereta api. Pembukaan lahan tersebut dapat berdampak pada adanya perubahan tutupan lahan yang berpotensi merusak habitat atau ekosistem di sekitar lokasi proyek, meningkatnya erosi dan aliran air permukaan pada musim penghujan, meningkatnya polusi udara akibat debu pada musim kemarau, perubahan kualitas lingkungan (seperti kualitas air dan udara), dan lain sebagainya. **[304-3]**

Dengan strategi pengelolaan yang holistik, IIF dapat mendukung langkah yang diambil klien untuk mengadopsi praktik pengelolaan yang adaptif dalam pelaksanaan tindakan mitigasi, serta pengelolaan yang responsif terhadap perubahan kondisi dan hasil dari pemantauan selama siklus hidup proyek.

PENGADUAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP **[F.16][103-3]**

Pada tahun 2021, IIF tidak menerima keluhan dari masyarakat terkait kasus pencemaran lingkungan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan dari praktik bisnis atau kegiatan operasional kantor IIF secara langsung.

Selain itu, IIF juga melakukan pemantauan dan pencatatan terkait dengan keluhan-keluhan yang diterima oleh setiap proyek-proyek yang dibiayai IIF dari pihak eksternal termasuk masyarakat. IIF turut bertanggung jawab untuk memastikan client melakukan penanganan terhadap keluhan yang diterima, termasuk melakukan investigasi, menentukan tindak lanjut yang diperlukan, hingga melaporkan hasilnya. Pada tahun 2021, mayoritas keluhan yang dicatat adalah terkait keluhan terhadap aspek sosial proyek.

However, IIF attends very closely to the biodiversity aspect of every project that it is about to finance. We ensure the availability of adequate study and develop a mitigation plan if a project happens to be located in a conservation area or high biodiversity. **[103-2]**

IIF will require each financed project to screen legally protected areas as determined by the government to ensure that all local legal requirements are met. IIF also reviews whether the project area is in the internationally recognized Key Biodiversity Areas (KBA) and other critical areas recognized and accepted by the scientific community.

If the project location to be funded is in or around the KBA, the project must develop a Mitigation Hierarchy strategy. If land clearing in KBA is unavoidable, IIF applies a biodiversity offset scheme for the funded projects, which follows the principle of “Net Loss or Net Gain”. This means that the replacement of biodiversity value by the project must be equal to or better than the KBA condition before the project was implemented.

Some of the infrastructure projects financed by IIF may have large land requirements, for example, hydroelectric projects (PLTA), and linear infrastructures such as roads and railways. Land clearing can have an impact on land cover changes that can give damages to the local habitats or ecosystems around the project site, increase erosion and surface water flow during the rainy season, increase air pollution due to dust in the dry season, change environmental quality (such as water and air quality), and more other impacts. **[304-3]**

With a holistic management strategy, IIF supports the steps taken by clients to adopt adaptive management practices in the implementation of their mitigation actions and be responsive to changing conditions and keep monitoring the results during the project life cycle.

GRIEVANCES RELATED TO ENVIRONMENTAL ASPECTS **[F.16][103-3]**

In 2021, IIF did not directly receive any complaints from the public on cases of environmental pollution nor non-compliance with environmental regulations from its business practices or IIF office operational activities.

In addition, IIF also monitors and records complaints received by every IIF-funded project from external parties including the community. IIF is also responsible for ensuring that clients handle complaints received, including conducting investigations, determining the necessary follow-up actions, and reporting the results. In 2021, the majority of complaints recorded were about the social aspects of the project.

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sulawesi Selatan

Biodiversity Management at the Wind Power Plant (PLTB) Project in South Sulawesi

Setiap tahunnya proyek PLTB yang dibiayai oleh IIF melakukan pencatatan terhadap tingkat kematian Burung dan Kelelawar yang bertabrakan langsung dengan bilah turbin yang beroperasi di Sulawesi Selatan. Pada tahun pertama beroperasi di 2018, jumlah kematian kelelawar yang tinggi menjadi perhatian yang khusus dari proyek tersebut.

Namun angka ini berangsur turun di tahun 2019 dan 2020. Penurunan tersebut kemungkinan dapat terjadi setelah proyek dapat mempelajari perilaku dari fauna tersebut, melakukan distribusi tanaman jagung secara geografis, serta menggunakan insektisida secara intensif yang dibantu oleh para petani lokal. Selain itu, proyek ini melakukan perubahan pada pencahayaan di sekitar turbin angin untuk mencegah burung, kelelawar, dan serangga mendekat.

Proyek ini juga melakukan koordinasi dengan Pusat Konservasi Cikananga dan meminta saran terkait karakteristik spesies burung dan kelelawar yang ada di sekitar lokasi dalam upaya mempelajari perilaku dari spesies tersebut.

Untuk menghindari adanya hewan yang memanjat tiang listrik, proyek melakukan pemasangan payung anti panjat dan *zinc plate* pada beberapa tiang listrik yang berada di area-area yang diidentifikasi terdapat penampakan satwa liar.

Tindakan mitigasi ini telah berhasil menurunkan risiko adanya hewan yang tersengat listrik. Proyek juga terus melakukan perawatan untuk mempertahankan jarak bebas 8 meter disepanjang jalur transmisi untuk mengurangi risiko hewan memanjat, pohon tumbang, serta risiko kebakaran.

Every year, the PLTB project operating in Sulawesi financed by IIF records the mortality rate of birds and bats that collide with its turbine blades. In its first year of operation in 2018, the project was pretty much concerned by the number of bats that died due to the collision.

However, this figure gradually decreased in 2019 and 2020. The decline likely occurred after a study on the behavior of these fauna, after which the project conducted geographic distribution of corn plants and used insecticides intensively with the assistance of local farmers. In addition, lightning around the turbine was also modified in a way that keep the birds, bats and insects from coming any nearer.

The project is also coordinating with the Cikananga Conservation Center and seeking advice on the characteristics of bird and bat species living in the vicinity of the site in an effort to further study their behaviors.

To prevent animals from climbing on power poles, the project installed anti-climbing umbrellas and zinc plates on several power poles located in areas where wildlife sightings were frequent.

This mitigation measure has succeeded in reducing the risk of animals getting electric shock. The project also does the maintenance of its 8-meter clearance passage along the transmission line to reduce the risk of climbing animals, fallen trees, and fire.



Photo Credit: Mira Adelina Halim

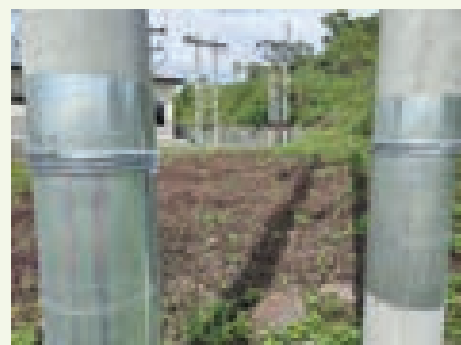


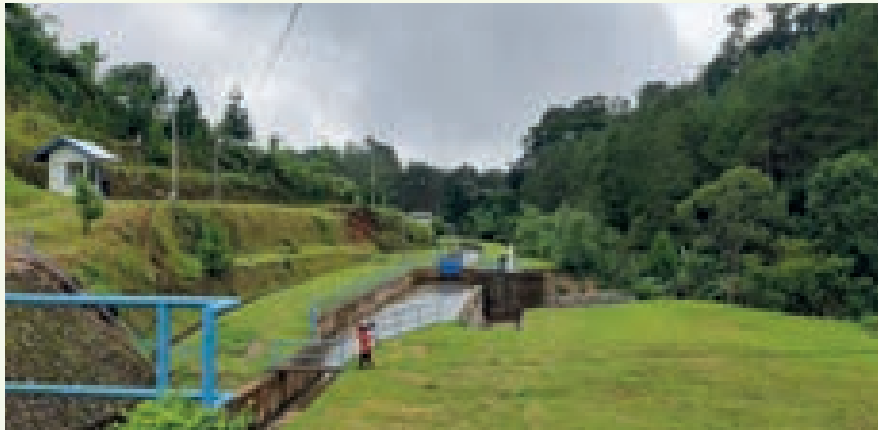
Photo Credit: Rangga Aji Nugraha

Pemasangan *zinc plate* pada tiang listrik untuk mengurangi risiko adanya ular atau binatang melata yang memanjat di jalur transmisi proyek PLTB di Sulawesi Selatan
Installation of zinc plates on power poles to reduce the risk of snakes or reptiles climbing on the transmission line of the PLTB project in South Sulawesi

Pemasangan payung anti panjat pada tiang listrik untuk mengurangi risiko mamalia yang memanjat di jalur transmisi proyek PLTB di Sulawesi Selatan
Installation of anti-climbing umbrellas on power poles to reduce the risk of climbing mammals on the transmission line of the PLTB project in South Sulawesi

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH) di Jawa Barat

Management of Biodiversity at the Mini Hydro Power Plant Project (MHP) in West Java



Waterway dengan penyeberangan khusus untuk masyarakat yang akan melintas dari kebun di lokasi proyek PLTMH di Jawa Barat
Waterway with a special crossing bridge for passers-by at MHP project site in West Java

Photo Credit: Dicka Andila Vebri

Berdasarkan hasil uji tuntas S&E yang dilakukan oleh IIF pada proyek PLTMH di Jawa Barat di tahun 2018, diketahui bahwa beberapa areal proyek berada di Kawasan Hutan Lindung dengan luas sekitar 4,5 Ha. Area tersebut utamanya akan digunakan untuk struktur saluran air (*waterway*) dan *penstock*.

Proyek telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pemanfaatan area tersebut. Namun, IIF meyakini adanya potensi pergerakan dari beberapa spesies mamalia ataupun burung yang memanfaatkan area proyek sebagai koridor habitat alami. Sehingga, IIF tetap merekomendasikan proyek ini untuk melakukan pemantauan keanekaragaman hayati terhadap beberapa spesies yang memasuki area proyek untuk kemudian dapat mengidentifikasi dan memantau pergerakan spesies tersebut serta mempelajari perilakunya untuk mengurangi risiko bahaya akibat operasional proyek.

Berdasarkan kunjungan SED di 2021, diketahui bahwa terdapat aktivitas satwa liar yang melintasi area proyek yang tidak hanya berpotensi untuk membahayakan para pekerja tetapi juga satwa liar tersebut. Hal ini sesuai dengan prediksi risiko yang sudah dianalisa oleh tim SED IIF di tahun 2018.

Sebagai bentuk pengelolaan, proyek telah melakukan pencatatan untuk setiap satwa liar yang melintasi proyek sesuai dengan rekomendasi IIF. Setiap pekerja yang bertugas di lokasi proyek juga sudah diberikan pengarahan dan memahami apa yang harus dilakukan jika mendapati adanya satwa liar yang masuk ke area proyek.

Untuk mengurangi risiko serupa, pihak proyek berencana untuk membangun *wildlife corridor* yang nantinya diharapkan dapat menjadi perlintasan bagi satwa liar khususnya untuk dapat menyeberangi *waterway*.

Based on the results of the IIF S&E due diligence on the MHP project in West Java in 2018, it is known that some of the project areas are located in a 4.5 ha Protected Forest Area. The area would be cleared and used for waterway and penstock structures.

The project has obtained the Forest Area Borrow-to-Use Permit for the utilization of the area. However, IIF believed that there is a potential movement of several species of mammals or birds from the area that was previously the natural habitat corridor of these species. Therefore, IIF did recommend this project to do biodiversity monitoring on mammals or birds that enter the project area so that they can identify and monitor the movement of these species and study their behavior to reduce the risk of harm due to project operations.

Based on SED visit in 2021, the team learnt that wildlife animals would often cross the project area, which would potentially harm not only project workers, but also the animals themselves. This occurrence fit the risk predictions that have been analyzed by the IIF SED team in 2018.

As a form of management, the project has been recording every wild animal that crosses the project in accordance with IIF recommendations. The project has briefed all of on-duty workers at the project site about what they need to do if they see wild animals entering the project area.

To reduce similar risks from happening, the project is planning to build a wildlife corridor which is later expected to be a passage way where the wild animals can cross the project area, especially the waterway.

MENGEMBANGKAN SDM BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS

Developing Quality Human Resources with Integrity



➤ IIF berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan berintegritas sehingga mampu menyiapkan diri menghadapi persaingan industri dan tantangan keberlanjutan yang semakin besar. [103-2]

IIF is committed to developing a pool of qualified and competent human resources, with high integrity who are capable of facing business competition and the increasingly challenging sustainability issues.

PRAKTIK KETENAGAKERJAAN

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting dalam keberlanjutan perusahaan. Dengan memiliki SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, Perseroan dapat mencapai target bisnis serta memberikan produk dan jasa berkelanjutan yang bermanfaat bagi banyak orang. [103-1]

Melihat bagaimana kinerja Perseroan sangat tergantung pada kualitas dan kompetensi SDM-nya, Perseroan memberikan prioritas pada pengembangan SDM guna memastikan tercapainya kinerja usaha yang berkelanjutan. Adapun pengelolaan dan pengembangan SDM tersebut berada di bawah tanggung jawab kepada Divisi SDM. [103-2]

LABOR PRACTICES

Human Resources (HR) is an important asset in the company's sustainability. Having qualified and competent human resources in the economic, social, and environmental fields enables the Company to reach its business targets and offer sustainable products and services that are beneficial for many people. [103-1]

Having learnt its strong reliance on the quality and competence of its HR, the Company gives priority to HR development to ensure it can deliver a sustainable business performance. The HR management and development are under the responsibility of the HR Division. [103-2]

Divisi SDM mengelola dan mengembangkan SDM secara terintegrasi dan selaras dengan tujuan dan rencana Perseroan. Sesuai dengan visi dan misinya, IIF ingin mengembangkan SDM yang berkualitas, kompeten, dan berintegritas sehingga mampu menyiapkan diri menghadapi persaingan industri dan tantangan keberlanjutan yang semakin besar. **[103-2]**

Divisi SDM juga bertanggung jawab untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan rekrutmen, pengembangan, remunerasi, kesejahteraan, dan penilaian kinerja SDM di lingkungan kerja IIF. **[103-2]**

KEBIJAKAN SDM

IIF memiliki tiga nilai inti yang menjadi dasar perumusan kebijakan SDM serta menjadi pedoman utama bagi karyawan. Seluruh karyawan IIF diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut baik pada saat bekerja dalam tim maupun saat berinteraksi dengan para mitra bisnis. Adapun nilai-nilai inti IIF, yaitu:



Selain berpedoman pada nilai-nilai inti di atas, IIF memiliki komitmen untuk selalu menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam merangkul seluruh karyawan. Kami memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk bekerja, mengembangkan karier, dan memperoleh promosi tanpa memandang suku, ras, agama, dan jenis kelamin. Selama tahun pelaporan 2021, IIF tidak menemukan tindakan diskriminasi yang terjadi dalam lingkup pekerjaan Perseroan. **[F.18][406-1]**

The HR Division run an integrated HR management and development consistent with IIF's corporate plans and goals. In accordance with its stated vision and mission, IIF seeks to develop a ready pool of qualified and competent HR with high integrity capable of facing business competition and the increasingly challenging sustainability issues. **[103-2]**

The HR Division is also responsible for other HR-related matters from recruitment, development, remuneration, welfare, and employee assessment in IIF's work environment. **[103-2]**

HR POLICY

IIF has three core values that serve as the basis for formulating HR policies and as main employee guidelines. IIF hopes that all of its employees implement these values both when working in a team and when interacting with business partners. The core values of IIF are:

In addition to using the above core values above as guidelines, IIF is committed to always upholding the principle of equality in its labor practice. We give equal opportunities to all employees to work, develop careers, and get promotions regardless of ethnicity, race, religion, and gender. During the 2021 reporting year, IIF did not find any acts of discrimination within the scope of the Company's work. **[F.18][406-1]**

IIF juga memiliki kebijakan terkait ketenagakerjaan di mana perusahaan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dan kerja paksa. Hal itu sesuai dengan UU no.13 tahun 2003 Pasal 68 tentang Ketenagakerjaan yang melarang perusahaan mempekerjakan anak dan UU no.19 tahun 1999 tentang Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa. **[F.19][103-1]**

Untuk menjalankan komitmen tersebut, IIF telah mengidentifikasi seluruh proyek dan rantai pasokan di seluruh wilayah operasional di Indonesia yang berpotensi mempekerjakan anak dan mempraktikkan kerja paksa. Hal itu juga tercantum dalam 8 Prinsip S&E untuk mengurangi dampak dan risiko dari masalah sosial dan lingkungan dari proyek infrastruktur yang dibiayai IIF. **[103-2][103-3][408-1][409-1]**

IIF also has an employment policy that prohibits the Company from employing minors and forced labor. This policy refers to Law no. 13 of 2003, Article 68 concerning Employment which prohibits corporations from employing children and Law no. 19 of 1999 concerning the ILO Convention on the Abolition of Forced Labor. **[F.19][103-1]**

To fulfill this commitment, IIF has identified all projects and supply chains in all areas where IIF's clients has operations in Indonesia where the potential to employ children and practice forced labor is high. This approach is specified in the 8 S&E Principles to reduce the impacts and risks of social and environmental issues from infrastructure projects financed by IIF. **[103-2][103-3][408-1][409-1]**

Profil Karyawan berdasarkan Gender **[C.3]**

Employee Profile based on Gender

Gender Gender	Jumlah Total	Persentase Percentage
Laki-laki Male	60	52%
Perempuan Female	56	48%
Total	116	100%

Profil Karyawan berdasarkan Jenjang Kepangkatan **[C.3]**

Employee Profile based on Office Ranks

Status Ketenagakerjaan Employment Status	Perempuan Female	Laki-laki Male	Jumlah Total	Persentase Percentage
Eksekutif Executive	6	20	26	22%
Manajer Madya Middle Manager	29	21	50	43%
Staf Staff	21	19	40	35%
Total	56	60	116	100%

Profil Karyawan berdasarkan Status Ketenagakerjaan **[C.3][102-8]**

Employee Profile based on Employment Status

Status Ketenagakerjaan Employment Status	Perempuan Female	Laki-laki Male	Jumlah Total	Persentase Percentage
Tetap Permanent	55	47	102	88%
Kontrak Contract	1	13	14	12%
Total	56	60	116	100%

Profil Karyawan berdasarkan Tipe Ketenagakerjaan **[C.3][102-8]**

Employee Profile based on Types of Employment

Status Ketenagakerjaan Employment Status	Perempuan Female	Laki-laki Male	Jumlah Total	Persentase Percentage
Full-time	56	59	115	99%
Part-time	0	1	1	1%
Total	56	60	116	100%

Profil Karyawan berdasarkan Kelompok Usia [C.3]

Employee Profile based on Age

Usia (tahun) Age (years old)	Perempuan Female	Laki-laki Male	Jumlah Total	Persentase Percentage
22-30	17	18	35	30%
31-40	23	24	47	41%
41-50	11	10	21	18%
51-54	5	8	13	11%
Total	56	60	116	100%

Profil Karyawan berdasarkan Pendidikan [C.3]

Employee Profile based on Education

Pendidikan Education	Perempuan Female	Laki-laki Male	Jumlah Total	Persentase Percentage
Diploma Diploma	2	3	5	4%
Sarjana Undergraduate	38	33	71	61%
Master atau lebih tinggi Graduate	16	24	40	35%
Total	56	60	116	100%

REKRUTMEN [401-1]

Pembangunan infrastruktur yang semakin pesat dan tuntutan terhadap aspek keberlanjutan yang semakin tinggi, membuat Perseroan berupaya untuk merekrut profesional muda yang kompeten dan memiliki kapabilitas dalam menjawab tantangan tersebut.

Untuk mengisi kebutuhan SDM yang berkualitas dan berintegritas, Perseroan telah melaksanakan proses seleksi dan rekrutmen yang komprehensif, dengan melibatkan masing-masing unit kerja guna memastikan bahwa tingkat kompetensi dan karakter para kandidat telah dapat memenuhi kebutuhan organisasi.

Proses perekrutan karyawan IIF dimulai dari identifikasi kebutuhan karyawan, spesifikasi karyawan yang diharapkan, pelaksanaan proses perekrutan dan masa pelatihan pengenalan organisasi (*induction training*) yang harus diikuti oleh seluruh karyawan baru. Proses perekrutan SDM ditujukan untuk dapat menjamin diperolehnya SDM yang berkualitas dan memiliki integritas yang baik.

Keseluruhan proses perekrutan SDM dapat dilakukan oleh IIF secara internal ataupun dengan menunjuk pihak luar seperti konsultan SDM dan organisasi yang secara independen melakukan analisis kebutuhan pegawai dan melaksanakan proses perekrutan pegawai tersebut.

Dalam melakukan proses perekrutan karyawan, IIF berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh calon karyawan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial, hubungan politik, dan aspek lainnya yang rentan mengalami diskriminasi. **[F.18]**

RECRUITMENT [401-1]

The rapid development of infrastructure and the increasing demands for sustainability have made the Company strive to respond to this increasing challenge by recruiting young and competent professionals.

To fill the need for quality and integrity human resources, the Company runs a comprehensive selection and recruitment process, which involves every unit to ensure candidate character and competency levels meet organizational needs.

IIF's employee recruitment process begins with the identification the current need for employee, the expected employee specifications, implementation of the recruitment process, and induction training that must be participated by all new employees. The HR recruitment process is aimed at ensuring that IIF has quality human resources that possess strong integrity.

IIF runs the entire HR recruitment process either internally or by appointing an HR consultant and organization who has the competency to analyze employee needs and run the employee recruitment process independently.

In running employee recruitment process, IIF is committed to providing equal opportunities to all prospective employees regardless of gender, ethnicity, race, religion, social status, political relations, and other aspects that are vulnerable to discrimination. **[F.18]**

Total karyawan IIF di tahun 2021 adalah sebanyak 116 karyawan dengan 48% dari jumlah tersebut adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa IIF tidak membatasi kesempatan dan keterlibatan karyawan perempuan dalam menjalankan proses bisnis di IIF, melainkan untuk terus mendorong inklusivitas dan menjamin pemenuhan hak-hak karyawan perempuan. Seluruh karyawan IIF juga telah memiliki kontrak kerja sesuai dengan kesepakatan. **[102-41]**

Selama tahun 2021, IIF telah merekrut 25 karyawan baru yang terdiri dari 13 karyawan laki-laki dan 12 karyawan perempuan.

Komposisi Karyawan Baru [401-1]

Composition of New employee

Kelompok Umur (tahun) Age Group (years old)	2021		
	Perempuan Female	Laki-laki Male	Total
22-30	7	7	14
31-40	4	4	8
41-50	1	1	2
51-55	0	1	1
Total	12	13	25

Catatan | Note:

Seluruh karyawan bekerja di Kantor Pusat IIF | All IIF employees work at the Head Office

Selain merekrut karyawan berkualitas dan berintegritas, Perseroan juga berupaya mempertahankan karyawan dengan memberikan berbagai fasilitas pendidikan dan pelatihan hingga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Meski demikian, Perseroan tidak berhak memaksa karyawan untuk terus bekerja di perusahaan. Sepanjang tahun 2021, terdapat 15 karyawan yang keluar dari perusahaan sehingga tingkat *turnover* karyawan selama periode pelaporan adalah sebesar 13%.

Demografi Karyawan yang Meninggalkan Perusahaan [401-1]

Demography of Employees who Resigned

Kelompok Umur (tahun) Age Group (years old)	2021		
	Perempuan Female	Laki-laki Male	Total
22-30	5	0	5
31-40	1	4	5
41-50	1	4	5
51-55	0	0	0
Total	7	8	15

Catatan | Note:

Seluruh karyawan bekerja di Kantor Pusat IIF | All IIF employees work at the Head Office

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [F.22][404-1][404-2]

Perseroan melakukan berbagai upaya untuk dapat memiliki karyawan yang berkualitas, kompeten, dan berintegritas. Hal ini dilakukan tidak hanya melalui proses seleksi dan rekrutmen, tetapi juga melalui penyediaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi baik secara teknis maupun non-teknis. Karyawan harus ditingkatkan

IIF had a total headcount of 116 in 2021, 48% of whom were women. This shows that IIF does not limit the opportunities and involvement of women employees in running business processes at IIF, instead, IIF continues to encourage inclusiveness and ensure the fulfillment of the rights of women employees. All employees of IIF as also has employment contract in accordance with the agreement. **[102-41]**

During 2021, IIF recruited 25 new employees consisting of 13 male employees and 12 female employees.

In addition to recruiting quality and integrity employees, the Company also strives to retain employees by providing various educational and training facilities to improve their welfare. However, the Company has no right to force employees to continue working at the company. Throughout 2021, 15 of the employees resigned, meaning that IIF had a 13% turnover rate during the reporting period.

EDUCATION AND TRAINING [F.22][404-1][404-2]

The Company makes various efforts to have qualified and competent employees with high integrity. This objective is to be achieved not only through the selection and recruitment process, but also through the provision of education, training, and competency development in both technical and non-technical aspects. Employees must improve their skills in

keahliannya dalam melaksanakan kegiatan operasional untuk menghadapi tantangan bisnis yang semakin dinamis. Hal ini membuat pengembangan SDM menjadi semakin penting agar perusahaan dapat terus berkembang dan berinovasi. **[103-1]**

Sebagai wujud komitmen IIF di bidang pengembangan sumber daya manusia, IIF telah mendorong karyawan untuk mengikuti program-program pelatihan untuk meningkatkan kualitasnya dengan kompetensi teknis, manajerial, dan *soft-skill* yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan usaha di masa depan. **[103-2]**

Melihat situasi pandemi COVID-19 masih belum berakhir pada tahun 2021, IIF melanjutkan pelatihan dan pengembangan berbasis daring seperti webinar atau pelatihan virtual. Adapun rata-rata jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan (tidak termasuk ExCom) mencapai 59 jam kerja per karyawan pada 2021. **[404-1]**

carrying out operational activities to face the increasingly dynamic business challenges. This makes HR development even more important for the Company to continue to grow and make innovations. **[103-1]**

As a form of IIF's commitment in the field of human resource development, IIF has encouraged employees to participate in training programs to improve their quality with the technical, managerial, and soft-skill competencies that are needed to face future business challenges. **[103-2]**

Learning that the COVID-19 pandemic situation was still lingering in 2021, IIF extended its online-based training and development programs such as webinars or virtual training. The average hours of training provided to employees (excluding ExCom) reached 59 working hours per employee in 2021. **[404-1]**

Jam Pelatihan Karyawan berdasarkan Gender dan Tingkat Jabatan **[F.22][404-1]**

Training Hour based on Gender and Office Rank

Keterangan Description	Jumlah Jam Pelatihan Total Training Hours		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Total
Senior Manager (ex. ExCom)	620	436	1.056
Middle Manager	985	1.210	2.195
Officer	1.852	1.453	3.305
Total	3.457	3.099	6.556

Jam Pelatihan berdasarkan Jenis Pelatihan **[404-2]**

Training Hour based on Type of Training

1) Pelatihan Internal | In-House Training

Keterangan Description	Jumlah Jam Pelatihan Total Training Hours		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Total
Senior Manager (ex. ExCom)	198	136	334
Middle Manager	366	338	704
Officer	806	409	1.215
Total	1.370	883	2.253

2) Pelatihan Umum | Public Training

Keterangan Description	Jumlah Jam Pelatihan Total Training Hours		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Total
Senior Manager (ex. ExCom)	422	300	722
Middle Manager	619	872	1.491
Officer	1.046	1.044	2.090
Total	2.087	2.216	4.303

Jam Pelatihan berdasarkan Tujuan Pelatihan [404-2]

Training Hour based on Training Objective

1) Pelatihan Soft Skill | Training on Soft Skill

Keterangan Description	Jumlah Jam Pelatihan Total Training Hours		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Total
Senior Manager (ex. ExCom)	109	20	129
Middle Manager	122	32	154
Officer	33	0	33
Total	264	52	316

2) Pelatihan Technical Skill | Training on Technical Skill

Keterangan Description	Jumlah Jam Pelatihan Total Training Hours		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Total
Senior Manager (ex. ExCom)	511	416	927
Middle Manager	863	1,178	2,041
Officer	1,819	1,453	3,272
Total	3,193	3,047	6,240

**Total Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021**

Total Employee Competency Development Expenses in 2021

Rp905.485.656**PENILAIAN KINERJA**

IIF senantiasa melakukan pemantauan dan penilaian kinerja karyawan untuk memastikan tercapainya visi dan misi Perseroan. Divisi SDM yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SDM telah melakukan program manajemen kinerja yang dikembangkan menggunakan modul penilaian berbasis *Key Performance Indicators* (KPI). Penilaian KPI dilakukan dua kali dalam waktu satu tahun dan 100% karyawan telah melakukan proses penilaian kinerja pada 2021 termasuk karyawan kontrak. [103-3][404-3]

PERFORMANCE ASSESSMENT

IIF continuously monitors and evaluates employee performance to ensure its vision and mission are achieved. The HR Division, as the division responsible for HR management, has developed and implemented a performance management program using a KPI-based assessment module. KPI assessment is conducted twice a year where in 2021, 100% of employees, including contract employees, made the performance appraisal process.

[103-3][404-3]

REMUNERASI DAN KESEJAHTERAAN

IIF meyakini bahwa dengan memberikan remunerasi dan kesejahteraan yang layak, maka dapat meningkatkan kinerja, produktivitas, dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Pemberian remunerasi dan kesejahteraan yang layak tentu menjadi elemen penting bagi Perseroan dalam mencapai target bisnis yang lebih baik pada masa depan.

Dalam menentukan remunerasi, IIF tidak melibatkan konsultan remunerasi, pemangku kepentingan, dan pihak ketiga lainnya. Paket remunerasi bagi karyawan, manajemen dan Komisaris disusun sedemikian rupa dengan menggunakan tolok ukur pasar, serta ditinjau dan disesuaikan secara berkala sehingga menempatkan IIF pada tingkat yang kompetitif dan diharapkan dapat menjadikan IIF sebagai perusahaan pilihan, baik untuk talenta eksternal maupun karyawan yang telah bergabung. **[102-36][102-37]**

Program Kesejahteraan untuk Seluruh Karyawan (Tetap dan Kontrak) **[401-2]**

a) Gaji dan Bonus Kinerja

Struktur gaji dan bonus kinerja yang diterima karyawan didasarkan pada tingkat atau pangkat masing-masing karyawan, ditambah dengan prestasi yang telah dicapai serta kontribusi yang diberikan kepada Perseroan. **[102-36]**

b) Fasilitas dan Tunjangan

Selain gaji pokok, tunjangan komunikasi dan transportasi, IIF juga memberikan fasilitas dan tunjangan lainnya, berupa:

- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
- Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan setahun sekali sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Penggantian biaya pengobatan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit, serta bersalin untuk karyawan dan anggota keluarganya;
- Tunjangan keanggotaan olahraga.

Standar gaji yang diberikan Perseroan juga sudah memenuhi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta di mana imbalan jasa karyawan tetap golongan terendah lebih tinggi 47% dari UMP. UMP DKI Jakarta pada tahun 2021 adalah sebesar Rp4.416.186,-. **[F.20]**

REMUNERATION AND WELFARE

IIF believes that it can improve employee performance, productivity, and loyalty to the Company by providing proper remuneration and welfare. The provision of proper remuneration and welfare is no doubt an important element for the Company in achieving better business targets in the future.

IIF does not involve remuneration consultants, stakeholders, and other third parties in determining employee remuneration. The remuneration structure for employees, management and Commissioners is benchmarked with the labor market, and is reviewed and adjusted regularly to place IIF at a competitive level and make it the company of choice, both for external talents and existing employees. **[102-36][102-37]**

Welfare Program for All Employees (Permanent and Contract) **[401-2]**

a) Salary and Performance Bonus

The salary structure and performance bonuses received by employees are based on the level or rank of each employee, plus the achievements and contributions they make to the Company. **[102-36]**

b) Facilities and Allowance

In addition to basic salary, communication and transportation allowances, IIF also provides other facilities and benefits, in the form of:

- Employment Social Security Administration Agency (BPJS);
- Health Social Security Administration (BPJS)
- Holiday Allowance (THR) which is given once a year in accordance with applicable regulations;
- Reimbursement for medical expenses for outpatient and inpatient in hospital, as well as maternity for employees and their family members;
- Sports membership.

The standard salary provided by the Company has also met the Provincial Minimum Wage (UMP) for DKI Jakarta where the salary for the lowest class of permanent employees is 47% higher than the UMP. The minimum wage for DKI Jakarta in 2021 was Rp4,416,186. **[F.20]**

Cuti Memiliki Anak

Selain memberikan remunerasi dan kesejahteraan, IIF juga memberikan fasilitas cuti melahirkan untuk karyawan perempuan (*maternity leave*) dan cuti memiliki anak untuk karyawan laki-laki bagi istrinya yang melahirkan (*paternity leave*). Hal ini sesuai dengan UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai hak pekerja/buruh untuk menggunakan hak waktu istirahat hamil dan melahirkan serta hak untuk mendapatkan upah penuh selama waktu tersebut. Pada 2021, sebanyak 6 karyawan telah mengambil cuti melahirkan dan cuti memiliki anak. **[401-3]**

Maternity and Paternity Leaves

In addition to providing remuneration and welfare, IIF also provides maternity leave facilities for female employees and paternity leave for male employees. This is in accordance with Law No. 13 of 2003 on Employment that specifically concern the rights of workers/laborers to have pregnancy leave or a leave after the female employees give birth to their babies and the right to receive full wages during that time. By 2021, 6 employees took maternity and paternity leaves. **[401-3]**

Keterangan Description	Gender Gender		Total
	Laki-laki Male	Perempuan Female	
Jumlah karyawan yang mengambil cuti melahirkan dan cuti memiliki anak Total Employees who took maternity and paternity leaves	2	4	6
Jumlah karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan dan cuti memiliki anak Number of employees who returned to work after maternity and paternity leaves	2	4	6
Jumlah karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan dan cuti memiliki anak, yang masih bekerja 12 bulan setelahnya* Total employees who returned to work after maternity and paternity leave, and still worked in the following 12 months*	1	6	7
Tingkat pekerja kembali bekerja (%) Return to work rate	100	100	100
Tingkat retensi (%) Retention Rate	50	150	116,67

LINGKUNGAN BEKERJA YANG AMAN DAN NYAMAN **[F.21]**

IIF berkomitmen untuk memberikan lingkungan bekerja yang aman dan nyaman kepada seluruh karyawan dengan memperhatikan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Selama masa pandemi, IIF memberikan fasilitas tambahan untuk menjaga kesehatan karyawan, mencegah penyebaran COVID-19, dan mempermudah kegiatan kerja dari rumah. Fasilitas tambahan dan kebijakan khusus tersebut di antaranya adalah: **[103-2][403-2][403-6]**

- Klaim vitamin untuk menguatkan daya tahan tubuh tanpa harus disertai dengan resep dokter;
- Klaim biaya transport dengan kendaraan umum yang bersifat pribadi (taksi) sebagai upaya untuk mencegah karyawan menggunakan kendaraan umum yang bersifat masal dan mengurangi potensi paparan COVID-19;
- Penyelenggaraan kegiatan vaksinasi dan *booster* bagi karyawan, keluarga, dan lingkungan terdekatnya;
- Pemeriksaan COVID-19 secara berkala sebelum karyawan masuk kantor, serta sebelum dan setelah kepulangan dari *site visit* ke proyek-proyek yang dikunjungi;
- Pemberian vitamin dan suplemen bagi karyawan dan keluarganya yang terpapar COVID-19;

SAFE AND COMFORTABLE WORKING ENVIRONMENT **[F.21]**

IIF is committed to providing a safe and comfortable work environment for all employees with due regards to Occupational Health and Safety (K3) aspects. During the pandemic, IIF has provided additional facilities to maintain employee health, prevent the spread of COVID-19, and facilitate the work from home practice. The additional facilities and special policies include: **[103-2][403-2][403-6]**

- Reimbursement for vitamins that employees can claim without doctor prescription, to strengthen their immune system;
- Reimbursement of transportation costs when employees have to take private public transportation (taxi) to keep them from taking a more mass public transportation and reduce potential exposure to COVID-19;
- Vaccination and booster activities for employees, their immediate families, and closest neighborhood;
- Periodic COVID-19 checks before employees enter the office, as well as before and after returning from visits to project site;
- Provision of vitamins and supplements for employees and their families who were exposed to COVID-19;

- Penyediaan paket karantina mandiri, apabila diperlukan;
- Klaim biaya komunikasi bagi karyawan yang mengalami kesulitan jaringan ketika bekerja dari rumah; dan
- Lain-lain seperti penyediaan masker serta pelaksanaan disinfektan secara *regular* dan menyeluruh di kantor pada kondisi WFO.

IIF juga telah melakukan pembentukan Tim Gugus Tugas COVID-19 Perseroan. Beberapa kebijakan K3 dilakukan untuk menghindari risiko paparan COVID-19. Tim Gugus Tugas COVID-19 yang dibentuk akan memberikan rekomendasi kepada manajemen terkait kebijakan yang perlu diambil untuk memitigasi risiko COVID-19 di tempat kerja.

IIF kemudian menerapkan kebijakan dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan kerja dan melakukan *swab* antigen karyawan setiap dua minggu sebelum kembali bekerja di kantor. Sebelum melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek klien, karyawan juga diminta untuk melakukan penilaian risiko COVID-19 di wilayah tujuan dengan mengisi lembar Penilaian Risiko Perjalanan (PRP) yang akan diperiksa oleh Divisi SDM dan disetujui oleh Direktur terkait. **[103-3][403-2]**

Pada 2021, tidak ada karyawan IIF yang mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. **[403-9] [403-10]**

MEKANISME PENGADUAN KETENAGAKERJAAN

Masalah-masalah ketenagakerjaan mungkin dapat terjadi di kalangan karyawan, mulai dari masalah pekerjaan, masalah pribadi, hingga perbuatan yang mengarah kepada tindakan diskriminasi dan pelecehan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Perseroan menyediakan sarana pengaduan melalui mekanisme yang meliputi sistem penilaian *Performance Appraisal*. Sistem ini mencakup *direct coaching* dan mekanisme *whistleblowing* yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan. **[103-3]**

Mekanisme *whistleblowing* Perseroan dibentuk untuk menyediakan jalur bagi karyawan yang ingin melaporkan segala bentuk intimidasi, diskriminasi, dan pelecehan hingga dugaan penipuan/perbuatan melanggar hukum. Setiap empat bulan sekali, manajemen mengadakan pertemuan dengan karyawan untuk membahas strategi atau solusi dari masalah-masalah yang ada secara *top-down*. **[103-3]**

- Provision of self-quarantine packages, if necessary;
- Reimbursement for communication costs for employees who had difficulties in accessing internet network when working from home; and
- Other facilities such as the provision of masks and regular and thorough disinfection in the office under WFO conditions.

IIF has also formed the Company's COVID-19 Task Force Team. Other OSH policies have also been implemented to avoid the risk of exposure to COVID-19. The COVID-19 Task Force Team formed would provide recommendations to management pertaining the policies that IIF needs to take to mitigate the risk of COVID-19 in the workplace.

IIF also implements a policy for strict health protocols in the work environment and conducts employee antigen swabs every two weeks before work-from-home employees return to office. Before each visit to the client's project site, employees are also asked to conduct a COVID-19 risk assessment in the destination area by filling out a Travel Risk Assessment (PRP) sheet which will be examined by the HR Division and approved by the relevant Director. **[103-3][403-2]**

In 2021, there were no injury or illness related to work happen to IIF employee. **[403-9] [403-10]**

EMPLOYMENT GRIEVANCE MECHANISM

Employment issues may occur among employees, from work problems, personal problems, to personal attitude that lead to acts of discrimination and harassment. To overcome these issues, the Company provides a means of complaint through a mechanism that includes a Performance Appraisal assessment system. This system includes direct coaching and a whistleblowing mechanism that has been regulated in the Company Regulations. **[103-3]**

The Company has a whistleblowing mechanism that has been set up to provide a media for employees who wish to report intimidations, discriminations, harassments, and alleged fraud/violation of the law. Every four months, management holds a meeting with employees to discuss strategies or solutions to existing problems on a top-down basis. **[103-3]**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Social Responsibility and Community Empowerment



➤ IIF secara konsisten mengantisipasi dan meminimalkan dampak negatif proyek-proyek terhadap masyarakat dan mendorong proyek untuk menyediakan sarana yang memadai untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan serta menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan di sepanjang siklus proyek.

IIF consistently anticipate and minimize the negative impacts of projects on the communities and encourages that the financed projects have adequate means with which they can engage the communities in the entire process of project development and maintain relationships with various stakeholders throughout the project cycle.

IIF memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan telah mendapatkan manfaat dari setiap kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui proyek-proyek yang dibiayai). Salah satu pemangku kepentingan yang berhak mendapatkan manfaat tersebut adalah masyarakat dan komunitas lokal.

IIF ensures that all stakeholders have benefited from each of the Company's business activities, either directly or indirectly (through financed projects). One of the stakeholders who are entitled to these benefits is the public and local communities who reside near the project area.

Meski pada praktiknya IIF tidak berhubungan langsung dengan masyarakat di sekitar lokasi proyek, IIF tetap memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan masyarakat dengan memastikan tersedianya program-program pemberdayaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. **[103-1]**

IIF terus berupaya untuk memberikan manfaat positif melalui dampak ekonomi tidak langsung yang bersumber dari kehadiran fasilitas dan infrastruktur yang dibiayai oleh IIF. Selain itu, pengelolaan aspek sosial untuk mengurangi dampak negatif dari proyek yang dibiayai oleh IIF juga dilakukan sesuai dengan penerapan Prinsip S&E IIF. **[103-2]**

Prinsip S&E IIF memastikan adanya pengelolaan terhadap aspek sosial dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh IIF, di antaranya yaitu, namun tidak terbatas pada:

- Mendorong penyediaan sarana pelibatan pemangku kepentingan;
- Memastikan keluhan dari masyarakat terdampak proyek (*Project Affected People – PAP*) dan komunikasi eksternal dengan pemangku kepentingan terkait ditanggapi dan dikelola dengan tepat;
- Menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak negatif terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat yang terdampak proyek;
- Menghindari pengusuran atau permukiman kembali secara paksa;
- Mengantisipasi dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi dari proses pembebasan lahan;
- Meningkatkan atau memulihkan penghidupan dan standar hidup masyarakat terdampak;
- Menghindari atau meminimalkan dampak negatif proyek terhadap Masyarakat Adat;
- Memastikan proses pembangunan menghormati hak asasi manusia, martabat, aspirasi, budaya, dan penghidupan berbasis sumber daya alam dari Masyarakat Adat;
- Menghormati dan melestarikan budaya, pengetahuan, dan praktik-praktik yang dimiliki Masyarakat Adat serta membangun dan menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan Masyarakat Adat selama siklus berjalan;
- Melindungi dan melestarikan warisan budaya dari dampak negatif kegiatan proyek.

DAMPAK OPERASI TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR

Kegiatan operasional IIF yang dilakukan di kantor pusat pada dasarnya tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang signifikan terhadap masyarakat di sekitar wilayah kantor. Meski demikian, IIF tetap memiliki tanggung jawab untuk membantu mengelola dampak sosial yang diakibatkan oleh proyek yang dibiayai serta membantu pengembangan masyarakat di sekitar wilayah proyek.

Although practically IIF does not have any direct contact with the communities that reside near the project site, IIF still bears the social responsibility to contribute to community development efforts by ensuring appropriate empowerment programs are implemented according to the community needs. **[103-1]**

IIF continues to strive to provide positive benefits through indirect economic impacts of the facilities and infrastructure financed by IIF. In addition, IIF also has its debtors manage the social aspects to reduce the negative impacts of their projects in accordance with the application of IIF's S&E Principles. **[103-2]**

IIF's S&E principles ensure the management of social aspects in the infrastructure development projects financed by IIF, including, but not limited to:

- Encouraging the provision of stakeholder engagement facilities;
- Ensuring that complaints from Project Affected People (PAP) and external communications with relevant stakeholders are responded to and managed appropriately;
- Avoiding or minimizing negative risks and impacts on the health, safety, and security of project-affected communities;
- Avoiding forced evictions or involuntarily resettlement;
- Anticipating and minimizing the social and economic impacts in land acquisition process;
- Improving or restoring the welfare and livelihood of relocated communities;
- Avoiding or minimizing the project's negative impacts on Indigenous Peoples;
- Ensuring that the development process fosters respect for the human rights, dignity, aspirations, culture, and natural resource-based livelihoods of Indigenous Peoples;
- Respecting and preserving the culture, knowledge, and practices of Indigenous Peoples and building while maintaining sustainable relationships with Indigenous Peoples throughout the cycle;
- Protecting and preserving cultural heritage from the negative impacts of project activities.

IMPACT OF OPERATIONS ON THE SURROUNDING COMMUNITIES

The operational activities that IIF carries out at the head office do not have a direct and significant negative social impact on the communities that reside near the office. However, IIF still bears the responsibility to help manage the social impacts caused by the projects it finances and assist the development of communities around the projects.

IIF melakukan proses uji tuntas untuk mengidentifikasi dampak-dampak sosial yang ditimbulkan oleh proyek serta memastikan kapasitas proyek dalam melakukan penerapan 8 Prinsip S&E. Dengan menerapkan standar internasional dalam pengelolaan S&E dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan tercapainya pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik infrastruktur namun juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar lokasi proyek. **[F.23][413-2]**

IIF does due diligence on each project to identify the social impacts the project may cause and ensure the project has the capacity to implement the 8 S&E Principles. By applying international standards in S&E management and implementing good corporate governance, IIF hopes to achieve a sustainable infrastructure development, which will not only focus on the infrastructure physical development but also on how to improve the quality of life of the nearby community and preserving the surrounding. **[F.23][413-2]**

Managing Grievances and Mitigating Social Conflicts for Project Sustainability

Project Case: Mini Hydro Power Plant Project in North Sumatera



Photo Source: Project Documentation (2021)

➤ Diskusi dengan masyarakat untuk menyelesaikan konflik sosial
Discussion with community to resolve the grievances

Pada tahun 2021, IIF menjalin hubungan yang erat dengan tim proyek untuk menyelesaikan konflik sosial (keluhan) dari masyarakat di sekitar area proyek. Hal ini dilakukan dengan memberikan arahan dan melakukan komunikasi secara intens dengan masyarakat dan perwakilan proyek. IIF juga memastikan bahwa tim proyek telah mendokumentasikan semua keluhan, pertemuan, dan penyelesaian atau mufakat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sebagai bahan pembelajaran untuk mencegah terulangnya hal tersebut di masa depan dan sebagai bukti atas upaya proyek untuk menjalin hubungan dan menyelesaikan masalah dengan masyarakat.

In 2021 IIF closely engaged with the Project Team to solve the social conflict (grievances) from the community near the Project area. This was done by providing guidance and conducting intense communication with the community and the Project representative. IIF also ensures that the project team has documented all grievances, meetings, and the resolution as agreed between both parties, as a lesson learned to prevent re-occurrence in the future and become proof of the project's effort to engage with the community and resolve the issues.

Preserving Cultural Heritage

Project Case: Railway Project in South Sulawesi



Photo Source: Project Documentation (2021)

➤ Makam Jotta sebelum (kiri) dan setelah (kanan) relokasi
Makam Jotta before (left) and after (right) the relocation

Proyek pembangunan jalur kereta api yang dibiayai oleh IIF di 2021 di Sulawesi Selatan diketahui berada di dekat makam keramat yang disebut dengan “Makam Jotta”. Selain adanya makam tersebut, di sekitar area proyek juga terdapat beberapa gua dengan lukisan dari zaman prasejarah (*prehistoric cave painting*). Prinsip S&E IIF menekankan pentingnya perlindungan serta pelestarian terhadap warisan budaya yang berpotensi terdampak dari aktivitas proyek.

Sebagai upaya pengelolaan warisan budaya tersebut, IIF merekomendasikan proyek untuk melaksanakan konsultasi secara intensif dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dan Balai Arkeologi (BALAR) serta meminta rekomendasi lebih lanjut dalam upaya menjaga kedua warisan tersebut. Selain itu, proyek juga diminta untuk membuat *Chance Find Procedure* yang mencakup langkah-langkah yang akan dilakukan oleh proyek ketika menemukan benda dan warisan budaya lainnya sepanjang proses pembangunan proyek.

Hingga akhir 2021 lalu, proyek telah melakukan upaya relokasi Makam Jotta serta melakukan proses konsultasi yang bermakna dengan para pemangku kepentingan utama sehingga fungsi kultural dari makam keramat masih tetap bisa digunakan oleh masyarakat seperti sebelumnya.

IIF learned that a sacred tomb which is known to the local people as “Makam Jotta” happens to be located near a railway construction project in South Sulawesi that IIF began to finance in 2021. Besides the tomb, sitting adjacent to the future railway are some caves whose interior walls are adorned by prehistoric paintings. IIF S&E Principles emphasize the importance of protecting and preserving the cultural heritage that may be damaged by project activities.

As an effort to manage this cultural heritage, IIF recommends the project to carry out intensive consultations with the South Sulawesi Cultural Heritage Preservation Center and the Archaeological Center (BALAR) and ask for further recommendations in an effort to preserve the two heritages. In addition, the project was also asked to create a *Chance Find Procedure* which includes the steps the project needs to take when finding objects and other cultural heritages throughout the project development process.

By the end of 2021, the project had made efforts to relocate the Jotta's Tomb and carried out a meaningful consultation process with the project's key stakeholders so that the cultural functions of the sacred tomb can still be used by the community as before.

Improving Community Livelihood and Stakeholder Engagement

Project Case: Condensate Refinery and Pipeline Project in Central Kalimantan



Photo Credit: Yayan Indriatmoko (2021)

➤ Proses studi sosial dengan konsultan dan masyarakat setempat
Social Study Process with Consultant and the Community

Berdasarkan uji tuntas Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh IIF di tahun 2020, diketahui bahwa masyarakat yang berada di sekitar area proyek didominasi oleh dua kelompok Suku Dayak, yaitu Dayak Bakumpai dan Dusun Malang. Kedua kelompok tersebut berpotensi terdampak aktivitas proyek yang akan dibiayai oleh IIF. Berdasarkan empat kriteria yang dimiliki IIF untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat yang diadopsi dari IFC Performance Standard, kedua kelompok tersebut memenuhi kriteria Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*).

Namun, uji tuntas yang dilakukan belum cukup untuk mengidentifikasi besaran dampak dari proyek terhadap Masyarakat Adat di lokasi proyek tersebut, sehingga dibutuhkan studi tambahan untuk menelusuri hal tersebut secara lebih mendalam. IIF merekomendasikan proyek untuk mulai membangun hubungan yang baik dan segera melakukan proses konsultasi mendalam yang bermakna dengan Masyarakat Adat yang terdampak disepanjang jalur pipa dan sekitar area kilang proyek. Selain itu studi sosial tambahan harus segera dilakukan oleh proyek untuk menentukan berbagai rencana tindakan mitigasi dan program pemberdayaan Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Plan or Favorable Actions*).

Pada tahun 2021, proyek telah melaksanakan studi sosial tambahan sebagaimana direkomendasikan oleh IIF. Studi tersebut mencakup rincian mengenai Masyarakat Adat di sekitar lokasi proyek serta kondisi penghidupan dari sisi sosial dan ekonomi masyarakat, yang kemudian akan digunakan untuk dapat menyusun program-program guna mengembalikan atau meningkatkan penghidupan dari masyarakat yang terdampak tersebut. IIF akan terus memantau pelaksanaan program-program tersebut dan membantu memberikan arahan kepada proyek selama masa pembiayaan.

Based on the Social and Environmental due diligence conducted by IIF in 2020, IIF learned that the communities living around a project that IIF financed were dominated by two Dayak Tribes, the Bakumpai Dayak and Dusun Malang. Both tribes were potentially affected by the activities of the project that IIF going to finance. Based on IIF's four criteria for identifying Indigenous Peoples adopted from the IFC Performance Standard, both groups fall under Indigenous Peoples criteria.

However, the last due diligence was not enough to identify the magnitude of the project's impacts on the Indigenous Peoples, so further studies are needed to have a deeper observation. IIF recommends the project to start building engagement and take immediate, meaningful, and in-depth consultations with the affected Indigenous Peoples who reside along the project's pipeline and near its refinery area. In addition, the project also needs to immediately make social studies to determine various mitigation action plans and Indigenous People Plans or Favorable Actions.

In 2021, the project conducted additional social studies as recommended by IIF. The study included details on the Indigenous Peoples who resided near the project site and their livelihood and socio-economic conditions, which will then be used to develop programs to restore or improve the livelihoods of the affected communities. IIF will continue to monitor the implementation of these programs and help provide direction to the project throughout the financing period.

DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG

Produk dan jasa yang diberikan IIF berupa pembiayaan pada proyek-proyek infrastruktur telah memberikan dampak ekonomi tidak langsung bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek. Dampak investasi infrastruktur mencakup jalur-jalur penghubung transportasi, sarana air bersih, fasilitas kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja. **[103-2][203-1][203-2][413-2]**

INDIRECT ECONOMIC IMPACT

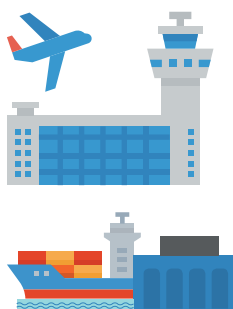
The products and services that IIF offers in the form of financing for infrastructure projects have had an indirect economic impact on the communities that reside near the project sites. The positive impacts of infrastructure investment are the availability of connecting routes, clean water facilities, health facilities, and job creation to name a few. **[103-2][203-1][203-2][413-2]**



Pembangunan Jalan Tol Toll Road Construction

Total proyek jalan tol yang masih aktif dibiayai oleh IIF hingga akhir 2021 adalah sebanyak 8 proyek dengan total panjang yaitu 368,71 km. Proyek pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas barang dan jasa, serta membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

By the end of 2021, there were 8 toll road projects that IIF actively finance, which spanned 368.71 km in total. This toll road construction project is expected to increase the mobility of goods and services, as well as help increase economic growth in the area.



Pembangunan Bandara Udara dan Pelabuhan Airport and Seaport Construction

IIF memiliki 6 proyek bandar udara serta 1 proyek pelabuhan yang masih aktif dibiayai hingga akhir 2021. Pembiayaan terhadap dua jenis infrastruktur tersebut diharapkan dapat memudahkan sarana dan prasarana transportasi antar pulau atau negara yang kemudian dapat mendukung peningkatan ekonomi Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

IIF had 6 airport projects and 1 port project that are actively financed by the end of 2021. The financing for these two types of infrastructure is expected to facilitate transportation facilities and infrastructure between islands or countries, which in turn will support Indonesia's economic improvement and increase community welfare.



Pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) The Construction of Water Utility

Hingga akhir 2021, terdapat 7 proyek SPAM yang aktif dibiayai oleh IIF dengan total kapasitas sekitar 21.520 liter/detik. Proyek ini diestimasi dapat memberikan akses terhadap layanan sumber air minum kepada lebih dari 1,3 juta rumah tangga. Ketersediaan sumber air bersih yang layak dan aman sangat penting untuk membantu meningkatkan kualitas hidup serta kesehatan masyarakat.

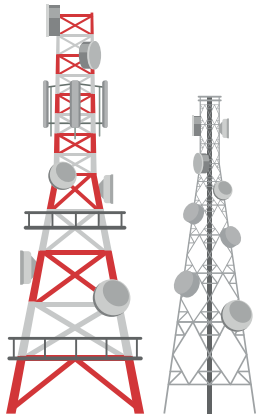
Until the end of 2021, IIF actively financed 7 SPAM projects with a total capacity of around 21,520 liters/second. This project is estimated to provide access to water supply services to more than 1.3 million households. The availability of clean and safe water sources is very important to help improve the quality of life and public health.



Pembangunan Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan The Construction of Renewable Energy-Fired Power Plant

Total proyek energi terbarukan yang masih aktif dibiayai oleh IIF hingga akhir 2021 adalah sebanyak 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 666 MW, dimana lebih dari setengahnya adalah proyek pembangkit listrik tenaga air atau mini hidro. Ketersediaan listrik memegang peranan penting untuk kemajuan suatu daerah guna mendukung kelancaran penghidupan serta ekonomi dari daerah tersebut.

By the end of 2021, IIF actively financed 14 renewable energy projects with a total capacity of around 666 MW, more than half of which were hydro or mini-hydropower projects. The availability of electricity plays an important role in the progress of an area to support the livelihood and economy of the area.



Pembangunan Sarana Telekomunikasi

Construction of Telecommunication Infrastructure

Hingga akhir 2021, terdapat 8 proyek telekomunikasi yang aktif dibiayai oleh IIF. Di akhir tahun 2021, IIF memberikan pembiayaan untuk pembangunan 4G BTS tower di wilayah Papua Barat. Dengan adanya akses telekomunikasi dan jaringan internet yang memadai, hal ini dapat mendukung kegiatan belajar mengajar siswa utamanya dimasa pandemi ini dimana pembelajaran dilakukan dari jarak jauh. Selain itu, pembangunan telekomunikasi turut membantu kelancaran aktivitas masyarakat dalam melakukan berbagai jenis komunikasi dan transaksi secara virtual, sehingga mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

Until the end of 2021, there were 8 telecommunication projects actively financed by IIF. At the end of 2021, IIF provided financing for the construction of a 4G BTS tower in the West Papua region. Better access to telecommunications and internet networks can support teaching and learning activities, especially during this pandemic where remote learning was commonly done. In addition, the development of telecommunications also helps the smooth running of community activities in communicating and making virtual transactions, which in the end will help improve the community's economy.

INISIATIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2021 [F.25][103-1][413-1]

Pada tahun 2021, IIF secara langsung melakukan sejumlah inisiatif yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat. Total biaya Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang dikeluarkan adalah sebesar Rp456 Juta dengan fokus penggunaan pada penanggulangan penyebaran virus COVID-19, bantuan terhadap bencana alam, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi proyek. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di 2021 antara lain meliputi:

- Kegiatan kerja sama dengan *Special Mission Vehicles* (SMV) lainnya untuk mengurangi potensi penyebaran virus COVID-19;
- Bekerja sama dengan SMV lainnya pada saat terjadi bencana alam;
- Pembelian Idul Qurban Tahunan. Perseroan secara langsung melibatkan klien dan menyumbangkan Qurban di sekitar lokasi proyek di Pulau Jawa dan Sulawesi;
- Berkolaborasi dengan institusi pendidikan untuk menyusun program yang tepat dan spesifik berfokus pada pemberdayaan sosial.

COMMUNITY EMPOWERMENT INITIATIVES 2021 [F.25][103-1][413-1]

In 2021, IIF made direct initiatives that involved and empowered the community. The total cost of Environmental Social Responsibility (TJSL) reached Rp456 million with a focus on controlling the spread of the COVID-19 virus, assistance for natural disasters, and improving the welfare of the community at the project site. Activities carried out in 2021 included:

- Collaborations with other Special Mission Vehicles (SMV) to reduce the potential spread of the COVID-19 virus;
- Cooperating with other SMVs in the event of a natural disaster;
- Purchase of sacrifice animals for the Annual Eid Al-Qurban. The Company directly involved clients and donated Qurban around project sites in Java and Sulawesi;
- Collaborating with educational institutions to develop appropriate and specific programs which focused on social empowerment.

IIF dan Universitas Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Sosial dan Lingkungan

IIF and University of Indonesia Increase Cooperation in Social and Environmental Sector

Pada tahun 2021, IIF telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Universitas Indonesia (UI) dalam rangka meningkatkan kerja sama dalam bidang program pengabdian dan pengembangan masyarakat dan lingkungan. Hal ini menandai kerja sama awal antara IIF dan UI untuk dapat meningkatkan komitmen serta kontribusi melalui program-program CSR yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan/atau lingkungan.

Ruang lingkup kerjasama antara IIF dan UI memiliki beberapa tujuan, di antaranya menyukseskan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia yang berlandaskan 8 Prinsip Sosial dan Lingkungan IIF dan merencanakan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* berwawasan sosial dan/atau lingkungan.

Rector Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro S.E., M.A., Ph.D, menyambut dengan baik kerja sama tersebut untuk dapat memberikan manfaat dan kebaikan sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui program CSR dan sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat.

IIF sebagai agen perubahan dan katalis pembangunan infrastruktur meyakini bahwa aspek keberlanjutan dalam pembangunan juga meliputi tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Kerja sama antara IIF dan UI tersebut diharapkan dapat mewujudkan program CSR yang unggul dan dapat berjalan dengan lancar untuk memberikan manfaat yang luas sebagai bakti IIF dan UI untuk Indonesia.

In 2021, IIF signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the University of Indonesia (UI) in order to increase cooperation in the field of community and environmental service and development programs. The MoU marked the initial collaboration between IIF and UI to increase commitment and contribution through CSR programs that can improve the quality of life for the community and/or the environment.

The scope of collaboration between IIF and UI has some objectives e.g. bringing to success the sustainable infrastructure development in Indonesia based on IIF's 8 Social and Environmental Principles and planning a Corporate Social Responsibility (CSR) Program with social and/or environmental perspectives.

The University of Indonesia Rector, Prof. Ari Kuncoro S.E., M.A., Ph.D, gave his warm welcome to this collaboration, hoping that it will provide the maximum benefit and favor to the community through CSR programs and as a manifestation of the Tri Dharma of Higher Education, i.e. community service.

IIF as an agent of change and a catalyst for infrastructure development believes that aspects of sustainability in development also include responsibility for the community and the environment. IIF hopes that the collaboration with UI will run well and help to realize a superior CSR program to give broader benefits, as IIF and UI's dedication to Indonesia.

MEKANISME PENANGANAN KELUHAN [F.24][103-3]

Untuk mengakomodasi keluhan-keluhan dari masyarakat terkait proyek-proyek yang dibiayai Perseroan, IIF telah membentuk Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism* – GRM). Melalui GRM, pemangku kepentingan proyek IIF dapat langsung menghubungi IIF untuk menyampaikan keluhan mereka.

GRM dapat diakses melalui situs *web* IIF dan semua keluhan yang diterima akan dicatat dan diperbarui secara berkala. Mekanisme penanganan keluhan IIF meliputi:

- Menerima dan mencatat keluhan,
- Menanggapi keluhan tersebut dalam waktu 2x24 jam dengan memberikan informasi bahwa keluhan telah diterima dan akan ditindak lanjuti oleh tim,
- Melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap keluhan dalam waktu 14 hari,

GRIEVANCE REDRESS MECHANISM [F.24][103-3]

To accommodate complaints from the community regarding projects it is financing, IIF has established a Grievance Redress Mechanism (GRM). Through this mechanism, project stakeholders can directly contact IIF to express their complaints.

GRM can be accessed through IIF official website and all complaints received will be recorded and updated regularly. The following is IIF handling mechanism:

- Receive and record complaints,
- Respond to the complaint within 2x24 hours by providing information that the complaint has been received and will be followed up by the team,
- Carry out the complaint verification and validation process within 14 days,

- iv) Setelah divalidasi, keluhan tersebut perlu untuk diselesaikan dalam waktu 30 hari baik secara langsung atau dengan meneruskan keluhan tersebut kepada pihak terkait yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan keluhan;
- v) Memantau proses resolusi keluhan;
- vi) Menutup keluhan jika sudah dinyatakan selesai dan menyiapkan memo yang berisikan kesepakatan dari pihak pemberi keluhan dan juga IIF.

Setiap tahun catatan keluhan tersebut akan dilaporkan sebagai bagian dari Laporan Kinerja Sosial dan Lingkungan Tahunan IIF dan dilengkapi dengan status penyelesaiannya.

Selain itu, IIF juga menerapkan hal yang sama di masing-masing proyek yang dibiayai. Proyek diminta untuk memiliki mekanisme penanganan keluhan serupa serta mencatat segala jenis keluhan yang masuk dan tindakan penyelesaiannya. Setelah itu, proyek diharapkan dapat melaporkan hasil pencatatan tersebut setiap tahun kepada IIF. Mekanisme ini memastikan bahwa proyek di semua tahapan menjaga hubungan baik dengan semua pemangku kepentingannya, terutama dengan masyarakat sekitar yang terdampak oleh proyek.

Hingga akhir 2021, terdapat 1 keluhan yang masuk melalui kontak langsung dengan personel dari Divisi Sosial dan Lingkungan IIF yang menyampaikan keluhan terkait dengan salah satu proyek yang dibiayai oleh IIF. Sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan, IIF telah melakukan tindak lanjut atas keluhan tersebut dengan melakukan verifikasi terhadap proyek serta meneruskan upaya penyelesaian keluhan tersebut bersama proyek. IIF juga telah mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak dalam bentuk pernyataan tertulis sebagai bukti penyelesaian keluhan.

Berdasarkan laporan dari masing-masing proyek, terdapat total 54 keluhan yang dicatat oleh proyek dan 7 di antaranya masih dalam proses penyelesaian. Angka keluhan yang masuk ke proyek mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2020 di mana terdapat sekitar 384 keluhan yang dilaporkan oleh proyek. Pengurangan jumlah keluhan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas klien dalam mengelola hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan di proyeknya.

- iv) Directly or indirectly settle the complaint within 30 days once it is validated or forward the complaint to the relevant party responsible for resolving the complaint;
- v) Monitor the complaint resolution process;
- vi) Close the case if the complaint has been declared settled and prepare a memo that contains an agreement from the complainant and IIF.

In each year, the complaint record will be reported as part of the IIF Annual Social and Environmental Performance Report along with its resolution status.

In addition, IIF has the same method applied in each of the projects it finances. Projects are required to have a similar complaint handling mechanism and record all types of complaints that they receive including its resolution measures. After that, the project shall report the grievance redress results annually to IIF. This mechanism ensures that the project at all stages maintains good relations with all of its stakeholders, especially with the surrounding communities affected by the project.

Until the end of 2021, there was 1 complaint that was received through direct contact where the complainant talked with a staff of the Social and Environmental Division, expressing a complaint related to one of the projects financed by IIF. In accordance with the established mechanism, IIF has followed up the complaint by verifying the project and making further efforts to have the project resolve the complaint. IIF has also obtained an agreement from both parties in the form of a written statement as proof that the complaint has been settled.

Based on reports from each project, there were a total of 54 complaints filed by the projects and 7 of them are still in the resolution process. The number of complaints coming into the project has decreased significantly compared to 2020 when there were around 384 complaints reported by the project. This lower figure indicates an increase in the clients' capacity to manage good relationships with various stakeholders in the project.

INDEKS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 51/POJK.03/2017 [G.4]

Index of POJK No. 51/POJK.03/2017

No. Indeks No. Index	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan Explanation on Sustainability Strategies	7
Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan Overview of Sustainability Aspects Performance		
B.1	Aspek Ekonomi Economy Aspects	19
B.2	Aspek Lingkungan Hidup Environmental Aspects	20
B.3	Aspek Sosial Social Aspects	21
Profil Perusahaan Company Profile		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Vision, Mission, Sustainable Values	24
C.2	Alamat Perusahaan Company Address	23
C.3	Skala Usaha: a. Total aset atau kapitalisasi dan total kewajiban; b. Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan; c. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham; dan d. Wilayah operasional Business Scale: a. Total assets or assets capitalization and total liabilities; b. Total employee based on gender, position, age, education and employment status; c. Percentage of share ownership; and d. Operational area.	23, 25, 28, 84, 85
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Product, Service and Business Activities	23, 26
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi Member Association	28
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan Significant Changes	3
Penjelasan Direksi Director Explanation		
D.1	Penjelasan Direksi Director Explanation	30
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainable Corporate Governance		
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Person in Charge Responsibility for Sustainable Finance	40
E.2	Pengembangan Kompetensi terkait Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Competency Development	46
E.3	Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Risk Assessment Implementation	46-49
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Stakeholders Relations	57
E.5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Implementation Problems	50
Kinerja Keberlanjutan Sustainable Performance		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan The Activities of Building a Culture of Sustainability	51, 60
Kinerja Ekonomi Economic Performance		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of Production Targets and Performance, Portfolio, Financial Targets, or Investment, Revenue and Profit	64
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan Comparison of Portfolio Targets and Performance, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects in Line With the Implementation of Sustainable Finance	64
Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup Environment Cost Incurred	78
Aspek Material Material Aspect		
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan Use of Environmentally Friendly Materials	78

No. Indeks No. Index	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
Aspek Energi Energy Aspect		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan The Amount and Intensity of Energy Used	75
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Efforts and Achievement of Energy Efficiency Including Use of Renewable Energy Sources	77
Aspek Air Water Aspect		
F.8	Penggunaan Air Water Usage	77
Aspek Keanekaragaman Hayati Biodiversity Aspect		
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati Impacts from Operational Areas Close to or in Conservation Areas or Having Biodiversity	78
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Biodiversity Conservation Efforts	78
Aspek Emisi Emission Aspect		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan berdasarkan Jenisnya The Amount and Intensity of Emissions Produced by Type	76
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan Efforts and Achievement Emission Reduction Carried Out	77
Aspek Limbah dan Efluen Waste and Effluent Aspect		
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan berdasarkan Jenis The Amount of Waste and Effluent Produced by Type	77
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Mechanism of Waste and Effluent Management	77
F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada) Spills that Occurred (if any)	77
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup Environmental Complaint Aspect		
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan The Amount and Material of Environmental Complaints Received and Resolved	79
Kinerja Sosial Social Aspect		
F.17	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen Commitment to Provide Services for Equivalent Products and/or Services to Consumers	64
Aspek Ketenagakerjaan Employment Aspect		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equality of Employment Opportunities	83, 85
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	84
F.20	Upah Minimum Regional The Regional Minimum Wage	89
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman Decent and Safe Working Environment	90
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Training and Capacity Building of Employees	86-87
Aspek Masyarakat Society Aspect		
F.23	Dampak Operasi terhadap Masyarakat Sekitar Operational Impacts to the Surrounding Community	94
F.24	Pengaduan Masyarakat Public Complaints	99
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Environmental and Social Responsibility Activities	98
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibilities for Developing Sustainable Products/Services		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan Innovation and Development of Sustainable Financial Products and/or Services	67
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan Products/Services that have been Evaluated for Safety for Customers	66
F.28	Dampak Produk/Jasa Products/Service Impacts	64
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali Number of Products Recalled	65
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Customer Satisfaction Survey of Sustainable Finance and/or Services	65
Lain-lain Others		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada) Written Verification from an Independent Party (if any)	Tidak dilakukan
G.2	Lembar Umpan Balik Feedback Form	109
G.3	Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Feedback on Previous Year's Sustainability Report	-
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik Disclosure List Based on POJK No.51/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Listed Companies and Public Companies	101

INDEKS REFERENSI SILANG GRI STANDARDS – *CORE OPTION* [102-55]

Sustainability Report GRI Standards Reference Index CORE

Aspek Material Material Aspects	Indeks yang Dilaporkan Reported Index	Keterangan Remarks	Dilaporkan pada halaman Reported on page
Profil Organisasi Organizational Profile	102-1	Nama Organisasi Name of the Organization	23
	102-2	Kegiatan, Merek, Produk, dan Jasa Activities, Brands, Products, and Services	23, 26
	102-3	Lokasi Kantor Pusat Location of Headquarters	23
	102-4	Lokasi Operasional Location of Operations	23, 29
	102-5	Kepemilikan dan Badan Hukum Ownership and Legal Form	23, 28
	102-6	Pasar yang Dilayani Markets Served	23, 29
	102-7	Skala Organisasi Scale of the Organization	25
	102-8	Informasi Mengenai Karyawan dan Pekerja Lain Information on Employees and Other Worker	84
	102-9	Rantai Pasok Supply Chain	56
	102-10	Perubahan Signifikan Pada Organisasi dan Rantai Pasokannya Significant Changed to The Organization and Its Supply Chain	28
	102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan Precautionary Principle or Approached	47-48
	102-12	Inisiatif Eksternal External Initiatives	28
	102-13	Keanggotaan Asosiasi Memberships of Associations	28
Strategi Strategy	102-14	Pernyataan dari Pembuat Keputusan Senior Statement from Senior Decision-Maker	30
	102-15	Dampak Utama, Risiko, dan Peluang Key impacts, risk, and opportunities	30
Etika dan Integritas Ethics and Integrity	102-16	Nilai, Prinsip, Standar dan Norma Value, Principles, Standards, and Norm of Behavior	24, 51
	102-17	Mekanisme untuk Saran dan Kekhawatiran Tentang Etika Mechanisms for Advice and Concerns About Ethics	51
Tata Kelola Governance	102-18	Struktur Tata Kelola Governance Structure	35
	102-19	Mendelegasikan Wewenang Delegating Authority	40
	102-20	Tanggung Jawab Tingkat Eksekutif untuk Topik Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial Executive-Level Responsibility for Economic, Enviromental, and Social Topics	40, 42
	102-21	Berkonsultasi dengan Para Pemangku Kepentingan Mengenai Topik-Topik Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial Consulting Stakeholders on Economic, Environmental, and Social Topics	45
	102-22	Komposisi Badan Tata Kelola Tertinggi dan Komitennya Composition of the Highest Governance Body and its Committees	37
	102-23	Ketua Badan Tata Kelola Tertinggi Chair of the Highest Governance Body	37
	102-24	Menominasikan dan Memilih Badan Tata Kelola Tertinggi Nominating and Selecting the Highest Governance Body	37
	102-25	Konflik Kepentingan Conflict of Interest	52
	102-26	Peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam Menetapkan Tujuan, Nilai-Nilai, dan Strategi Role of Highest Governance Body in Setting Purpose, Value, And Strategy	35
	102-27	Pengetahuan Kolektif Badan Tata Kelola Tertinggi Collective Knowledge of Highest Governance Body	46
	102-28	Mengevaluasi Kinerja Badan Tata Kelola Tertinggi Evaluating the Highest Governance Body's Performance	38

Aspek Material Material Aspects	Indeks yang Dilaporkan Reported Index	Keterangan Remarks	Dilaporkan pada halaman Reported on page
	102-29	Mengidentifikasi dan Mengelola Dampak Ekonomi, Lingkungan, dan Social Identifying and Managing Economic, Environmental, and Social Impacts	40, 41
	102-30	Keefektifan Proses Manajemen Risiko Effectiveness of Risk Management Processes	49
	102-31	Pengkajian Topik Ekonomi, Lingkungan, dan Social Reviews of Economic, Environmental and Social Topics	42
	102-32	Peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam Pelaporan Keberlanjutan Highest Governance Body's Role in Sustainability Reporting	42
	102-33	Mengomunikasikan Hal-hal Kritis Communicating Critical Concerns	39
	102-34	Sifat dan Jumlah Total Hal-hal Kritis Nature and Total Number of Critical Concerns	39
	102-35	Kebijakan Remunerasi Remunerations Policies	39
	102-36	Proses untuk Menentukan Remunerasi Process for Determining Remuneration	39, 89
	102-37	Keterlibatan Para Pemangku Kepentingan dalam Remunerasi Stakeholders' Involvement in Remuneration	89
	102-38	Rasio Kompensasi Total Tahunan Annual Total Compensation Ratio	Tidak melaporkan karena bersifat internal
	102-39	Persentase Kenaikan Pada Total Rasio Kompensasi Total Tahunan Percentage Increase in Annual Total Compensation Ratio	Tidak melaporkan karena bersifat internal
Keterlibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement	102-40	Daftar Kelompok Pemangku Kepentingan List of Stakeholder Groups	57
	102-41	Perjanjian Perundingan Kolektif Collective Bargaining Agreements	86
	102-42	Mengidentifikasi dan Memilih Pemangku Kepentingan Identifying and Selecting Stakeholders	57
	102-43	Pendekatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Approach to Stakeholder Engagement	57
	102-44	Topik Utama dan Hal-hal yang Diajukan Key Topics and Concern Raised	57
Praktik Pelaporan Reporting Practice	102-45	Entitas yang Termasuk dalam Laporan Keuangan Dikonsolidasi Entities Included in the Consolidated Financial Statement	3
	102-46	Menetapkan Isi Laporan dan Batasan Topik Defining Report Content and Topic Boundaries	4
	102-47	Daftar Topik Material List of Material Topics	4
	102-48	Penyajian Kembali Informasi Restatements of Information	2, 3
	102-49	Perubahan dalam Pelaporan Changes in Reporting	3, 4
	102-50	Periode Pelaporan Reporting Period	2
	102-51	Tanggal Laporan Terbaru Date of Most Recent Report	2
	102-52	Siklus Pelaporan Reporting Cycle	2
	102-53	Titik Kontak untuk Pertanyaan Mengenai Laporan Contact Point For Questions Regarding the Report	6
	102-54	Mengklaim Pelaporan Sesuai dengan Standar GRI Claims of Reporting in Accordance with the GRI Standards	3
	102-55	Indeks Isi GRI GRI Content Index	2, 3, 103
	102-56	Assurance oleh Pihak Eksternal External Assurance	Tidak dilakukan
Ekonomi Economic			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Explanation of the Material Topic and Its Boundary	5, 93
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya The Management Approach and its Components	93, 97
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the Management Approach	99
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016 GRI 203: Indirect Economic Impact 2016	203-1	Investasi Infrastruktur dan Dukungan Layanan Infrastructure Investments and Services Supported	97
	203-2	Dampak Ekonomi Tidak Langsung yang Signifikan Significant Indirect Economic Impacts	97

Aspek Material Material Aspects	Indeks yang Dilaporkan Reported Index	Keterangan Remarks	Dilaporkan pada halaman Reported on page
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Explanation of the Material Topic and Its Boundary	5, 55
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya The Management Approach and its Components	55, 56
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the Management Approach	55
GRI 205: Antikorupsi 2016 GRI 205: Anticorruption 2016	205-1	Operasi-Operasi Yang Dinilai Memiliki Risiko Terkait Korupsi Operations Assessed For Risks Related To Corruption	49, 55
	205-2	Komunikasi dan Pelatihan Tentang Kebijakan dan Prosedur Anti-korupsi Communication and Training About Anti-corruption Policies and Procedures	55
	205-3	Insiden Korupsi yang Terbukti dan Tindakan yang Diambil Confirmed Incidents of Corruption and Action Taken	56
Lingkungan Environment			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Explanation of the Material Topic and Its Boundary	5
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya The Management Approach and its Components	74
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the Management Approach	74
GRI 302: Energi 2016 GRI 302: Energy 2016	302-1	Konsumsi Energi dalam Organisasi Energy Consumption Within the Organization	74, 75
	302-2	Konsumsi Energi di Luar Organisasi Energy Consumption Outside of The Organization	77
	302-3	Intensitas Energi Energy Intensity	74, 75
	302-4	Pengurangan Konsumsi Energi Reduction of Energy Consumption	77
	302-5	Pengurangan Pada Energi yang Dibutuhkan untuk Produk dan Jasa Reduction In Energy Requirements of Products and Services	77
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Explanation of the Material Topic and Its Boundary	5
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya The Management Approach and its Components	77
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the Management Approach	79
GRI 303: Air dan Efluen 2018 GRI 303: Water and Effluents 2018	303-1	Interaksi dengan Air Sebagai Sumber Daya Bersama Interactions With Water As A Shared Resource	77
	303-2	Manajemen Dampak yang Berkaitan dengan Pembuangan Air Management of Water Discharge-related Impacts	77
	303-3	Pengambilan Air Water Withdrawal	77
	303-4	Pembuangan Air Water Discharge	77
	303-5	Konsumsi Air Water Consumption	77
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Explanation of the Material Topic and Its Boundary	78
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya The Management Approach and its Components	79
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the Management Approach	79
GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016 GRI 304: Biodiversity 2016	304-1	Lokasi Operasi yang Dimiliki, Disewa, Dikelola, atau Berdekatan Dengan Kawasan Lindung dan Kawasan Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Lindung Operational Sites Owned, Leased, Managed In, or Adjacent to, Protected Areas and Areas of High Biodiversity Value Outside Protected Areas	78
	304-2	Dampak Signifikan dari Kegiatan, Produk, dan Jasa Pada Keanekaragaman Hayati Significant Impacts of Activities, Products, and Services on Biodiversity	78
	304-3	Habitats Protected or Restored Habitat yang Dilindungi atau Dilestarikan	79

Aspek Material Material Aspects	Indeks yang Dilaporkan Reported Index	Keterangan Remarks	Dilaporkan pada halaman Reported on page
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Explanation of the Material Topic and Its Boundary	5
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya The Management Approach and its Components	74, 75
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the Management Approach	99
GRI 305: Emisi 2016 GRI 305: Emission 2016	305-1	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1) Direct GHG Emissions (Scope1)	75, 76
	305-2	Emisi Energi GRK (Cakupan 2) Tidak Langsung Energy Indirect (Scope 2) GHG Emissions	75, 76
	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) Tidak Langsung Lainnya Other Indirect (Scope 3) GHG Emissions	77
	305-4	Intensitas Emisi GRK GHG Emissions Intensity	76
	305-5	Pengurangan Emisi GRK Reduction of GHG Emissions	74, 77
	305-6	Emisi Zat Perusak Ozon (ODS) Emissions of Ozone-Depleting Substance (ODS)	76
	305-7	Nitrogen Oksida (NOX), Sulfur Oksida (SOX), dan Emisi Udara Signifikan Lainnya Nitrogen Oxides (NOX), Sulfur Oxides (SOX), and Other Significant Air Emissions	76
Sosial Social			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Explanation of the Material Topic and Its Boundary	5, 82
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya The Management Approach and its Components	83
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the Management Approach	88
GRI 401: Ketenagakerjaan 2016 GRI 401: Employment 2016	401-1	Perekrutan Karyawan Baru dan Pengantian Karyawan New Employee Hires and Employee Turnover	85-86
	401-2	Tunjangan yang Diberikan Kepada Karyawan Purnawaktu yang Tidak Diberikan Kepada Karyawan Sementara atau Paruh Waktu Benefits Provided to Full-time Employees That Are Not Provided to Temporary or Part-Time Employees	89
	401-3	Cuti Melahirkan Parental Leave	90
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Explanation of the Material Topic and Its Boundary	5
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya The Management Approach and its Components	90
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the Management Approach	91
GRI 403: Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2018 GRI 403: Occupational Health and Safety 2018	403-2	Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Dan Investigasi Insiden Hazard Identification, Risk Assessment, And Incident Investigation	90, 91
	403-6	Peningkatan Kualitas Kesehatan Pekerja Promotion of Worker Health	91
	403-9	Kecelakaan Kerja Work-related Injuries	91
	403-10	Penyakit Akibat Kerja Work-related Ill Health	91
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Explanation of the Material Topic and Its Boundary	87
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya The Management Approach and its Components	87
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the Management Approach	88

Aspek Material Material Aspects	Indeks yang Dilaporkan Reported Index	Keterangan Remarks	Dilaporkan pada halaman Reported on page
GRI 404: Pelatihan & Pendidikan 2016 GRI 404: Training & Education 2016	404-1	Rata-Rata Jam Pelatihan Per Tahun Per Karyawan Average Hours of Training Per Year Per Employee	86-87
	404-2	Program untuk Meningkatkan Keterampilan Karyawan dan Program Bantuan Peralihan Programs for Upgrading Employee Skills and Transition Assistance Programs	86-88
	404-3	Persentase Karyawan yang Menerima Tinjauan Rutin Terhadap Kinerja dan Pengembangan Karier Percentage of Employees Receiving Regular Performance and Career Development Reviews	88
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Explanation of the Material Topic and Its Boundary	82
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya The Management Approach and its Components	82-83
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the Management Approach	88
GRI 406: Non-diskriminasi 2016 GRI 406: Non- discrimination 2016	406-1	Insiden Diskriminasi dan Tindakan Perbaikan yang Dilakukan Incidents of Discrimination and Corrective Actions Taken	83
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Explanation of the Material Topic and Its Boundary	84
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya The Management Approach and its Components	84
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the Management Approach	88
GRI 408: Pekerja Anak 2016 GRI 408: Child Labor 2016	408-1	Operasi dan Pemasok yang Berisiko Signifikan Terhadap Insiden Pekerja Anak Operations and Suppliers at Significant Risk for Incidents of Child Labor	84
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Explanation of the Material Topic and Its Boundary	84
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya The Management Approach and its Components	84
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the Management Approach	88
GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016 GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016	409-1	Operasi dan Pemasok yang Berisiko Signifikan Terhadap Insiden Pekerja Kerja Paksa atau Wajib Kerja Operations and Suppliers at Significant Risk for Incidents of Forced or Compulsory Labor	84
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 GRI 103: Management Approach 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya Explanation of the Material Topic and Its Boundary	98
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya The Management Approach and its Components	97
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the Management Approach	99
GRI 413: Masyarakat Lokal 2016 GRI 413: Local Community 2016	413-1	Operasi dengan Keterlibatan Masyarakat Lokal, Penilaian Dampak dan Program Pengembangan Operations with Local Community Engagement, Impact Assessments, and Development Programs	98
	413-2	Operasi yang Secara Aktual dan yang Berpotensi Memiliki Dampak Negatif Signifikan Terhadap Masyarakat Lokal Operations with Significant Actual and Potential Negative Impacts On Local Communities	94, 97

Aspek Material Material Aspects	Indeks yang Dilaporkan Reported Index	Keterangan Remarks	Dilaporkan pada halaman Reported on page
Indikator Spesifik Sektor Jasa Keuangan Financial Services Sector Specific Indicator			
FS	FS1	Kebijakan dengan Komponen Lingkungan dan Sosial Tertentu Policies with Specific Environmental and Social Components Applied to Business Lines	42-44
	FS2	Prosedur untuk Menilai dan Menyaring Lingkungan dan Risiko Sosial di Lini Bisnis Procedures for Assessing and Screening Environmental and Social Risks in Business Lines	42-44
	FS3	Proses untuk Memantau Implementasi dan Kepatuhan Klien Terhadap Persyaratan Lingkungan dan Sosial yang Termasuk dalam Perjanjian atau Transaksi Processes for Monitoring Clients' Implementation of and Compliance With Environmental and Social Requirements Included in Agreements or Transactions	42-44
	FS4	Proses untuk Meningkatkan Kompetensi Staf untuk Menerapkan Kebijakan dan Prosedur Lingkungan dan Sosial Sebagaimana Diterapkan pada Lini Bisnis Process(es) for Improving Staff Competency to Implement the Environmental and Social Policies and Procedures as Applied to Business Lines	42-44
	FS5	Interaksi dengan Klien/Investasi/Mitra Bisnis Mengenai Risiko dan Peluang Lingkungan dan Sosial Interactions with Clients/Investees/Business Partners Regarding Environmental and Social Risks and Opportunities	45

LEMBAR UMPAN BALIK [G.2]

Feedback Form

LAPORAN KEBERLANJUTAN IIF TAHUN 2021

IIF Sustainability Report 2021

Silahkan pilih salah satu kelompok pemangku kepentingan yang paling mewakili Anda:

Please tick the box for the stakeholder group that best describes you:

☐ Pegawai Employee	☐ Regulator	☐ Lain-lain Others:
☐ Contractor/Sub-contractor/Vendor/Supplier	☐ NGO	
☐ Konsumen Customer	☐ Media	
☐ Investor/Financial Analyst/Shareholders	☐ Student/Academics	

Bagaimana penilaian Anda terhadap laporan ini:

Please rate the report for:

Parameter Parameter	1	2	3	4	5
Dapat memenuhi kebutuhan informasi yang anda butuhkan Meeting your information needs					
Konten yang lengkap Content completeness					
Transparan Transparency					
Jelas dan mudah dimengerti Clarity and easy to understand					
Kemudahan dalam mencari informasi tertentu Ease in finding information					
Keseluruhan Laporan Overall Report					

Laporan ini terdiri dari bagian-bagian berikut:

The report has these following sections:

Bagian Section	Apakah anda mengakses bagian ini? Did you access this section?	Apakah bagian ini bermanfaat/memuat informasi yang mencukupi? Is it useful/insightful?
Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy	☐	☐
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance Overview	☐	☐
Profil Perusahaan Company Profile	☐	☐
Sambutan Direksi Message from the Board of Directors	☐	☐
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance	☐	☐
Kinerja Ekonomi Economic Performance	☐	☐

Bagian Section	Apakah anda mengakses bagian ini? Did you access this section?	Apakah bagian ini bermanfaat/memuat informasi yang mencukupi? Is it useful/insightful?
Kinerja Lingkungan Environmental Performance	☐	☐
Kinerja SDM HR Performance	☐	☐
Kinerja Sosial Masyarakat Community Social Performance	☐	☐

Material aspek apa yang menurut Anda paling informatif dan bermanfaat?

Which of our most material aspect did you find informative or useful?

Aspek Keberlanjutan Material Material Sustainability Aspects	Apakah data dan informasi yang disajikan cukup untuk kebutuhan informasi Anda? Is data and information presented sufficient for you?		
	Terlalu Banyak Too Much	Mencukupi Sufficient	Terlalu Sedikit Too Little
Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impact			
Anti-korupsi Anti Corruption			
Energi Energy			
Air dan Efluen Water and Effluent			
Emisi Emission			
Ketenagakerjaan Employment			
Pelatihan dan Pendidikan Training and Education			

Apakah laporan ini telah menjawab pertanyaan Anda tentang kinerja keberlanjutan kami?

Mohon penjelasan:

Does the report address your main concerns about our sustainability performance?

Please elaborate:

DRIVING RECOVERY TOWARDS RESILIENT SOCIETY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT



PT Indonesia Infrastructure Finance



Prosperity Tower Floor 53rd-55th
District 8, Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

CONTACTS



(62-21) 5082 6600
(62-21) 5082 6601



info@iif.co.id



Indonesia Infrastructure Finance



@pt_IIF